

LAPORAN *SURVEILLANCE*
PERBANKAN INDONESIA
LSPI
TW I 2026

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kata Pengantar

Dian Ediana Rae

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan - Otoritas Jasa Keuangan



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan *Surveillance* Perbankan Indonesia Triwulan I-2026 ini dapat diselesaikan dengan baik. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun atas jerih payahnya sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Kami berharap agar pembaca dan pengguna laporan ini dapat memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari data dan informasi maupun analisis/ulasan yang disajikan.

Laporan *Surveillance* Perbankan Indonesia Triwulan I-2026 ini memuat *overview* dan analisis kondisi perekonomian global maupun domestik, serta kaitannya terhadap perkembangan kinerja, penyaluran kredit dan/atau pembiayaan, dan profil risiko yang dihadapi perbankan. Selain itu, dalam laporan ini tercakup juga kebijakan perbankan yang diterbitkan oleh OJK pada periode laporan, perkembangan kelembagaan perbankan, serta koordinasi antar lembaga terkait perbankan. Pada laporan ini juga disajikan pembahasan khusus dengan topik "**Kinerja, Tantangan, dan Peluang Daya Saing Industri Pengolahan Indonesia di Tengah Dinamika Global dan Domestik**".

Secara umum, pada triwulan I-2026, kondisi perekonomian global masih cenderung menguat yang tecermin dari pertumbuhan positif ekonomi beberapa negara besar seperti AS, UK, dan Tiongkok. Namun di sisi lain, laju inflasi AS, Eropa, dan Tiongkok mengalami peningkatan, sedangkan inflasi UK tercatat menurun. Peningkatan laju inflasi di tengah penguatan pertumbuhan ekonomi terjadi sebagai dampak dari risiko geopolitik akibat konflik AS-Israel-Iran yang mencapai puncaknya pada Februari-Maret 2026. Konflik tersebut berakibat pada melonjaknya harga komoditas energi serta gangguan rantai pasok dan persediaan energi khususnya minyak, sehingga berdampak pada meningkatnya inflasi global dan meningkatkan sentimen pada pasar keuangan serta pasar saham global. Ketidakpastian ekonomi global akibat ketegangan geopolitik tersebut turut menjadi faktor risiko yang perlu dicermati ke depan. Dalam merespons kenaikan inflasi tersebut, hingga triwulan I-2026, The Fed memutuskan mempertahankan suku bunga acuan (FFR) di kisaran 3,50%-3,75%, sejalan dengan keputusan serupa yang diambil ECB, BoE, dan PBoC.

Di tengah dinamika dan ketidakpastian perekonomian global, ekonomi Indonesia pada triwulan I-2026 ini relatif terjaga dan mampu tumbuh sebesar 5,61% (yoy). Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (54,87%) dan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 5,39%. Tekanan inflasi meningkat baik di negara-negara maju (*advance economy*) maupun di negara-negara berkembang (*emerging market*). Guncangan energi menyebabkan kenaikan harga komoditas, sementara efek tidak langsung mendorong kenaikan harga di seluruh sektor ekonomi.

Ketahanan ekonomi domestik yang tetap terjaga tecermin pada indikator perbankan di triwulan I-2026 sebagaimana terlihat pada pertumbuhan kredit (bank umum) yang cukup baik yaitu sebesar 9,49% (yoy), meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya (9,16%, yoy). Berdasarkan jenis penggunaan, porsi kredit masih didominasi oleh kredit produktif sebesar 73,52%. Di sisi lain, DPK mampu tumbuh *double digit* yaitu sebesar 13,55% (yoy) meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya 4,75% (yoy). Selain itu, likuiditas perbankan masih terjaga ditopang oleh rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masih terjaga tinggi di atas *threshold* masing-masing sebesar 122,55% dan 27,85%. Tingkat permodalan masih cukup solid dengan CAR sebesar 25,09% meski menurun dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan peningkatan ATMR yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan modal. Risiko kredit terpantau membaik dengan rasio NPL *gross* yang menurun menjadi sebesar 2,14% (yoy) dan NPL net stabil 0,83%.

Saat ini, dinamika geopolitik masih berlanjut dan masih berada pada level yang tinggi, meski intensitasnya mulai sedikit menurun dibandingkan periode Maret-Mei 2026. Konflik Timur-Tengah (AS-Iran dan Palestina-Israel) belum benar-benar normal meskipun ketegangan menurun. OECD, pada *press*

release tanggal 3 Juni 2026, memperkirakan pertumbuhan global akan melambat dibandingkan tahun 2025 menjadi 2,8% di tahun 2026 dan perlahan meningkat menjadi 3,1% di tahun 2027. Pada skenario “gangguan yang berkepanjangan”, pertumbuhan global melambat menjadi 2,1% pada tahun 2026 dan 1,8% pada tahun 2027. Pada posisi Juni 2026, laju inflasi global serentak menurun di beberapa negara besar seperti AS, Eropa, UK dan Tiongkok. Di tengah situasi tersebut, PMI manufaktur menurun ke zona kontraksi namun Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang masih berada di zona optimis. Kondisi perbankan juga terjaga baik pada posisi Juni 2026, tercermin dari pertumbuhan DPK sebesar 10,21% (yoy) dan kredit sebesar 12,67% (yoy), NPL *gross* menurun menjadi 2,09%, serta likuiditas yang memadai tercermin dari AL/NCD dan AL/DPK yang berada jauh di atas *threshold*. CAR perbankan sebesar 23,70% tergolong cukup untuk menjadi bantalan risiko dan mencerminkan ketahanan sektor perbankan di tengah dinamika ekonomi global maupun domestik.

Ke depan, sektor perbankan perlu terus mencermati berbagai risiko utama, khususnya risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas, di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan tingginya ketidakpastian global. Sumber ketidakpastian tersebut meliputi eskalasi konflik geopolitik, termasuk ketidakpastian atas berbagai kebijakan luar negeri AS, arah suku bunga, serta potensi perlambatan ekonomi global. Selain itu, perlu diwaspadai kondisi pasar keuangan domestik yang cenderung melemah serta meningkatnya inflasi imbas dari terganggunya jalur distribusi global sebagai dampak dari konflik AS-Israel-Iran. Dalam hal ini, perbankan perlu memperkuat penerapan prinsip prudensial serta menyiapkan langkah mitigasi terhadap kemungkinan memburuknya kualitas kredit.

OJK terus memperkuat fungsi pengawasan dan mendorong peningkatan ketahanan perbankan. Untuk memastikan kesiapan menghadapi risiko makroekonomi, bank diwajibkan melakukan *stress test* dan asesmen permodalan secara berkala guna mengukur kemampuan dalam menahan potensi penurunan kualitas aset. Sementara itu, kondisi likuiditas juga dipantau secara ketat untuk menjaga stabilitas sistem perbankan di tengah ketidakpastian ekonomi serta dinamika kebijakan global dan domestik yang cepat berubah. Di samping itu, OJK juga terus mengarahkan perbankan agar mengedepankan prinsip *prudential banking*, profesionalisme, inovasi, dan integritas guna mendukung pertumbuhan yang optimal dan berkelanjutan.

Dalam hal penguatan regulasi, pada periode laporan OJK menerbitkan satu POJK dan satu PADK yang secara garis besar mengatur mengenai Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan oleh Bank Umum serta Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. Di samping itu, OJK juga berpartisipasi aktif berkoordinasi dengan Pemerintah dan Otoritas terkait seperti Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan LPS dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.

Selanjutnya, OJK juga secara konsisten memonitor perkembangan ekonomi global beserta implikasinya terhadap kondisi ekonomi dalam negeri dan sektor perbankan Indonesia. Kegiatan ini sejalan dengan pengawasan perbankan secara individual yang dilakukan secara intensif yang diiringi dengan pengawasan konglomerasi yang berkesinambungan untuk memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi semua niat baik kita, termasuk melalui penyampaian laporan ini. Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Jakarta, Agustus 2026



Dian Ediana Rae

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik	viii
Ringkasan Eksekutif	ix
Infografis	xi

Bab 1

Overview dan Analisis Perekonomian Global dan Domestik

1. Perekonomian Global	3
2. Perekonomian Domestik	13

Bab 2

Kinerja Industri Perbankan Nasional

1. Kinerja Bank Umum	33
2. Kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR)	39
3. Kinerja Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)	41

Bab 3

Penyaluran Kredit/Pembiayaan Perbankan

A. Kredit/Pembiayaan Bank Umum (BUK dan BUS)	47
1. Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi	47
2. Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Lokasi Proyek (Spasial)	50
3. Perkembangan Kredit/Pembiayaan UMKM	54
B. Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS	55
1. Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi	55
2. Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS berdasarkan Lokasi (Spasial)	56

Daftar Box

Boks. Kinerja, Tantangan, dan Peluang Daya Saing Industri Pengolahan Indonesia di Tengah Dinamika Global dan Domestik	95
---	----

Bab 4

Profil Risiko Perbankan

1. Risiko Kredit	61
2. Risiko Pasar	72
3. Risiko Likuiditas	76
4. Risiko Hukum	77

Bab 5

Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan

1. Pengaturan Perbankan	81
2. Kelembagaan Perbankan	82

Bab 6

Koordinasi Antar Lembaga terkait Perbankan

1. Koordinasi Multi-Lembaga dalam menjaga Stabilitas Sistem Keuangan	89
2. Koordinasi Bilateral	90
3. Partisipasi OJK dalam Fora Internasional	92

Lampiran

I. Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko	115
II. <i>Glossary</i>	117

Daftar Tabel

Tabel 1 Indikator Umum Bank Umum	33
Tabel 2 Tingkat Konsentrasi Aset Bank Umum	34
Tabel 3 Perkembangan Aset Bank Umum berdasarkan Kelompok Kepemilikan	34
Tabel 4 DPK Bank Umum berdasarkan Kelompok Kepemilikan Bank	35
Tabel 5 Rasio Keuangan Bank Umum	37
Tabel 6 Rasio Permodalan dan Rentabilitas Bank Umum	38
Tabel 7 Komponen ATMR Bank Umum	38
Tabel 8 Rasio Keuangan BPR dan BPRS	39
Tabel 9 Indikator Umum BPR	40
Tabel 10 Indikator Umum BPRS	42
Tabel 11 Konsentrasi dan Pertumbuhan Kredit/Pembiayaan Bank Umum	49
Tabel 12 Porsi Kredit/Pembiayaan berdasarkan Sektor Ekonomi menurut Lokasi Proyek (Spasial)	53
Tabel 13 Kredit/Pembiayaan UMKM berdasarkan Kelompok Bank	55
Tabel 14 Konsentrasi Kredit/Pembiayaan BPR/BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi	56
Tabel 15 Persebaran Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS menurut Lokasi (Spasial)	57
Tabel 16 Perkembangan Kualitas Kredit	63
Tabel 17 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan	64
Tabel 18 Rasio NPL Gross per Jenis Penggunaan	64
Tabel 19 Rasio NPL Gross berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank	65
Tabel 20 NPL Gross Lokasi Berdasarkan Sektor Ekonomi Periode Maret 2026	72
Tabel 21 Porsi Kepemilikan Surat Berharga Perbankan berdasarkan Kategori	75
Tabel 22 Perkembangan LCR Perbankan	77
Tabel 23 Statistik Penanganan Penyimpangan Ketentuan Perbankan	78
Tabel 24 Pemberian Keterangan Ahli/Saksi	78
Tabel 25 Jaringan Kantor BUK	83
Tabel 26 Jaringan Kantor BPR	84
Tabel 27 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah	85
Tabel 28 Jaringan Kantor BPRS	86

Daftar Grafik

Grafik 1 Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara	6
Grafik 2 PMI Manufaktur Beberapa Negara	6
Grafik 3 Inflasi Konsumen	8
Grafik 4 Suku Bunga Acuan	9
Grafik 5 Perkembangan Harga Komoditas	13
Grafik 6 Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Pengeluaran	14
Grafik 7 Pertumbuhan Nilai Ekspor dan Impor	22
Grafik 8 Neraca Perdagangan Indonesia	22
Grafik 9 Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Lapangan Usaha	24
Grafik 10 Penjualan Ritel dan Penjualan Kendaraan Bermotor	26
Grafik 11 PMI Manufaktur dan Indeks Keyakinan Konsumen Indonesia	27
Grafik 12 Tren Inflasi di Indonesia	27
Grafik 13 Perkembangan Aset Bank Umum	34
Grafik 14 Tren Pertumbuhan DPK per Komponen	35
Grafik 15 Pergerakan DPK Berdasarkan Valuta	35
Grafik 16 Kredit per Valuta	36
Grafik 17 Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan	36
Grafik 18 Perkembangan Aset BPR	40
Grafik 19 Perkembangan DPK BPR	40
Grafik 20 Kredit BPR berdasarkan Jenis Penggunaan	41
Grafik 21 Tren ROA dan BOPO BRPS	41
Grafik 22 Tren Aset BPRS	42
Grafik 23 Tren Pertumbuhan DPK BPRS	42
Grafik 24 Tren ROA dan BOPO BPRS	43
Grafik 25 Tren Pertumbuhan Kredit Produktif per Sektor Ekonomi	49
Grafik 26 Persebaran Kredit/Pembiayaan Bank Umum menurut Lokasi Proyek (Spasial)	53
Grafik 27 Penyebaran Kredit/Pembiayaan UMKM	54
Grafik 28 Tren Rasio NPL Gross dan NPL Net	61
Grafik 29 Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit	61
Grafik 30 Pertumbuhan CKPN	62
Grafik 31 Tren Kredit Restrukturisasi	62
Grafik 32 Tren NPL Gross per Sektor Ekonomi	67
Grafik 33 Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi	68
Grafik 34 Tren Rasio NPL Gross berdasarkan Lokasi Proyek (Spasial)	72
Grafik 35 Dolar Index dan VIX Index	73
Grafik 36 PDN dan Pergerakan Nilai Tukar	73
Grafik 37 Spread Yield UST dan SBN	74
Grafik 38 Transaksi Non Residen di Pasar Saham dan SBN Indonesia	74
Grafik 39 Potensi Keuntungan/Kerugian Kepemilikan Surat Berharga Perbankan	75
Grafik 40 Porsi Kepemilikan Surat Berharga Perbankan (FVTPL dan FVTOCI) per Tenor	75
Grafik 41 Perkembangan Parameter IRRBB	75
Grafik 42 LDR berdasarkan Valuta	76
Grafik 43 AL/NCD dan AL/DPK	76
Grafik 44 Perkembangan LCR dan NSFR	77
Grafik 45 Perkembangan Suku Bunga PUAB	77
Grafik 46 Penyebaran Jaringan Kantor BUK	83
Grafik 47 Penyebaran Jaringan Kantor BPR	84
Grafik 48 Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	85
Grafik 49 Jumlah BPRS berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	85
Grafik 50 Penyebaran Jaringan Kantor BUS	86
Grafik 51 Penyebaran Jaringan Kantor BPRS	86

Ringkasan Eksekutif

Secara umum, pada triwulan I-2026, kondisi perekonomian global masih cenderung menguat yang tecermin dari pertumbuhan positif ekonomi beberapa negara besar seperti AS, UK, dan Tiongkok. Namun di sisi lain, laju inflasi AS, Eropa, dan Tiongkok mengalami peningkatan, sedangkan inflasi UK tercatat menurun. Peningkatan laju inflasi di tengah penguatan pertumbuhan ekonomi terjadi sebagai dampak dari risiko geopolitik akibat konflik AS-Israel-Iran yang mencapai puncaknya pada Februari-Maret 2026. Konflik tersebut berakibat pada melonjaknya harga komoditas energi serta gangguan rantai pasok dan persediaan energi khususnya minyak, sehingga berdampak pada meningkatnya inflasi global dan meningkatkan sentimen pada pasar keuangan serta pasar saham global. Ketidakpastian ekonomi global akibat ketegangan geopolitik tersebut turut menjadi faktor risiko yang perlu dicermati ke depan. Dalam merespons kenaikan inflasi tersebut, hingga TW I 2026, The Fed memutuskan mempertahankan suku bunga acuan (FFR) di kisaran 3,50%-3,75%, sejalan dengan keputusan serupa yang diambil ECB, BoE, dan PBoC.

Di tengah dinamika dan ketidakpastian perekonomian global tersebut, pada Triwulan I-2026 ekonomi domestik mampu tumbuh sebesar 5,61% (yoy). Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (4,87%) dan triwulan sebelumnya yaitu 5,39%. Secara global, capaian tersebut juga menempatkan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara negara-negara G20 yang telah merilis data pertumbuhan ekonomi triwulan I-2026. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi didorong oleh Konsumsi Rumah Tangga yang tetap menjadi penyumbang terbesar terhadap PDB Indonesia.

Ekonomi domestik yang tetap kuat juga tecermin pada indikator perbankan di triwulan I-2026 sebagaimana terlihat pada pertumbuhan kredit (bank umum) yang cukup baik yaitu sebesar 9,49% (yoy), meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya (9,16%, yoy). Berdasarkan jenis penggunaan, porsi kredit masih didominasi oleh kredit produktif sebesar 73,52%. Di sisi lain, DPK mampu tumbuh *double digit* yaitu sebesar 13,55% (yoy) meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya 4,75% (yoy). Selain itu, likuiditas perbankan tetap terjaga, ditopang oleh rasio AL/NCD dan AL/DPK yang berada jauh di atas *threshold* masing-masing sebesar 122,55% dan 27,85%. Tingkat permodalan masih cukup solid dengan CAR sebesar 25,09% meski menurun dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan peningkatan ATMR yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan modal. Risiko kredit terpantau membaik dengan rasio NPL *gross* yang menurun menjadi sebesar 2,14% dan NPL net stabil 0,83%. Sejalan dengan kinerja bank umum, kinerja BPR dan BPRS juga cukup baik meski kredit/pembiayaan dan DPK tumbuh moderat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Rasio permodalan cukup solid dengan CAR BPR dan BPRS masing-masing sebesar 28,00% dan 20,45%.

OJK juga senantiasa memperkuat langkah-langkah untuk memitigasi risiko secara berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ke depan dengan melakukan peningkatan kualitas pengawasan yang dibarengi dengan penguatan regulasi. Dalam hal penguatan regulasi, pada periode laporan OJK menerbitkan satu POJK dan satu PADK yang secara garis besar mengatur mengenai Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan oleh Bank Umum serta Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. Di samping itu, OJK juga berpartisipasi aktif berkoordinasi dengan Pemerintah dan Otoritas terkait seperti Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan LPS dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

INFOGRAFIS

Laporan *Surveillance* Perbankan Indonesia

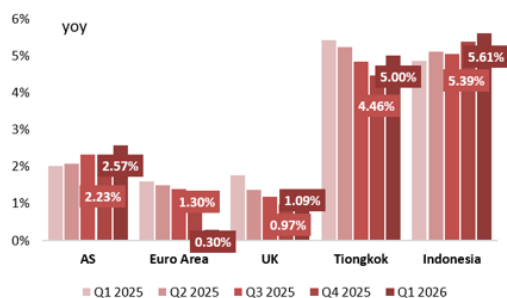
Triwulan I 2026

Ekonomi Global

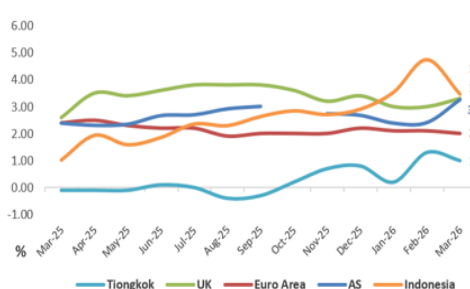


- Pada triwulan I-2026, kondisi perekonomian global cenderung menguat yang tecermin dari pertumbuhan positif ekonomi beberapa negara besar seperti AS, UK, dan Tiongkok. Namun di sisi lain, laju inflasi AS, Eropa, dan Tiongkok mengalami peningkatan, sedangkan inflasi UK tercatat menurun. Peningkatan laju inflasi di tengah penguatan pertumbuhan ekonomi terjadi sebagai dampak dari risiko geopolitik akibat konflik AS-Israel-Iran yang mencapai puncaknya pada Februari-Maret 2026.
- Dalam merespons kenaikan inflasi tersebut, hingga triwulan I-2026, The Fed memutuskan mempertahankan suku bunga acuan (FFR) di kisaran 3,50%-3,75%, sejalan dengan keputusan serupa yang diambil ECB, BoE, dan PBoC.
- Faktor risiko lain yang perlu dicermati kedepannya yaitu meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat ketegangan konflik geopolitik yang berakibat pada melonjaknya harga komoditas energi serta gangguan rantai pasok dan persediaan energi khususnya minyak, sehingga berdampak pada meningkatnya inflasi global dan meningkatkan sentimen pada pasar keuangan serta pasar saham global.

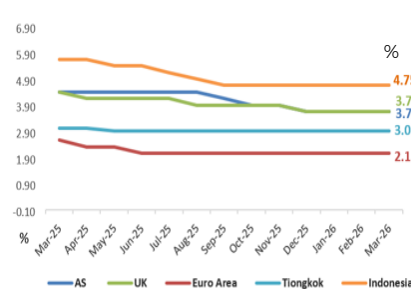
Pertumbuhan Ekonomi



Inflasi Global



Suku Bunga Global

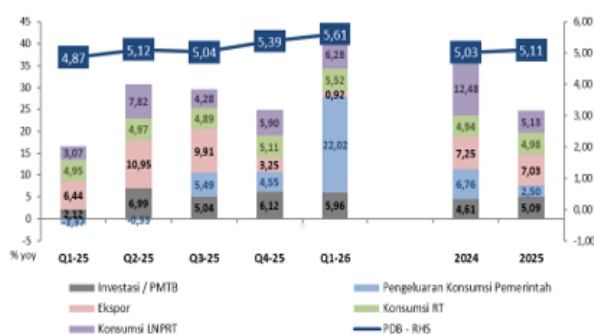


Ekonomi Domestik

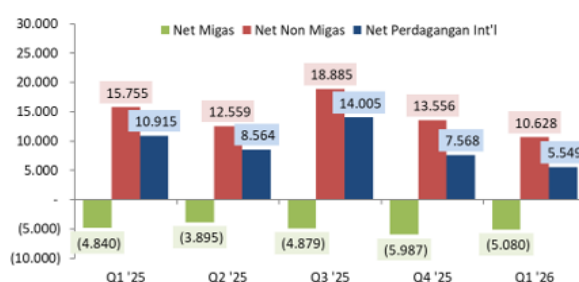
- Ekonomi Indonesia pada triwulan I-2026 relatif terjaga dan mampu tumbuh sebesar 5,61% (yoy). Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (4,87%) dan triwulan sebelumnya yaitu 5,39%. Secara global, capaian tersebut juga menempatkan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara negara-negara G20 yang telah merilis data pertumbuhan ekonomi triwulan I-2026. Pertumbuhan ini utamanya ditopang oleh Konsumsi Rumah Tangga yang tetap menjadi penyumbang terbesar terhadap PDB Indonesia serta Pengeluaran Pemerintah yang mencatatkan pertumbuhan tertinggi seiring percepatan belanja Pemerintah pada berbagai program prioritas.
- Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Maret 2026 konsisten berada di zona optimis sebesar 122,9 meningkat dibandingkan Maret 2025 (121,1). Hal ini mengindikasikan bahwa sentimen masyarakat masih cukup tangguh walau dihadapkan pada beragam sinyal makroekonomi. Kendati demikian, perlu diwaspadai bahwa tren penurunan IKK dalam beberapa bulan terakhir dapat mencerminkan mulai munculnya kekhawatiran masyarakat terhadap potensi tekanan ekonomi ke depan.



PDB Indonesia



Neraca Perdagangan Indonesia



INFOGRAFIS

Laporan *Surveillance* Perbankan Indonesia

Triwulan I 2026

KINERJA



Aset

7,17% (yoy)

9,25% (yoy)

Rp13.904 T



DPK

4,75% (yoy)

13,55% (yoy)

Rp10.230 T



Kredit

9,16% (yoy)

9,49% (yoy)

Rp8.659 T



CAR

25,38%

25,09%



ROA

2,53%

2,47%

TW I-25

TW I-26



Bank Umum



Bank Umum Konvensional



Bank Umum Syariah

7,10% (yoy)

8,49% (yoy)

Rp13.096 T

4,78% (yoy)

12,75% (yoy)

Rp9.597 T

9,03% (yoy)

8,58% (yoy)

Rp8.128 T

25,39%

25,07%

2,61%

2,50%

8,40% (yoy)

23,40% (yoy)

Rp807 T

4,24% (yoy)

27,27% (yoy)

Rp633 T

11,53% (yoy)

25,73% (yoy)

Rp530 T

25,08%

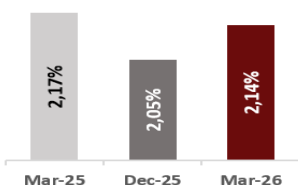
25,35%

2,07%

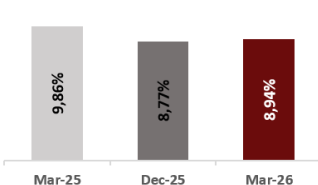
2,07%

Risiko Kredit

NPL Gross

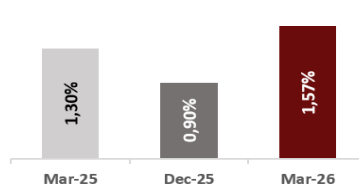


LaR



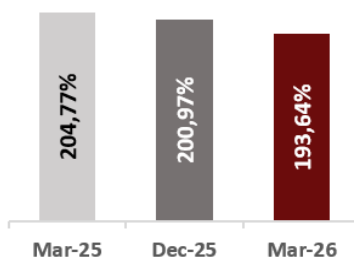
Risiko Pasar

PDN

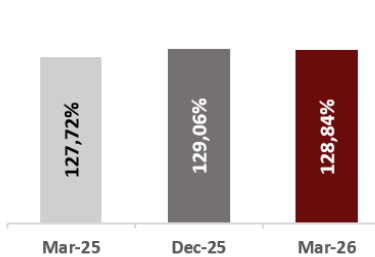


Risiko Likuiditas

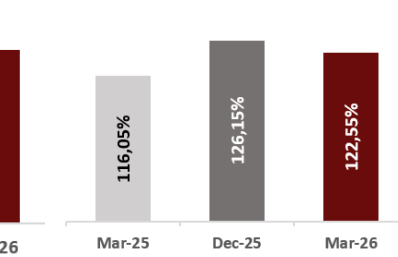
LCR



NSFR



AL/NCD



**PROFIL
RISIKO
BANK
UMUM**

INFOGRAFIS

Laporan *Surveillance* Perbankan Indonesia

Triwulan I 2026

KINERJA						
	Aset	DPK	Kredit	CAR	ROA	
 Bank Perekonomian Rakyat (BPR)	5,00% (yoy)	4,45% (yoy)	5,87% (yoy)	31,49%	1,40%	TW I-25
	3,45% (yoy) Rp210 T	2,60% (yoy) Rp147 T	3,47% (yoy) Rp158 T	28,00%	1,83%	TW I-26
 Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)	8,06% (yoy)	10,01% (yoy)	9,82% (yoy)	24,47%	1,86%	
	5,70% (yoy) Rp26 T	7,98% (yoy) Rp18 T	6,34% (yoy) Rp20 T	20,45%	0,12%	

KETENTUAN PERBANKAN PADA TRIWULAN I 2026

KETENTUAN	PERIHAL	TANGGAL DIUNDANGKAN/ PENETAPAN	OBJEK PENGATURAN
POJK Nomor 1 Tahun 2026	Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan oleh Bank Umum	23 Februari 2026	Bank Umum
PADK Nomor 1 Tahun 2026	Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum	23 Januari 2025	Bank Umum

1 Overview dan Analisis Perekonomian Global dan Domestik

Halaman ini sengaja dikosongkan

1 Overview dan Analisis Perekonomian Global dan Domestik

Pada triwulan I-2026, kondisi ekonomi global beragam cenderung menguat yang tecermin dari pertumbuhan positif ekonomi beberapa negara besar seperti AS, UK, dan Tiongkok. Hal ini terjadi di tengah sentimen pasar keuangan dan pasar saham global yang dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain risiko geopolitik akibat konflik AS-Israel-Iran yang mencapai puncaknya pada Februari-Maret 2026 dan berdampak pada melonjaknya harga komoditas energi dan membuat inflasi global kembali meningkat. Dari sisi domestik, pertumbuhan fundamental ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61% (yoy). Pertumbuhan ini utamanya ditopang oleh Konsumsi Rumah Tangga yang tetap menjadi penyumbang terbesar terhadap PDB Indonesia serta Pengeluaran Pemerintah yang mencatatkan pertumbuhan tertinggi seiring percepatan belanja Pemerintah pada berbagai program prioritas.

1. Perekonomian Global

Pada triwulan I-2026, kondisi pasar keuangan dan perekonomian global cenderung beragam. Sentimen pasar keuangan dan pasar saham global dipengaruhi utamanya oleh risiko geopolitik akibat konflik antara AS-Israel-Iran yang berdampak pada melonjaknya harga komoditas energi khususnya harga minyak mentah Brent yang melonjak hingga 90%. Hal tersebut berpotensi membuat inflasi global kembali meningkat. Namun demikian, PDB AS masih tumbuh positif di tengah melemahnya konsumsi rumah tangga dan ancaman meningkatnya inflasi.

Ketegangan antara AS dan Iran yang meningkat sejak akhir Februari 2026 terus mengalami eskalasi sepanjang Maret 2026 di tengah berbagai upaya diplomatik yang berakhir tanpa kesepakatan. Aksi saling serang kedua negara meningkatkan ketegangan di kawasan Timur Tengah dan menimbulkan gangguan keamanan jalur

pelayaran di Selat Hormuz. Kondisi ini telah meningkatkan risiko terhadap pasokan global yang berdampak pada kenaikan harga energi, meningkatkan volatilitas pasar keuangan global, serta meningkatkan ketidakpastian geopolitik.

Sementara itu, konflik Rusia-Ukraina masih berlanjut sepanjang kuartal I 2026 dengan intensitas serangan yang tetap tinggi. Rusia terus melancarkan serangan rudal dan drone ke infrastruktur energi serta kota-kota besar Ukraina, sementara Ukraina meningkatkan serangan drone ke fasilitas energi dan militer di wilayah Rusia. Meskipun berbagai upaya diplomatik yang dimediasi oleh AS telah dilakukan, namun belum tercapai kesepakatan gencatan senjata maupun penyelesaian konflik, sehingga hingga akhir Maret 2026 perang masih berlanjut tanpa terobosan diplomatik yang signifikan. Sementara itu, sepanjang Maret 2026, konflik Israel-Palestina masih berlangsung dengan

intensitas tinggi, ditandai oleh berlanjutnya operasi militer Israel di Jalur Gaza. Kondisi kemanusiaan semakin memburuk akibat terbatasnya akses bantuan, kerusakan infrastruktur, serta tingginya jumlah pengungsi dan korban sipil. Di sisi lain, upaya mediasi internasional belum menghasilkan kesepakatan gencatan senjata yang permanen.

Pada periode laporan, pertumbuhan ekonomi global beragam cenderung menguat. Beberapa negara *Advance Economy* seperti AS, UK, dan Tiongkok tumbuh positif, kecuali Eropa melambat. Perekonomian AS tercatat menguat dibanding triwulan IV-2025 baik secara tahunan maupun kuartalan. Bureau of Economic Analysis (BEA) merilis data yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi AS pada triwulan I-2026 sebesar 2,57% (yoy) tumbuh positif dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 2,23% (yoy). Secara kuartalan, pertumbuhan ekonomi AS juga meningkat menjadi 1,6% (qtq) dari sebelumnya 0,5% (qtq) pada triwulan IV-2025. Kendati demikian, angka ini di bawah perkiraan pasar sebesar 2,3%. Peningkatan belanja pemerintah pada triwulan I-2026 setelah berakhirnya penutupan pemerintahan (*government shutdown*) pada triwulan IV-2025 serta menguatnya investasi di sektor teknologi merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi AS. Belanja pemerintah meningkat 4,4% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -5,6% (qtq). Selain itu, peningkatan investasi tetap (6,2% Q1'26 vs 1,5% Q4'25), ekspor barang jasa (12,9% Q1'26 vs -3,2% Q4'25), dan impor barang dan jasa (21,4% Q1'26 vs -1,0% Q4'25) menjadi penggerak

pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2026. Pertumbuhan ekonomi AS pada triwulan I-2026 turut ditopang oleh investasi pada teknologi dan *Artificial Inetelegence* (AI). Investasi pada perangkat lunak dan komputasi tercatat tumbuh sebesar 24% (yoy), di tengah masih terkontraksinya sebagian besar sektor lainnya. Sementara itu, Pengeluaran pemerintah AS pada Kuartal I 2026 melonjak signifikan hingga memicu defisit anggaran sebesar USD 1,9 triliun akibat tingginya biaya operasional militer. Lonjakan ini berkaitan langsung dengan "pemborosan" dana darurat puluhan miliar dolar untuk membiayai sistem pertahanan Israel dan memasok amunisi presisi untuk menyerang Iran.

Di samping meningkatnya pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi AS turut diperkuat oleh perbaikan beberapa indikator ekonomi AS yang mencerminkan masih solidnya aktivitas ekonomi domestik. Pada Maret 2026, Indeks PMI Manufaktur AS tercatat berada di zona ekspansi (>50) sebesar 52,7 atau menguat dari triwulan IV-2025 sebesar 47,9 dan lebih tinggi dari posisi yang sama tahun sebelumnya sebesar 49,0. Angka ini melampaui ekspektasi pasar sebesar 52,5 dan menunjukkan aktivitas pabrik terkuat sejak Agustus 2022. Penguatan ini dipimpin oleh peningkatan produksi (55,1 Mar'26 vs 51 Des'25), pesanan baru (53,5 Mar'26 vs 47,7 Des'25), dan lapangan kerja (48,7 Mar'26 vs 44,9 Des'25). Namun demikian, indeks pengiriman pasokan naik ke level tertinggi sejak Mei 2022 yaitu sebesar 58,9 atau meningkat tajam dari Desember 2025 sebesar 50,8. Kenaikan indeks tersebut mencerminkan semakin lambatnya waktu

pengiriman pemasok akibat terganggunya rantai pasok, utamanya diakibatkan oleh penutupan Selat Hormuz. Sementara itu, aktivitas konsumsi AS juga mengalami peningkatan yang tecermin dari peningkatan *Retail Sales* triwulan I-2026 menjadi 4,15% (yoy) dari triwulan sebelumnya sebesar 2,43% (yoy). Namun demikian, pada periode laporan, aktivitas produksi AS mengalami penurunan menjadi 0,76% (yoy) dari triwulan sebelumnya sebesar 1,19% (yoy). Perlambatan ini utamanya dipengaruhi oleh pelemahan output sektor manufaktur, pertambangan, dan utilitas. Pada Maret 2026, output utilitas turun 2,3% (mom), output pertambangan turun 1,2% (mom), dan output manufaktur turun 0,1% (mom). Di sektor manufaktur, penurunan produksi kendaraan bermotor dan suku cadang sebesar 3,7% (mom) menjadi faktor utama yang menekan kinerja industri. Selain itu, berkurangnya permintaan energi akibat kondisi cuaca yang lebih hangat turut menyebabkan penurunan output utilitas. Tingkat pengangguran AS sedikit menurun menjadi 4,3% (yoy) pada triwulan I-2026, dari 4,4% pada triwulan sebelumnya. Angka ini sebagian besar disebabkan oleh berkurangnya 396.000 orang dalam angkatan kerja. Proporsi warga AS usia kerja dalam angkatan kerja turun menjadi 61,9%, terendah sejak November 2021. Di sisi lain, Data Biro Statistik Tenaga Kerja AS menunjukkan bahwa pada Maret 2026 jumlah pekerja di luar sektor pertanian meningkat 178.000, jauh di atas perkiraan Dow Jones sebesar 55.000.

Berbeda dengan AS, pertumbuhan ekonomi Zona Eropa pada triwulan I-2026 mengalami perlambatan menjadi sebesar

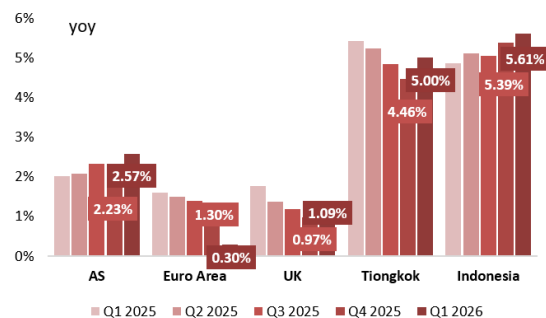
0,30% (yoy) dibanding triwulan sebelumnya sebesar 1,30% dan di bawah ekspektasi pasar sebesar 0,8% (yoy). Angka ini, di bawah ekspektasi pasar sebesar 0,8% dan menandai pertumbuhan terlemah sejak triwulan IV-2023. Pelemahan ini mencerminkan tekanan akan gangguan pasokan energi dan inflasi yang tinggi akibat konflik Timur Tengah. Perlambatan ini utamanya didorong oleh penurunan tajam pembentukan modal tetap bruto (0,3% Mar'26 vs 3,3% Des'25), ekspor (-0,9% Mar'26 vs 2,1% Des'25), konsumsi rumah tangga (1,1% Mar'26 vs 1,3% Des'25). Sementara itu, pengeluaran pemerintah meningkat (2,3% Mar'26 vs 1,5% Des'25). Di tingkat negara, Irlandia mengalami kontraksi tajam (-16,8% Mar'26 vs 2,9% Des'25), Jerman (0,3% Mar'25 vs 0,4% Des'25), Prancis (0,9% Mar'26 vs 1,1% Des'25), dan Italia (0,8% Mar'26 vs 0,9% Des'25). Sedangkan pertumbuhan ekonomi Spanyol membaik (2,7% Mar'26 vs 2,6% Des'25). Hambatan terbesar terhadap pertumbuhan berasal dari perdagangan neto, yang memangkas output ekonomi sebesar 30bps, sementara investasi yang lebih lemah mengurangi pertumbuhan lebih lanjut sebesar 10bps.

Sementara itu, ekonomi UK tumbuh sebesar 1,09% (yoy) dari 0,97% (yoy) pada triwulan IV-2025, di atas ekspektasi pasar sebesar 0,8% (yoy). Pertumbuhan ini ditopang oleh peningkatan output jasa sebesar 1,4% (yoy) sementara produksi tetap stagnan dan konstruksi menurun sebesar 1,3% (yoy). Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh (0,9% Mar'26 vs 0,5% Des'25) dan pengeluaran pemerintah meningkat (1,4% Mar'26 vs 1,0% Des'26). Namun, pembentukan modal

tetap bruto melambat (0,5% Mar'26 vs 4,0% Des'25), sebagian karena penurunan investasi bisnis. Perdagangan bersih membebani pertumbuhan karena impor melebihi ekspor.

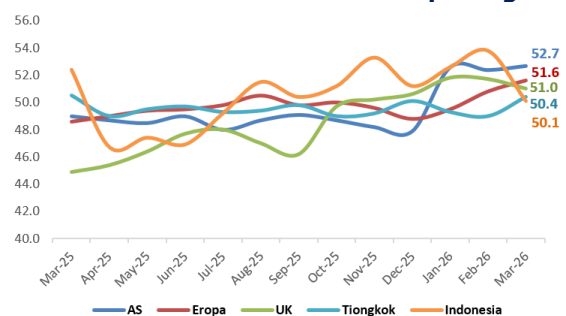
Sejalan dengan AS dan UK, ekonomi Tiongkok tumbuh sebesar 5,0% (yoy) naik dari 4,5% (yoy) pada triwulan IV-2025 menandai pertumbuhan tercepat dalam tiga triwulan. Penguatan utamanya didorong oleh kenaikan output industri (6,1% Mar'26 vs 5,2 Des'25), Manufaktur berteknologi tinggi (12,5% Mar'26 vs 11,8% Des'25), dan manufaktur peralatan (8,9% Mar'26 vs 4,3% Des'25). Selain itu, kinerja ekspor yang tangguh turut mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi meskipun Tiongkok bersiap menghadapi dampak konflik perang AS-Iran. Keberhasilan Beijing menyerap gangguan tersebut juga tidak lepas dari melimpahnya cadangan minyak, bauran energi yang terdiversifikasi, dan peran negara dalam menahan volatilitas harga. Namun demikian, para ekonom memperkirakan momentum pertumbuhan ekonomi Tiongkok akan melemah hingga akhir tahun 2026 yang disebabkan oleh meningkatnya hambatan eksternal, terutama jika konflik Timur Tengah terus berkepanjangan.

Grafik 1 Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara



Sumber: *Trading Economics* dan *Reuters*

Grafik 2 PMI Manufaktur Beberapa Negara



Sumber: *Reuters*

Di tengah pertumbuhan ekonomi global yang beragam dengan kecenderungan menguat, perkembangan laju inflasi global juga menunjukkan pola yang serupa. Laju inflasi AS, Eropa, dan Tiongkok mengalami peningkatan sedangkan UK tercatat menurun. Pada Maret 2026, tingkat inflasi tahunan AS meningkat menjadi 3,26% dari 2,68% pada Desember 2025. Angka ini menandai level tertinggi sejak Mei 2024 dan sesuai perkiraan pasar. Peningkatan didorong oleh biaya energi yang lebih tinggi (12,5% Mar'26 vs 2,3% Des'25), sebagian besar bensin (18,9% Mar'26 vs -3,4% Des'25) dan minyak bakar (44,2% Mar'26 vs 7,4% Des'25), karena perang dengan Iran. Di sisi lain, harga makanan mengalami penurunan (2,7% Mar'26 vs 3,1% Des'25), harga mobil dan truk bekas juga menurun (-3,2% Mar'26 vs 1,6% Des'25). Sementara inflasi inti juga

meningkat meskipun jauh lebih moderat menjadi 2,6%, di bawah perkiraan 2,7%.

Sejalan dengan AS, inflasi Eropa juga meningkat menjadi 2,60% (yoy) naik dari posisi Desember yaitu 2,00% (yoy), yang menandai level tertinggi sejak Juli 2024 dan di atas perkiraan pasar sebesar 2,50%. Peningkatan laju inflasi ini didorong oleh kenaikan harga energi sebesar 5,1% dari -1,9% pada Desember 2025. Angka ini mencatatkan kenaikan tertinggi sejak Februari 2023, diatas prakiraan pasar sebesar 4,9%. Kenaikan harga juga terjadi pada barang industri non-energi (0,5% Mar'26 vs 0,3% Des'25). Di sisi lain, perlambatan terjadi pada harga jasa (3,3% Mar'26 vs 3,4% Des'25) dan harga makanan, alkohol, dan tembakau (2,4% Mar'26 vs 2,5% Des'25). Beberapa negara di zona eropa juga mengalami peningkatan laju inflasi antara lain Jerman (2,8% Mar'26 vs 2,0% Des'25), Prancis (2,0% Mar'26 vs 0,7% Des'25), Italia (1,6% Mar'26 vs 1,2% Des'25), Spanyol (3,4 Mar'26 vs 3,0% Des'25), dan Norwegia (3,6% Mar'26 vs 3,0% Des'25). Kenaikan laju inflasi ini menegaskan bahwa tekanan harga di perekonomian Eropa cukup meningkat. Peningkatan ini terjadi di tengah beragamnya indikator ekonomi. PMI manufaktur Eropa tercatat meningkat dan berada di zona ekspansi (>50) diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran. Sebaliknya, aktivitas produksi mengalami perlambatan. Penjualan ritel tercatat menurun sepanjang kuartal pertama 2026, terutama dipengaruhi oleh penurunan penjualan bahan bakar sebesar -1.6% (mtm), yang menjadi penurunan terdalam sejak Agustus 2023. Kondisi ini sejalan dengan kenaikan harga bahan bakar yang

dipicu oleh konflik di Timur Tengah, sehingga menekan permintaan masyarakat.

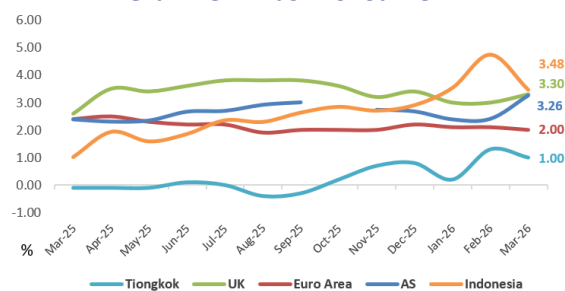
Sementara itu, inflasi UK tercatat menurun 3,30% (yoy) dibandingkan triwulan IV-2025 sebesar 3,40% (yoy). Seiring meredanya tekanan inflasi, berbagai indikator ekonomi UK menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pada Maret 2026, aktivitas manufaktur meningkat tipis ke level 51,0 dari 50,6 pada triwulan sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sektor manufaktur masih berada dalam zona ekspansi meskipun laju pertumbuhannya relatif terbatas. Aktivitas produksi UK juga meningkat 1,2% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya pada bulan Desember sebesar 0,3% (yoy). Hal ini didorong oleh produksi manufaktur yang melonjak tajam pada awal tahun dan pemulihan kemerosotan pasokan otomotif pada akhir 2025. Kenaikan sebesar 10,9% pada produksi kendaraan bermotor dan trailer secara signifikan mendorong pertumbuhan peralatan transportasi melalui pemulihan dari gangguan rantai pasokan pada akhir tahun lalu. Total produksi manufaktur Inggris tumbuh sebesar 0,8% pada triwulan I tahun 2026 dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2025. *Retail sales* tercatat meningkat 1,67% (yoy) yang didorong oleh *panic buying* khususnya kenaikan harga bahan bakar akibat konflik di Timur Tengah. Selain itu, cuaca yang semakin baik dan cerah di bulan Maret mendorong masyarakat UK berbelanja sektor non-makanan. Penjualan melalui *e-commerce* naik 1,4% (mtm) menjadikan pangsa pasar *online* naik ke angka 28,7% (tertinggi dalam hampir lima tahun terakhir). Fenomena tersebut memberi stimulus positif

sementara bagi PDB UK. Di sisi lain, tingkat pengangguran sedikit menurun menjadi 5,0% dari 5,2% pada triwulan sebelumnya.

Pada bulan laporan, laju inflasi Tiongkok tercatat meningkat sebesar 1,0% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya sebesar 0,8% (yoy), di bawah ekspektasi pasar sebesar 1,2%. Peningkatan ini utamanya didorong oleh harga makanan naik dengan laju yang jauh lebih lambat (0,3% vs 1,7% pada Februari), di tengah perlambatan kenaikan yang tajam pada sayuran segar dan buah, bersamaan dengan penurunan yang lebih dalam pada harga daging babi. Sementara itu, inflasi non-makanan hampir tidak berubah (1,2% vs 1,3%), dengan harga terus naik untuk pakaian (1,6% vs 1,9%), perawatan kesehatan (1,9% vs 1,9%), dan pendidikan (1,1% vs 2,0%). Biaya transportasi *rebound* (0,9% vs -0,7%), sementara penurunan biaya perumahan tetap terjadi (-0,2% vs -0,2%). Sejalan dengan peningkatan laju inflasi, aktivitas manufaktur Tiongkok juga mengalami kenaikan tecermin dari indeks PMI Manufaktur Tiongkok sebesar 50,4, meningkat dibandingkan triwulan IV-2025 sebesar 50,1. Selaras dengan kenaikan PMI Manufaktur, aktivitas produksi dan aktivitas konsumsi Tiongkok turut menguat. Pada bulan laporan, *Industrial Production* Tiongkok tercatat sebesar 5,70% (yoy) atau meningkat dibandingkan triwulan IV-2025 sebesar 5,2% (yoy). Kenaikan juga terjadi pada *Retail Sales* Tiongkok menjadi sebesar 1,70% (yoy) dari sebelumnya 0,90% pada triwulan IV-2025. Namun demikian, di tengah membaiknya indikator ekonomi Tiongkok, pasar tenaga kerja Tiongkok mengalami pelemahan. Tingkat

pengangguran Tiongkok meningkat menjadi 5,4% (yoy) dari triwulan sebelumnya sebesar 5,1% (yoy). Pada bulan Maret 2026, pemerintah Tiongkok menetapkan target untuk menciptakan 12 juta lapangan kerja perkotaan baru dengan menjaga tingkat pengangguran di kisaran 5,5%. Langkah-langkah strategis yang dilakukan antara lain mendorong kewirausahaan, mengadopsi kolaborasi manusia-mesin, dan menggunakan teknologi *Artificial Intelligence* (AI), memperluas serapan tenaga kerja pada sektor-sektor berbasis jasa, program pinjaman khusus guna membantu kelangsungan usaha kecil dan menengah, dan menstabilkan industri padat karya.

Grafik 3 Inflasi Konsumen

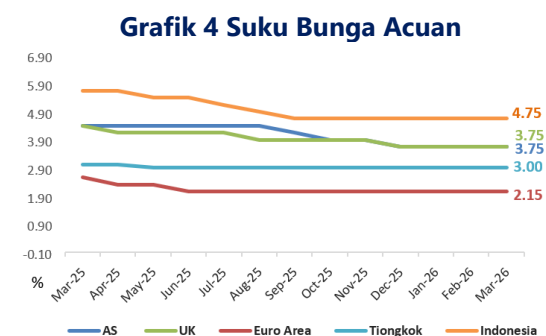


Sumber: Reuters

Pada posisi Maret 2026, tekanan di pasar global relatif bergejolak. Sentimen investor cenderung berhati-hati namun belum *risk-off* yang dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain ketidakpastian arah kebijakan The Fed meski ketahanan ekonomi AS di bulan Maret masih cukup kuat. Pada The Federal Open Market Committee (FOMC) pada 17-18 Maret 2026, The Fed memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan Fed Funds Rate (FFR) di kisaran 3,50%-3,75%. Kebijakan "*higher for longer*" ini diambil karena inflasi masih berada di atas target 2% dan

ketidakpastian ekonomi global tetap tinggi. Meskipun ekonomi AS tumbuh cukup solid dengan tingkat pengangguran relatif stabil dalam beberapa bulan terakhir. Dalam proses pemungutan suara untuk mempertahankan suku bunga acuan, disetujui dengan 11 suara berbanding 1 suara. Sebanyak 11 suara memilih untuk mempertahankan suku bunga dengan 1 suara mengusulkan untuk menurunkan suku bunga acuan sebesar 25bps. Stephen Miran merupakan suara yang mengusulkan penurunan suku bunga acuan, menjabat sebagai anggota Dewan Gubernur The Fed. The Fed menilai inflasi masih "*somewhat elevated*" (masih relatif tinggi) dibanding target jangka panjang sebesar 2%. Dalam proyeksi Maret 2026, FOMC bahkan merevisi naik perkiraan inflasi inti (*Core PCE*) tahun 2026 menjadi sekitar 2,7%, menunjukkan proses disinflasi berjalan lebih lambat dari yang diharapkan. Konflik AS-Irak yang memanasi sejak akhir Februari 2026 mengganggu pasokan minyak global akibat penutupan Selat Hormuz. Harga minyak mentah melonjak (minyak Brent sempat melesat hingga melewati US\$100 per barel). Bagi AS, hal ini memicu inflasi dari sisi biaya produksi (*cost-push inflation*), sehingga Indeks Harga Konsumen (CPI) AS pada Maret 2026 naik ke kisaran 3,3%. Selain itu, terdapat perlambatan di pasar tenaga kerja dengan tingkat perekrutan dan PHK yang rendah, serta tingkat pengangguran yang berada di level moderat sekitar 4,4%. Kondisi ini memberikan ruang bagi The Fed untuk mengambil pendekatan *data-dependent* (bergantung pada data) dan menunggu stabilitas lebih lanjut sebelum melakukan pelonggaran moneter. Suku bunga hipotek

AS pada bulan Maret mengalami kenaikan. Hipotek tetap 30 tahun naik menjadi 6,30%. Ini menandai level tertinggi sejak akhir Desember dan memberikan tekanan pada aktivitas hipotek. Total aplikasi hipotek merosot 10,9%, membalikkan kenaikan 3,2% dari periode sebelumnya, dengan aktivitas *refinancing* turun tajam sebesar 18,5%. Sementara itu, aplikasi untuk pembelian rumah sedikit meningkat sebesar 0,9%.



Sumber: Reuters

Sejalan dengan The Fed, pada pertemuan 19 Maret 2026, ECB kembali mempertahankan suku bunga pinjaman dengan *Deposit Facility* tetap sebesar 2%, *Main refinancing operations rate* juga tetap sebesar 2,15%, dan *Marginal lending facility rate* sebesar 2,40%. Keputusan ini diambil setelah pejabat ECB menilai bahwa perang Timur Tengah telah meningkatkan ketidakpastian prospek yang berdampak pada meningkatnya risiko kenaikan terhadap inflasi dan risiko penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi. ECB menilai konflik geopolitik akan berdampak pada inflasi jangka pendek melalui kenaikan harga energi. Mengingat sikap kebijakan saat ini secara umum netral dan rapat kebijakan moneter berikutnya hanya enam minggu lagi, pendekatan "rapat demi rapat" yang telah mapan tetap memberikan

fleksibilitas yang cukup bagi Dewan Pengurus untuk bertindak dengan cepat jika diperlukan. Hal ini juga sejalan dengan pendekatan yang bergantung pada data (*data dependent*), karena akan memberikan lebih banyak waktu bagi Dewan Pengurus untuk memantau perkembangan perang, memahami besarnya dan lamanya guncangan tersebut, serta memantau skala potensi efek lanjutan sebelum mengambil tindakan. Konflik di Timur Tengah menyebabkan lonjakan harga energi, khususnya minyak dan gas yang ditengarai dapat mendorong inflasi berada di atas target 2% dalam jangka pendek. Selain itu, kenaikan harga energi menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa serta mengurangi daya beli rumah tangga. Di sisi lain, tingkat pengangguran yang rendah, neraca keuangan sektor swasta yang kokoh, serta belanja publik untuk pertahanan dan infrastruktur diperkirakan akan terus menopang pertumbuhan. IMF mengubah pandangan setelah harga energi meningkat akibat konflik Timur Tengah. IMF memproyeksikan bahwa ECB menaikkan suku bunga sekitar 50bps selama 2026, kemudian menurunkannya kembali pada 2027 ketika tekanan inflasi mereda.

Monetary Policy Committee (MPC) BoE juga memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya tetap di level 3,75%, dengan suara bulat yang menunjukkan sikap lebih solid di tengah munculnya risiko ekonomi baru. Sikap BoE yang berhati-hati sejalan dengan kewaspadaan terhadap inflasi sesuai target 2%. Sikap ini berlawanan dengan ekspektasi pasar yang memperkirakan beberapa kali kenaikan suku bunga. MPC menegaskan bahwa

kebijakan moneter tidak dapat secara langsung mengendalikan biaya energi global, tetapi harus merespons risiko bahwa guncangan eksternal ini dapat memicu inflasi domestik yang lebih persisten. Inflasi diperkirakan akan naik lagi sekitar 3,4% di paruh kedua tahun 2026. Pasar memperkirakan BoE akan tetap hati-hati (tidak buru-buru menaikkan suku bunga). Keputusan mempertahankan suku bunga pada Maret mencerminkan fokus bank sentral untuk memastikan penurunan inflasi berlangsung secara berkelanjutan, tanpa terburu-buru melonggarkan kebijakan. Meskipun proses pelonggaran telah dimulai, bank sentral masih belum cukup yakin untuk mempercepat langkah tersebut.

Selaras dengan bank sentral lainnya, PBoC turut mempertahankan suku bunga pinjaman utama (LPR) satu tahun tetap sebesar 3,0% dan LPR lima tahun sebesar 3,5%, sesuai dengan ekspektasi pasar dan menandakan preferensi untuk stabilitas daripada stimulus negatif. Ini merupakan bulan kesepuluh berturut-turut LPR tidak berubah. Stabilitas suku bunga ini berpotensi memberikan kepastian biaya pendanaan bagi dunia usaha dan rumah tangga, meski belum menambah dorongan stimulus baru melalui penurunan suku bunga. Sejumlah analis melihat ruang penurunan suku bunga acuan pada kuartal pertama relatif terbatas. Namun, sebelumnya bank sentral memberi sinyal masih terdapat ruang untuk menurunkan GWM (*reserve requirement ratio/RRR*) perbankan serta memangkas suku bunga kebijakan secara lebih luas. Kredit baru di perbankan Tiongkok tumbuh melambat

dari perkiraan. Saldo pinjaman Yuan tumbuh 5,7% pada Maret dibandingkan tahun sebelumnya, lebih lambat dari pertumbuhan 6,0% pada Februari serta lebih rendah dari prakiraan para analis sebesar 5,9%. Melemahnya permintaan kredit baru seiring dengan melemahnya prospek peminjam terkait pendapatan dan pertumbuhan di masa depan. Berdasarkan jajak pendapat Reuters, Tiongkok berhasil mendapatkan momentum pada kuartal pertama 2026 berkat ekspor yang solid, namun diperkirakan melambat disebabkan konflik AS-Iran yang dapat memberikan tekanan pada laba perusahaan dan mengikis permintaan dari luar negeri. Hasil jajak pendapat selanjutnya memperkirakan bahwa PBoC akan mempertahankan LPR satu tahun tanpa perubahan hingga akhir 2026 dan sementara akan menurunkan rasio cadangan wajib rata-rata tertimbang (*weighted-average reserve requirement ratio*) bank-bank sebesar 20bps pada kuartal ketiga tahun ini. Laba perbankan Tiongkok pada kuartal I 2026 berkontraksi dibandingkan kuartal I 2025, meski bank-bank besar (33 *listed* bank) masih menghasilkan laba bersih sebesar 2,8% (yoy) didukung oleh penurunan biaya pendanaan, stabilisasi margin bunga, dan pertumbuhan kredit pada sektor-sektor prioritas. Profitabilitas perbankan masih menghadapi tantangan dari sisi lemahnya sektor properti, rendahnya permintaan kredit, serta tekanan terhadap margin bunga. Di sisi lain, salah satu indikator konsumsi yaitu penjualan ritel tumbuh 1,7% (yoy), meski melambat dari periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 5,9% dan periode Januari-Februari 2026 yang tumbuh 2,8%. Sektor

properti Tiongkok masih menjadi tantangan struktural terbesar bagi perekonomian Tiongkok pada Maret 2026. Investasi properti tercatat turun 11,2% (yoy) pada akhir kuartal I 2026, meskipun indikator lain seperti infrastruktur dan manufaktur tetap tumbuh. Di kota-kota Tier-1 (Shanghai, Guangzhou, Shenzhen) harga rumah baru maupun bekas meningkat secara mtm. Berbeda dengan kota-kota di Tier-2 dan Tier-3 (kota kecil dan menengah) masih mengalami penurunan harga rumah secara mtm akibat *oversupply* (kelebihan pasokan rumah). Dampak dari konflik di Timur Tengah juga menyasar aktivitas ekspor Tiongkok yang tumbuh namun melambat signifikan yaitu 2,5% (yoy) pada Maret jauh di bawah proyeksi 8,3% (yoy) dan merupakan laju paling lambat dalam kurun waktu 6 bulan. Di sisi lain, impor Tiongkok melonjak tinggi 27,8% (yoy) dan tercatat sebagai pertumbuhan impor tercepat sejak November 2021. Namun, Tiongkok masih mencatatkan surplus perdagangan meski menyempit dan mencatatkan PDB 5% pada kuartal I 2026. Sementara itu, tingkat pengangguran berada di level 5,4% dan merupakan tertinggi dalam 13 bulan di tengah meningkatnya aktivitas produksi. PMI Manufaktur Tiongkok memasuki zona ekspansi 50,4 setelah sebelumnya berada di zona kontraksi. Indeks produksi dan pesanan baru keduanya meningkat yang menandakan permintaan mulai membaik.

Pada triwulan I-2026, harga komoditas global secara umum meningkat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jumlah permintaan dan pasokan, fluktuasi harga komoditas, tensi geopolitik,

kebijakan transisi energi, serta perubahan iklim. Indeks harga komoditas Bloomberg (BCOM) tercatat sebesar 717,61, meningkat dari 584,80 pada triwulan sebelumnya dan tumbuh positif dibandingkan triwulan I-2025 sebesar 522,80.

Harga minyak mentah Brent mencatatkan kenaikan terbesar sepanjang sejarah pada triwulan I-2026. Harga penutupan pada 31 Maret 2026 berada pada level 118,34 USD/barel jauh meningkat dibandingkan harga pada triwulan sebelumnya sebesar 60,85 USD/barel dan periode yang sama tahun sebelumnya pada level 74,78 USD/barel. Peningkatan harga minyak Brent dipicu oleh gangguan pasokan minyak global setelah ditutupnya Selat Hormuz akibat meningkatnya konflik AS-Iran. Penutupan dan gangguan lalu lintas di Selat Hormuz juga berdampak pada 20% perdagangan minyak dunia. Di sisi lain, pasokan minyak global menurun menjadi 97 juta barel per hari atau berkurang sekitar 10,1 juta barel per hari, akibat serangan berkelanjutan terhadap infrastruktur energi di Timur Tengah. Pembatasan kapal tanker melalui Selat Hormuz turut menekan ketersediaan minyak dunia. Sementara itu, produksi OPEC+ turun 9,4 juta barel per hari menjadi 42,4 juta barel per hari di tengah menurunnya pasokan non-OPEC+ sebesar 770 ribu barel per hari menjadi 54,7 juta barel per hari. Hal ini disebabkan oleh penurunan produksi Qatar yang mengimbangi peningkatan di Brasil dan AS. Persediaan minyak global juga turun sebesar 85 juta barel pada Maret 2026, di tengah berkurangnya secara signifikan pasokan di luar Teluk Timur Tengah sebesar 205 juta barel atau menurun 6,6

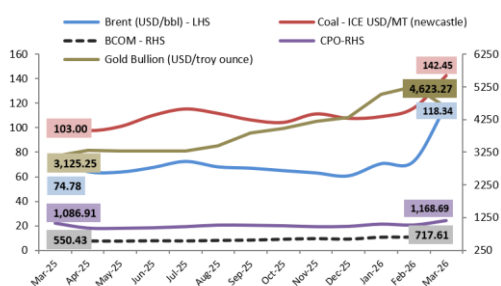
juta barel per hari. Pada saat yang sama, dengan terbatasnya jalur keluar setelah penutupan efektif Selat Hormuz, penyimpanan terapung minyak mentah dan produk minyak di Timur Tengah meningkat sebesar 100 juta barel dan stok minyak mentah di darat di wilayah tersebut naik sebesar 20 juta barel. Tiongkok menambahkan 40 juta barel minyak mentah ke tangki penyimpanan.

Sejalan dengan harga minyak mentah dunia, harga batu bara juga mengalami peningkatan pada triwulan I-2026. Harga batu bara tercatat 142,45 USD/ton meningkat dari triwulan sebelumnya di level 107,50 USD/ton, dan meningkat jika dibandingkan dengan posisi yang sama tahun lalu sebesar 103,00 USD/ton. Angka ini merupakan harga tertinggi sejak November 2024. Kenaikan harga tersebut merupakan bagian dari tren yang lebih luas di mana biaya input energi meningkat dengan laju tahunan sebesar 12,6%. Peningkatan signifikan tersebut menandakan perubahan menuju tren *bullish* bagi produsen batu bara, yang pendapatan dan margin keuntungannya secara langsung bergantung pada harga komoditas tersebut. Hal ini mengindikasikan potensi pengetatan pasokan energi global dan kembali meningkatnya permintaan terhadap sumber energi konvensional sehingga berpotensi mengalami peningkatan kerja yang signifikan.

Sementara itu, harga *Crude Palm Oil* (CPO) turut mengalami peningkatan. Pada bulan laporan, harga CPO sebesar 1.168,69 USD/barrel meningkat dari triwulan

sebelumnya sebesar 989,65 USD/barrel dan meningkat jika dibandingkan periode yang sama di tahun lalu sebesar 1.081,91 USD/barrel. Penguatan harga CPO dipicu oleh pasokan yang ketat, tingginya ekspektasi permintaan India, dan harga *soybean oil* yang tetap tinggi. Persediaan minyak sawit Malaysia tercatat menurun tajam sebesar 19,2% atau menjadi 2,18 juta ton pada Maret 2026. Penurunan ini merupakan penurunan paling tajam dalam tiga tahun terakhir dan mencatatkan stok level terendah sejak Juli 2025. Penurunan dipicu oleh lonjakan permintaan internasional, tercatat ekspor minyak sawit Malaysia mencapai 1,56 juta ton naik 38,3% dari Februari 2026. Selain itu, pemulihan pada tingkat produksi masih berada pada tingkat rendah turut menekan ketersediaan pasokan global sehingga mendorong kenaikan harga. Selain itu, kenaikan harga CPO turut didukung oleh harga *soybean oil* AS yang bertahan pada level tinggi. Peningkatan harga *soybean oil* disebabkan ketersediaan yang ketat dan persaingan permintaan mendukung penawaran yang lebih kuat di Chicago. Kondisi ini meningkatkan daya saing minyak sawit sebagai substitusi minyak nabati, sehingga memberikan tekanan kenaikan pada harga CPO.

Grafik 5 Perkembangan Harga Komoditas



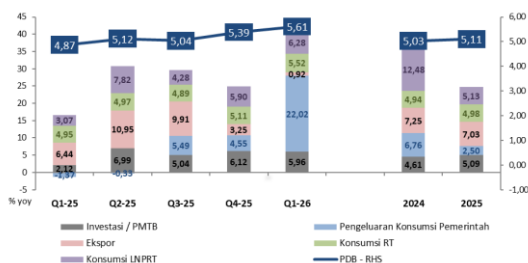
Sumber: Reuters

2. Perekonomian Domestik

Dari sisi domestik, fundamental ekonomi Indonesia masih menunjukkan daya tahan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global seiring dengan eskalasi konflik geopolitik yang melibatkan AS-Israel-Iran. Konflik tersebut turut mendorong kenaikan harga komoditas energi, meningkatkan tekanan inflasi global, serta memicu revisi ke bawah terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia. Di tengah kondisi tersebut, perekonomian Indonesia tetap mampu mencatatkan kinerja yang solid, bahkan menjadi yang tertinggi sejak fase pemulihan pascapandemi pada triwulan III-2022. Kondisi tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2026 yang mencapai 5,61% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan IV-2025 sebesar 5,39% (yoy) maupun periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,87% (yoy). Kinerja tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi domestik masih terjaga dengan baik. Secara global, capaian tersebut juga menempatkan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara negara-negara G20 yang telah merilis data pertumbuhan ekonomi triwulan I-2026. Tiongkok berada di posisi kedua dengan pertumbuhan sebesar 5,00% (yoy), diikuti Singapura sebesar 4,80% (yoy), serta Korea Selatan dan Arab Saudi masing-masing sebesar 3,80% (yoy) dan 2,80% (yoy). Sementara itu, AS dan Spanyol mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,70% (yoy). Negara-negara Eropa lainnya cenderung tumbuh lebih moderat, seperti Belanda sebesar 1,20% (yoy), Prancis 1,10% (yoy), kawasan Euro Area dan Italia masing-masing 0,80% (yoy), serta

Jerman yang hanya tumbuh 0,30% (yoy). Di sisi lain, Meksiko menjadi negara dengan pertumbuhan terendah di antara negara-negara anggota G20 yang telah merilis data, yaitu hanya sebesar 0,10% (yoy). Kendati demikian, apabila dilihat secara triwulanan, pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2026 justru mengalami kontraksi sebesar -0,77% (qtd), berbalik arah dari triwulan IV-2025 yang masih tumbuh positif sebesar 0,86% (qtd).

Grafik 6 Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Pengeluaran



Sumber: BPS

Berdasarkan komponen pengeluaran, pertumbuhan ekonomi domestik pada triwulan I-2026 didorong oleh akselerasi belanja Pemerintah, peningkatan konsumsi rumah tangga, dan investasi. Sebagaimana diketahui, hingga saat ini pertumbuhan ekonomi domestik masih ditopang oleh Konsumsi Rumah Tangga yang tetap menjadi penyumbang terbesar terhadap PDB Indonesia, dengan pangsa mencapai 54,36%. Pada periode tersebut, Konsumsi Rumah Tangga tumbuh sebesar 5,52% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,11% (yoy) maupun periode yang sama tahun lalu sebesar 4,95% (yoy). Tetap solidnya konsumsi rumah tangga didorong oleh meningkatnya mobilitas masyarakat selama periode libur nasional dan hari besar keagamaan, khususnya Idul Fitri dan

Nyepi, yang mendorong kenaikan aktivitas belanja, perjalanan, dan konsumsi jasa. Selain itu juga didukung oleh berbagai program stimulus Pemerintah dalam menopang daya beli masyarakat.

Dilihat berdasarkan komponennya, struktur konsumsi rumah tangga masih didominasi oleh makanan dan minuman selain restoran dengan kontribusi sebesar 36,03% terhadap total konsumsi rumah tangga. Komponen ini tumbuh 4,55% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (4,42%, yoy) dan periode yang sama tahun lalu sebesar (4,04%, yoy). Komponen transportasi dan komunikasi menjadi kontributor terbesar kedua dengan pangsa sebesar 25,50%. Pada triwulan I-2026, komponen ini tumbuh sebesar 6,91% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan IV-2025 sebesar 6,31% (yoy) maupun triwulan I-2025 sebesar 6,15% (yoy). Sementara itu, komponen perumahan dan perlengkapan rumah tangga dengan pangsa 13,68% mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,65% (yoy). Angka tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,30% (yoy), namun masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 5,06% (yoy). Di sisi lain, komponen restoran dan hotel mencatatkan pertumbuhan tertinggi di antara seluruh komponen konsumsi rumah tangga, yaitu sebesar 7,38% (yoy) dengan pangsa 9,66%. Angka pertumbuhan tersebut meningkat dibandingkan capaian pada triwulan IV-2025 dan triwulan I-2025 yang masing-masing tercatat sebesar 6,28% (yoy) dan 6,02% (yoy). Tren akselerasi juga terlihat pada komponen kesehatan dan pendidikan yang memiliki pangsa sebesar 7,02%,

dengan pertumbuhan mencapai 4,82% (yoy). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan IV-2025 sebesar 4,80% (yoy) maupun triwulan I-2025 yang tercatat 3,66% (yoy). Perkembangan serupa dialami oleh komponen pakaian, alas kaki, dan jasa perawatannya yang tumbuh 5,88% (yoy), meningkat dari 4,56% (yoy) pada triwulan sebelumnya, meskipun sedikit melambat jika dibandingkan triwulan I-2025 yang mencapai 6,86% (yoy).

Kinerja pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga/LNPRT (porsi: 1,40% terhadap PDB) turut memperlihatkan akselerasi pertumbuhan yang relatif kuat. Komponen ini meningkat secara gradual dari 3,07% (yoy) pada triwulan I-2025 menjadi 5,90% (yoy) pada triwulan IV-2025, dan 6,28% (yoy) pada triwulan I-2026. Kenaikan ini terutama didorong oleh meningkatnya aktivitas organisasi kemasyarakatan. Untuk informasi, konsumsi LNPRT meliputi pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai lembaga non-profit seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi profesi dan serikat buruh, organisasi kebudayaan, olahraga dan rekreasi, Partai Politik, serta Lembaga Keagamaan.

Komponen Investasi atau Penanaman Modal Tetap Bruto/PMTB (porsi: 28,29% terhadap PDB) masih menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi setelah konsumsi rumah tangga pada triwulan I-2026. Kinerja investasi tumbuh cukup kuat sebesar 5,96% (yoy), meningkat signifikan dibandingkan triwulan I-2025 sebesar 2,12% (yoy). Meski demikian, angka tersebut sedikit melambat dibandingkan

capaian pada triwulan IV-2025 sebesar 6,12% (yoy). Sementara itu, secara triwulanan kinerja investasi mengalami kontraksi sebesar -7,54% (qtq). Hal ini mengindikasikan adanya pola normalisasi aktivitas investasi pada awal tahun serta masih kuatnya pengaruh ketidakpastian global terhadap keputusan ekspansi usaha.

Kinerja investasi yang tetap terjaga pada periode laporan sejalan dengan realisasi investasi nasional yang masih menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi nasional pada triwulan I-2026 mencapai Rp498,79 triliun, atau sekitar 24,4% dari target realisasi investasi tahunan sebesar Rp2.041,3 triliun. Nilai tersebut tumbuh sebesar 7,22% (yoy) dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp465,2 triliun. Secara triwulanan, realisasi investasi juga masih mampu tumbuh sebesar 0,4% (qtq) dari Rp496,9 triliun pada triwulan IV-2025. Peningkatan aktivitas investasi ini turut memberikan dampak positif terhadap pasar tenaga kerja, sebagaimana tercermin pada tingkat penyerapan tenaga kerja sebanyak 706.569 orang atau meningkat 18,93% (yoy). Perkembangan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih mampu mempertahankan daya tarik investasi dan menjaga kepercayaan investor di tengah berlanjutnya ketidakpastian global, perlambatan ekonomi dunia, serta tingginya volatilitas pasar keuangan internasional.

Tetap terjaganya optimisme investor tidak terlepas dari berbagai langkah reformasi struktural yang terus dilakukan Pemerintah

guna memperbaiki iklim investasi nasional. Salah satunya melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Regulasi ini memperkuat kepastian waktu layanan, menyederhanakan proses perizinan berbasis risiko, memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro, serta mendorong integrasi sistem *Online Single Submission* (OSS) dan Administrasi Hukum Umum (AHU) *Online* dalam implementasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025. Reformasi tersebut menjadi sinyal positif bagi dunia usaha karena mampu meningkatkan efisiensi proses perizinan dan memperkuat kepastian berusaha di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh tantangan.

Ditinjau berdasarkan komponennya, penggerak utama pertumbuhan investasi pada triwulan I-2026 masih berasal dari investasi nonbangunan, terutama pada subkomponen mesin dan perlengkapan yang memiliki pangsa terbesar, yakni 13,36% terhadap total investasi. Subkomponen ini tumbuh sebesar 10,78% (yoy), meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sangat tinggi sebesar 22,16% (yoy), namun tetap lebih baik dibandingkan triwulan I-2025 sebesar 7,26% (yoy). Pertumbuhan yang masih relatif tinggi pada investasi mesin dan perlengkapan mengindikasikan bahwa aktivitas ekspansi kapasitas produksi dan modernisasi peralatan usaha masih berlangsung. Akan tetapi, secara triwulanan subkomponen ini mengalami kontraksi cukup dalam sebesar -19,82% (qtq), yang mengindikasikan adanya penyesuaian

investasi setelah tingginya realisasi belanja modal pada akhir tahun 2025.

Di sisi lain, investasi kendaraan dengan pangsa 6,04% mencatatkan akselerasi pertumbuhan paling tinggi di antara seluruh subkomponen investasi. Pada periode laporan, subkomponen ini tumbuh sebesar 12,39% (yoy), meningkat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 7,29% (yoy) maupun periode yang sama tahun lalu sebesar 4,16% (yoy). Bahkan, secara triwulanan investasi kendaraan menjadi satu-satunya subkomponen yang masih mencatatkan pertumbuhan positif, yakni sebesar 3,86% (yoy), di tengah kontraksi yang terjadi pada sebagian besar subkomponen investasi lainnya. Kinerja tersebut mencerminkan bahwa kebutuhan dunia usaha terhadap sarana transportasi dan distribusi barang masih tetap tinggi, seiring meningkatnya aktivitas logistik, perdagangan, dan mobilitas sektor produksi. Kondisi ini juga mencerminkan bahwa pelaku usaha masih optimis terhadap prospek permintaan domestik, sehingga tetap melakukan penambahan armada operasional serta kendaraan pendukung untuk menunjang kegiatan usaha.

Berbeda dengan investasi kendaraan yang menunjukkan penguatan, investasi peralatan lainnya justru mengalami tekanan yang semakin dalam. Subkomponen dengan pangsa relatif kecil yaitu hanya 1,19% terhadap total investasi ini tercatat terkontraksi sebesar -3,73% (yoy) pada triwulan I-2025, kemudian melemah menjadi -5,05% (yoy) pada triwulan IV-2025, dan kembali turun lebih dalam hingga -11,30% (yoy) pada triwulan

I-2026. Tidak hanya itu, investasi peralatan lainnya juga mencatatkan penurunan terdalam jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yakni sebesar -21,41% (qtq). Pelemahan tersebut mengindikasikan bahwa pelaku usaha masih cenderung selektif dalam melakukan investasi, khususnya pada pembelian peralatan penunjang yang belum bersifat mendesak bagi kegiatan produksi utama. Di tengah suku bunga yang masih relatif tinggi, ketidakpastian permintaan global, serta tekanan terhadap daya beli di beberapa sektor, pelaku usaha ditengarai cenderung lebih memprioritaskan investasi yang langsung mendukung operasional dan efisiensi usaha dibandingkan ekspansi peralatan tambahan.

Sementara itu, subkomponen produk kekayaan intelektual dengan pangsa 2,14% terhadap total investasi masih melanjutkan tren pertumbuhan positif, meskipun lajunya semakin melambat. Komponen ini tumbuh sebesar 6,20% (yoy) pada triwulan I-2025, kemudian sedikit melandai menjadi 5,97% (yoy) pada triwulan IV-2025, dan kembali melambat sebesar 5,80% (yoy) pada triwulan I-2026. Perlambatan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas investasi yang berkaitan dengan inovasi, penelitian, pengembangan teknologi, perangkat lunak, maupun aset berbasis pengetahuan masih tetap berlangsung, meskipun dengan intensitas yang lebih terbatas dibandingkan periode sebelumnya. Di sisi lain, secara triwulanan kinerja subkomponen ini mengalami penurunan cukup signifikan. Berbeda dengan triwulan sebelumnya, ketika produk kekayaan intelektual menjadi subkomponen dengan pertumbuhan tertinggi di antara seluruh

komponen investasi, sebesar 9,88% (qtq), pada periode laporan subkomponen ini justru mengalami kontraksi cukup dalam sebesar -16,55% (qtq). Kondisi tersebut mengindikasikan adanya penyesuaian atau penundaan aktivitas investasi berbasis inovasi pada awal tahun, seiring kecenderungan pelaku usaha untuk lebih selektif dalam melakukan ekspansi investasi nonfisik.

Di tengah perlambatan pada beberapa subkomponen investasi, *Cultivated Biological Resources (CBR)* dengan pangsa 3,98% terhadap total investasi justru mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah sebelumnya mengalami tekanan. Subkomponen ini sebelumnya terkontraksi -1,78% (yoy) pada triwulan I-2025, kemudian membaik menjadi -0,13% (yoy) pada triwulan IV-2025, dan kembali tumbuh positif sebesar 0,30% (yoy) pada triwulan I-2026. Perbaikan tersebut mengindikasikan mulai pulihnya investasi pada sektor berbasis sumber daya hayati, termasuk subsektor perkebunan, peternakan, maupun budidaya lainnya. Meski demikian, secara triwulanan subkomponen ini masih mengalami kontraksi cukup dalam sebesar -19,80% (qtq). Hal ini menunjukkan bahwa proses pemulihan investasi pada sektor berbasis sumber daya hayati masih berlangsung secara bertahap dan belum sepenuhnya kuat, karena dipengaruhi oleh faktor musiman dan penyesuaian siklus produksi pada awal tahun.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, investasi bangunan yang masih menjadi kontributor terbesar terhadap total investasi dengan pangsa mencapai 73,29%

menunjukkan pertumbuhan yang semakin kuat. Pada triwulan I-2026, subkomponen ini tumbuh sebesar 5,29% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 3,74% (yoy) maupun periode yang sama tahun lalu yang hanya sebesar 1,35% (yoy). Penguatan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pembangunan masih berlangsung cukup aktif, baik pada sektor infrastruktur maupun properti. Berlanjutnya pembangunan jalan, kawasan industri, fasilitas publik, hingga proyek perumahan menjadi salah satu faktor yang menopang pertumbuhan investasi bangunan. Selain itu, kondisi ini juga mengindikasikan bahwa pelaksanaan proyek investasi masih terus berjalan, seiring tetap tingginya kebutuhan pembangunan dan berlanjutnya aktivitas ekspansi di berbagai sektor.

Komponen pengeluaran konsumsi Pemerintah (porsi: 6,72% terhadap PDB) mencatatkan pertumbuhan tertinggi di antara seluruh komponen pengeluaran lainnya, yakni mencapai 21,81% (yoy) pada triwulan I-2026. Capaian tersebut meningkat sangat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,55% (yoy), sekaligus berbalik arah dari periode yang sama tahun lalu yang masih berkontraksi -1,20% (yoy). Pertumbuhan yang tinggi tersebut terutama didorong oleh percepatan belanja Pemerintah pada berbagai program prioritas, yang tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi secara langsung, tetapi juga turut menjaga daya beli masyarakat, mendorong konsumsi rumah tangga, serta mendukung stabilitas ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, total belanja negara pada periode ini tercatat sebesar

Rp815,0 triliun atau meningkat 31,4% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp620,3 triliun. Ditinjau dari komponennya, Belanja Negara masih didominasi oleh Belanja Pemerintah Pusat yang mencapai Rp610,3 triliun atau sekitar 74,9% dari total Belanja Negara. Realisasi tersebut juga setara dengan 19,4% terhadap APBN dan terdiri atas Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp218,2 triliun yang tumbuh 43,4% (yoy) serta Belanja Non-K/L sebesar Rp329,1 triliun yang tumbuh 51,5% (yoy). Tingginya realisasi Belanja K/L terutama didorong oleh pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Penyaluran Bantuan Sosial (PBI JKN, Kartu Sembako, PKH, dan KIP Kuliah) serta gaji dan Tunjangan Hari Raya. Sementara itu, pertumbuhan Belanja Non-K/L terutama ditopang oleh pembayaran manfaat pensiun, subsidi, kompensasi Bahan Bakar Minyak, dan listrik.

Komponen Ekspor Barang dan Jasa (porsi: 21,22% terhadap PDB) tetap mencatatkan pertumbuhan positif, meski hanya sebesar 0,90% (yoy) pada triwulan I-2026. Namun demikian, capaian tersebut menunjukkan perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh kuat mencapai 3,25% (yoy) maupun periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,46% (yoy). Sejalan dengan melambatnya pertumbuhan tersebut, kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDB juga mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar 23,77%.

Berdasarkan data BPS, nilai ekspor Indonesia pada Maret 2026 berkontraksi sebesar -3,10% (yoy) menjadi USD22,53 miliar, menurun dibandingkan Maret 2025 yang mencatat pertumbuhan 2,54% (yoy) dengan nilai ekspor sebesar USD23,25 miliar. Pelemahan kinerja ekspor pada periode ini terutama dipengaruhi oleh penurunan ekspor migas yang masih berlanjut dan telah berlangsung sejak April 2025 atau selama 12 bulan berturut-turut. Pada Maret 2026, nilai ekspor migas tercatat sebesar USD1,28 miliar atau berkontraksi sebesar -11,84% (yoy). Capaian ini menurun cukup tajam dibandingkan Desember 2024 yang masih mampu tumbuh positif sebesar 13,05% (yoy) dengan nilai mencapai USD1,45 miliar. Melemahnya nilai ekspor migas terutama dipengaruhi oleh penurunan tajam pada ekspor minyak mentah dan hasil minyak. Keduanya mengalami pembalikan tren dari kondisi yang sebelumnya masih mencatat pertumbuhan positif menjadi kontraksi yang cukup dalam. Ekspor minyak mentah turun dari 0,59% (yoy) menjadi berkontraksi -34,36% (yoy), sedangkan ekspor hasil minyak turun lebih dalam dari 18,03% (yoy) menjadi -17,59% (yoy). Sementara itu, ekspor gas alam masih mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 0,10% (yoy). Namun, laju pertumbuhan tersebut jauh lebih rendah 13,10% (yoy), sehingga kontribusinya belum mampu mengimbangi pelemahan yang terjadi pada komoditas minyak mentah dan hasil minyak. Akibatnya, secara keseluruhan kinerja ekspor migas masih berada dalam tren penurunan dan menjadi salah satu faktor utama yang menekan pertumbuhan ekspor Indonesia pada Maret 2026.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, kinerja ekspor nonmigas pada periode laporan juga mengalami tekanan. Nilai ekspor nonmigas tercatat berkontraksi sebesar -2,52% (yoy), menurun dari USD21,79 miliar pada Maret 2025 menjadi USD21,25 miliar pada Maret 2026. Pelemahan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan ekspor pada sejumlah komoditas utama yang selama ini menjadi penopang kinerja perdagangan Indonesia. Penurunan terdalam terjadi pada komoditas minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya yang berbalik dari pertumbuhan tinggi sebesar 49,20% (yoy) pada Maret 2025 menjadi berkontraksi -35,37% (yoy). Pelemahan kinerja ekspor CPO yang melemah ditengarai karena terdampak oleh melemahnya permintaan dari beberapa negara tujuan utama serta meningkatnya persaingan dengan negara produsen lain. Selanjutnya, ekspor peralatan listrik mengalami perlambatan yang cukup signifikan, dari tumbuh 21,10% (yoy) menjadi berkontraksi -26,90% (yoy). Kondisi ini mengindikasikan masih lemahnya permintaan manufaktur global, khususnya dari negara-negara mitra dagang utama yang masih menghadapi ketidakpastian ekonomi dan penyesuaian aktivitas industri. Pelemahan juga terjadi pada komoditas pakaian jadi (konveksi) dari tekstil yang beralih dari pertumbuhan 4,25% (yoy) menjadi kontraksi sebesar -15,36% (yoy). Sementara itu, ekspor sepatu olahraga turun dari 5,76% (yoy) menjadi -21,68% (yoy). Penurunan pada kedua komoditas padat karya tersebut mencerminkan masih terbatasnya permintaan konsumen di pasar global, terutama di tengah kecenderungan

masyarakat di negara maju untuk menahan konsumsi barang non-primer akibat tekanan biaya hidup dan ketidakpastian ekonomi. Selain itu, ekspor karet remah juga mengalami penurunan tajam dari 31,20% (yoy) menjadi -26,82% (yoy). Pelemahan ini sejalan dengan perlambatan industri otomotif dan manufaktur global yang merupakan sektor pengguna utama produk karet, sehingga berdampak pada menurunnya permintaan ekspor komoditas tersebut. Secara keseluruhan, kontraksi ekspor nonmigas pada Maret 2026 menunjukkan bahwa sektor eksternal Indonesia masih menghadapi tantangan yang cukup besar, baik yang berasal dari melemahnya harga beberapa komoditas unggulan maupun perlambatan permintaan global. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemulihan perdagangan internasional belum berlangsung merata, sehingga diperlukan penguatan daya saing ekspor manufaktur bernilai tambah serta diversifikasi pasar tujuan ekspor untuk menjaga ketahanan sektor eksternal ke depan.

Secara lebih mendalam, melemahnya peran ekspor sebagai penggerak utama pertumbuhan pada triwulan I-2026 berpotensi memberikan implikasi struktural. Pertama, perlambatan ekspor mengindikasikan bahwa peran sektor eksternal sebagai penopang pertumbuhan mulai berkurang di tengah ketidakpastian global, perlambatan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang, serta dinamika politik yang masih memengaruhi perdagangan global. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi fungsi ekspor sebagai *absorber* bagi perekonomian domestik ketika permintaan global melemah. Kedua,

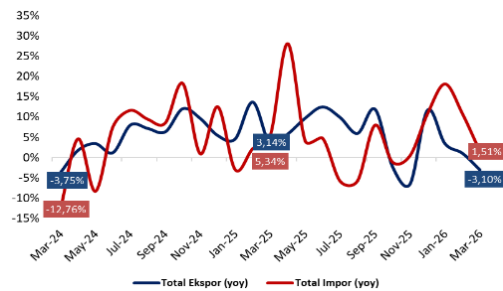
perlambatan ekspor turut mencerminkan adanya tekanan pada sektor-sektor yang berorientasi ekspor, khususnya komoditas yang sensitif terhadap fluktuasi harga dan permintaan global. Ketiga, perubahan kebijakan perdagangan global, fluktuasi harga komoditas, serta kondisi ekonomi negara mitra dagang akan menjadi faktor penting yang memengaruhi kesinambungan pertumbuhan ekonomi ke depan. Dalam konteks tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya untuk memperkuat ketahanan sektor eksternal, antara lain melalui peningkatan nilai tambah produk ekspor, diversifikasi komoditas dan pasar tujuan ekspor, serta penguatan daya saing industri domestik guna mengurangi konsentrasi risiko pada negara mitra dagang tertentu.

Di sisi lain, kinerja impor barang dan jasa (porsi: 20,29% terhadap PDB) menunjukkan dinamika yang relatif beragam. Pada triwulan I-2026, komponen impor barang dan jasa tumbuh 7,19% (yoy) meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,00% (yoy). Namun demikian, secara triwulanan, impor barang dan jasa justru mengalami kontraksi sebesar -8,12% (qtq). Sejalan dengan kondisi tersebut, data BPS menunjukkan bahwa nilai impor Indonesia pada Maret 2026 masih tumbuh sebesar 1,51% (yoy) menjadi USD19,21 miliar, meskipun laju pertumbuhannya melambat dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 5,34% (yoy) dengan nilai USD18,92 miliar. Perlambatan pertumbuhan impor secara tahunan terutama dipengaruhi oleh nonmigas dari 7,91% (yoy) pada Maret 2025 menjadi 1,54% (yoy) pada Maret 2026.

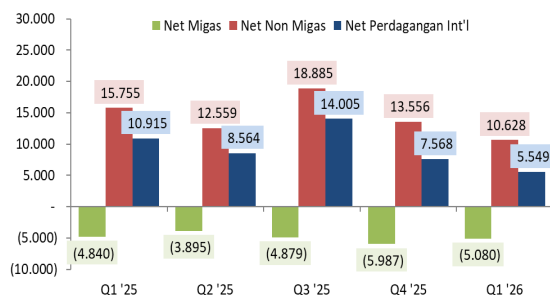
Berdasarkan kelompok komoditas, perlambatan nilai impor nonmigas terutama berasal dari mesin untuk keperluan khusus, peralatan komunikasi lainnya, kendaraan bermotor roda empat dan lebih, kimia dasar organik yang bersumber dari minyak, dan produk manufaktur lainnya. Komoditas mesin untuk keperluan khusus yang sebelumnya tumbuh tinggi sebesar 45,05% (yoy) menjadi kontraksi -22,12% (yoy). Sementara itu, kontraksi impor peralatan komunikasi lainnya semakin dalam, dari -5,77% (yoy) menjadi -26,90% (yoy). Impor kendaraan bermotor roda empat atau lebih juga mengalami pelemahan yang cukup tajam, dari pertumbuhan 60,52% (yoy) menjadi kontraksi -26,37% (yoy). Penurunan yang lebih dalam turut terjadi pada impor kimia dasar organik yang bersumber dari minyak, dari -2,97% (yoy) menjadi -55,53% (yoy). Adapun impor produk manufaktur lainnya yang sebelumnya tumbuh sebesar 11,87% (yoy) berbalik berkontraksi sebesar -2,35% (yoy). Nilai ekspor yang masih berada di atas nilai impor pada periode laporan kembali menjaga keberlanjutan surplus neraca perdagangan Indonesia yang telah berlangsung selama 71 bulan berturut-turut. Pada Maret 2026, surplus neraca perdagangan tercatat sebesar USD3,32 miliar, atau melambat sebesar -23,25% (yoy) dibandingkan surplus pada Maret 2025 yang mencapai USD4,33 miliar. Secara kumulatif, surplus neraca perdagangan selama triwulan I-2026 tercatat sebesar USD5,55 miliar, mengalami kontraksi yang cukup dalam sebesar -49,16% (ctc) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai USD10,92

miliar. Meskipun surplus neraca perdagangan yang berkelanjutan masih memberikan dukungan positif bagi stabilitas makroekonomi nasional, terutama melalui kontribusinya terhadap pembentukan cadangan devisa, penguatan posisi eksternal, serta stabilitas nilai tukar rupiah, tren perlambatan surplus yang terjadi dalam beberapa periode terakhir perlu menjadi perhatian. Menyempitnya surplus perdagangan mengindikasikan bahwa kemampuan sektor eksternal dalam menghasilkan tambahan devisa mulai mengalami penurunan, sejalan dengan melemahnya kinerja ekspor di tengah perlambatan permintaan global dan meningkatnya ketidakpastian perdagangan internasional.

Apabila tren perlambatan surplus neraca perdagangan berlangsung secara berkelanjutan, maka ketahanan eksternal perekonomian berpotensi menghadapi tekanan yang lebih besar. Di tengah masih tingginya risiko global yang bersumber dari fragmentasi perdagangan dunia, ketidakpastian kebijakan ekonomi negara maju, serta volatilitas harga komoditas internasional, kemampuan Indonesia dalam mempertahankan surplus perdagangan yang memadai akan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas eksternal dan kepercayaan investor terhadap fundamental perekonomian nasional.

Grafik 7 Pertumbuhan Nilai Ekspor dan Impor

Sumber: BPS

Grafik 8 Neraca Perdagangan Indonesia

Sumber: BPS

Dari sisi produksi, perekonomian nasional pada triwulan I-2026, didominasi oleh lima lapangan usaha utama yaitu: industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran; pertanian, kehutanan, dan perikanan; konstruksi; serta pertambangan dan penggalian. Secara agregat, kelima sektor tersebut memberikan kontribusi sebesar 63,51% terhadap PDB triwulan I-2026. Adapun pertumbuhan ekonomi pada masing-masing sektor tersebut menunjukkan dinamika yang cukup beragam. Di antara kelima sektor tersebut, industri pengolahan menjadi kontributor terbesar dengan andil mencapai 19,07% (yoy) terhadap PDB. Kinerja sektor ini tercatat tumbuh 5,04% (yoy), sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,40% (yoy), namun menunjukkan perbaikan dari 4,55% (yoy) pada triwulan I-2025. Penguatan kinerja industri pengolahan terutama

ditopang oleh meningkatnya aktivitas pada sejumlah subsektor utama, antara lain: industri mesin dan perlengkapan; industri logam dasar; industri barang galian bukan logam; industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik; industri kertas dan barang dari kertas; serta industri kimia, farmasi dan obat tradisional. Penguatan kinerja industri pengolahan juga didukung oleh berlanjutnya berbagai kebijakan Pemerintah yang berorientasi pada percepatan hilirisasi dan industrialisasi, pengembangan kawasan industri, peningkatan investasi manufaktur, serta penguatan rantai pasok industri.

Sektor perdagangan besar dan eceran yang berkontribusi 13,28% terhadap PDB triwulan I-2026 mencatat pertumbuhan sebesar 6,26% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,07% (yoy) dan triwulan I-2025 sebesar 5,03% (yoy). Perkembangan ini terutama didorong oleh perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor yang tumbuh tinggi mencapai 7,34% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 6,26% (yoy). Tidak hanya itu, subsektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor juga turut memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan sektor ini. Meskipun hanya tumbuh sebesar 1,03% (yoy), capaian tersebut menunjukkan perbaikan dibandingkan kontraksi sebesar -0,55% (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pemulihan kinerja subsektor ini mengindikasikan masih terjaganya permintaan masyarakat terhadap barang tahan lama (*durable goods*), yang umumnya sensitif terhadap

tingkat pendapatan, akses pembiayaan, dan ekspektasi terhadap kondisi ekonomi ke depan. Di samping itu, meningkatnya mobilitas masyarakat dan semakin bergairahnya aktivitas ekonomi turut mendorong peningkatan transaksi perdagangan baik pada tingkat grosir maupun ritel, sehingga memperkuat ekspansi sektor perdagangan secara keseluruhan.

Sementara itu, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang berkontribusi 12,67% terhadap PDB triwulan I-2026, mencatat pertumbuhan sebesar 4,97% (yoy). Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 5,14% (yoy), bahkan melambat cukup signifikan dibandingkan triwulan I-2025 yang tumbuh sebesar 10,52% (yoy). Perlambatan kinerja sektor ini secara tahunan terutama dipengaruhi oleh moderasi pertumbuhan pada subsektor tanaman pangan yang hanya tumbuh 7,58% (yoy), jauh lebih rendah dari 42,45% (yoy) pada periode yang sama tahun lalu. Kondisi ini ditengarai karena normalisasi produksi tanaman pangan setelah lonjakan yang terjadi pada tahun lalu. Selain itu, perlambatan juga dipengaruhi oleh subsektor jasa pertanian dan perburuan yang tumbuh melambat dari 12,64% (yoy) menjadi 6,41% (yoy). Di sisi lain, beberapa subsektor masih menunjukkan kinerja yang cukup kuat. Subsektor peternakan mencatat pertumbuhan tertinggi di antara subsektor lainnya yaitu mencapai 11,84% (yoy), naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 8,83% (yoy). Subsektor tanaman hortikultura juga menunjukkan perbaikan dengan pertumbuhan sebesar 2,40% (yoy), lebih

tinggi dibandingkan 1,83% (yoy) pada triwulan I-2025. Kinerja positif kedua subsektor tersebut turut menahan perlambatan yang lebih dalam pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan secara keseluruhan.

Sebaliknya, sektor konstruksi yang memiliki kontribusi sebesar 9,81% terhadap PDB mulai menunjukkan akselerasi pertumbuhan. Sektor ini tumbuh 5,49% (yoy) pada triwulan I-2026. Angka ini meningkat cukup signifikan dari triwulan sebelumnya sebesar 3,89% (yoy) maupun 2,18% (yoy) pada triwulan I-2025. Penguatan tersebut mengindikasikan meningkatnya aktivitas konstruksi seiring berlanjutnya pembangunan berbagai proyek infrastruktur dan semakin membaiknya realisasi investasi bangunan. Selain itu, pertumbuhan sektor ini juga didukung oleh percepatan program strategis pemerintah, pembangunan masif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta meningkatnya investasi fisik dari sektor swasta yang turut menopang pembangunan secara merata.

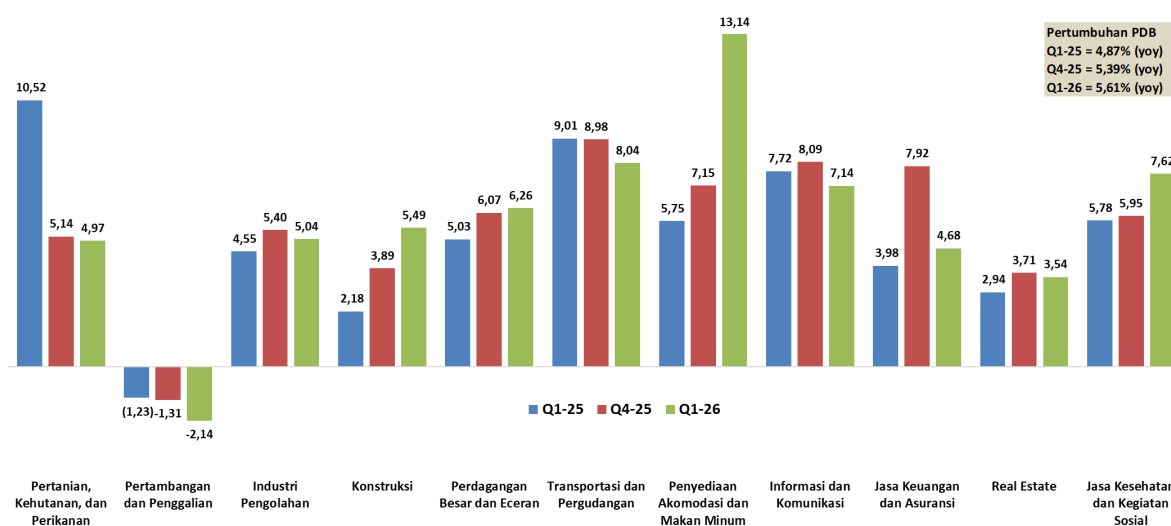
Berbanding terbalik dengan perkembangan sektor konstruksi, sektor pertambangan dan penggalian yang berkontribusi sebesar 8,93% terhadap PDB masih menunjukkan tren kontraksi yang berlanjut pada triwulan I-2026. Sektor pertambangan dan penggalian tercatat mengalami kontraksi sebesar -2,14% (yoy), turun dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi -1,31% (yoy) maupun triwulan I-2025 yang tercatat -1,23% (yoy). Kondisi ini mencerminkan belum pulihnya aktivitas produksi pada beberapa komoditas

pertambahan antara lain minyak, gas, dan panas bumi, bijih logam, serta batubara dan lignit di tengah dinamika permintaan global yang masih terbatas. Selain itu, fluktuasi harga komoditas di pasar internasional maupun penurunan volume produksi pada beberapa subsektor ditengarai turut menahan kinerja sektor ini.

Di samping lima sektor utama penyumbang PDB triwulan I-2026, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mencatatkan kinerja pertumbuhan tertinggi di antara seluruh lapangan usaha, yaitu sebesar 13,14% (yoy). Meskipun kontribusinya terhadap PDB relatif terbatas yakni hanya 2,79%, sektor ini menunjukkan akselerasi yang sangat kuat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 7,15% (yoy) maupun triwulan I-2025 yang tercatat sebesar 5,75% (yoy). Kinerja impresif tersebut mengindikasikan

meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat, khususnya pada layanan makanan, minuman, serta aktivitas penunjang mobilitas dan pariwisata. Pertumbuhan sektor ini terutama ditopang oleh subsektor penyediaan makan minum yang mengalami peningkatan permintaan secara signifikan selama periode laporan, tidak hanya secara tahunan tetapi juga triwulanan yaitu sebesar 6,87% (qtq). Penguatan tersebut tidak terlepas dari momentum Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri yang pada tahun ini berlangsung pada triwulan I. Periode tersebut secara historis selalu diikuti oleh peningkatan konsumsi rumah tangga untuk kebutuhan makanan dan minuman. Tingginya aktivitas berbuka puasa bersama, persiapan perayaan Idul Fitri, serta meningkatnya permintaan produk makanan olahan turut mendorong pertumbuhan subsektor ini.

Grafik 9 Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Lapangan Usaha



Sumber: BPS, diolah

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sangat bergantung pada ketahanan permintaan domestik, khususnya konsumsi

rumah tangga sebagai kontributor terbesar terhadap PDB. Dalam konteks tersebut, dinamika konsumsi masyarakat dapat

diamati melalui perkembangan Indeks Penjualan Ritel (IPR), yang memberikan gambaran awal mengenai arah pergerakan permintaan domestik. Sejalan dengan itu, IPR pada Maret 2026 menunjukkan bahwa permintaan domestik relatif terjaga meskipun pemulihan daya beli masyarakat belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini tercermin dari kinerja penjualan eceran yang mencatat pertumbuhan tahunan sebesar 3,38% (yoy), namun sedikit melambat dibandingkan Maret tahun lalu yang tumbuh lebih tinggi mencapai 5,47% (yoy). Perkembangan ini mengindikasikan bahwa konsumsi rumah tangga masih mampu menopang aktivitas ekonomi domestik, meskipun sebagian masyarakat masih cenderung berhati-hati dalam melakukan pengeluaran, terutama untuk barang-barang nonesensial.

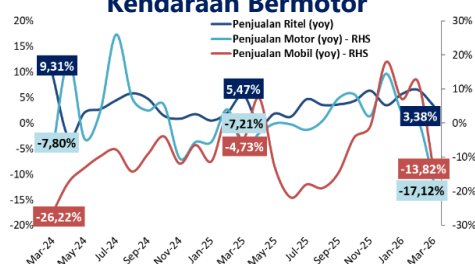
Perlambatan pertumbuhan penjualan ritel secara tahunan terutama dipengaruhi oleh melemahnya kinerja kelompok sandang yang mengalami penurunan paling dalam dibandingkan kelompok lainnya. Kelompok ini tercatat berkontraksi sebesar -2,39% (yoy) atau turun sebesar 14,8 poin, berbalik arah dari pertumbuhan tinggi sebesar 12,40% (yoy) pada Maret 2025. Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa konsumsi masyarakat terhadap produk sandang belum sepenuhnya pulih. Kondisi ini dapat pula mengindikasikan adanya pergeseran pola konsumsi rumah tangga yang lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pokok dibandingkan pengeluaran yang bersifat sekunder. Selain itu, kelompok peralatan informasi dan komunikasi juga masih mencatatkan kontraksi yang cukup dalam, yakni sebesar -26,42% (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi -12,92%

(yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pelemahan pada kelompok ini mengindikasikan masih terbatasnya permintaan terhadap barang-barang elektronik dan perangkat teknologi, yang umumnya tergolong barang tahan lama (*durable goods*) dan sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi serta kemampuan finansial rumah tangga.

Meski demikian, terdapat indikasi bahwa tekanan pada sektor ritel mulai mereda. Hal ini tercermin dari membaiknya kinerja kelompok peralatan informasi dan komunikasi dibandingkan dua bulan sebelumnya yang berkontraksi lebih dalam, masing-masing sebesar -27,12% (yoy) pada Januari 2026 dan -28,32% (yoy) pada Februari 2026. Di sisi lain, beberapa kelompok barang justru menunjukkan penguatan kinerja, antara lain suku cadang dan aksesoris serta barang budaya dan rekreasi yang tumbuh masing-masing sebesar 15,53% (yoy) dan 14,76% (yoy) meningkat dari 9,49% (yoy) dan 12,42% (yoy) pada Maret 2025. Peningkatan pada kedua kelompok tersebut menunjukkan bahwa meskipun masyarakat masih cenderung selektif dalam melakukan pengeluaran, terdapat segmen konsumsi tertentu yang tetap menunjukkan ketahanan bahkan mengalami penguatan. Pertumbuhan penjualan suku cadang dan aksesoris mengindikasikan masih tingginya kebutuhan masyarakat terhadap perawatan dan pemeliharaan kendaraan pribadi seiring meningkatnya mobilitas selama periode laporan. Sementara itu, penguatan pada kelompok barang budaya dan rekreasi menunjukkan meningkatnya pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan

hiburan dan aktivitas rekreatif. Perkembangan tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas masyarakat selama bulan Ramadhan dan menjelang HBKN Idul Fitri, yang umumnya diikuti oleh peningkatan aktivitas perjalanan, kunjungan ke destinasi wisata, serta berbagai kegiatan sosial dan rekreasi.

Grafik 10 Penjualan Ritel dan Penjualan Kendaraan Bermotor



Sumber: BI, Gaikindo, dan AISI diolah

Dari sisi penjualan kendaraan bermotor, Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISII) mencatat volume penjualan sepeda motor dalam negeri pada Maret 2026 tercatat sebanyak 448.974 unit. Angka penjualan tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan, baik secara tahunan maupun bulanan. Secara tahunan, penjualan sepeda motor dalam negeri terkontraksi sebesar -17,12% (yoy) dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 541.684 unit. Sementara itu, secara bulanan penjualan juga menurun sebesar -23,56% (yoy) dibandingkan capaian pada Februari 2026 yang tercatat sebanyak 587.354 unit. Penurunan ini menandai pelemahan pertama penjualan sepeda motor domestik sepanjang tahun 2026. Sebelumnya, pada Januari dan Februari 2026, penjualan sepeda motor masih menunjukkan pertumbuhan positif secara tahunan, masing-masing sebesar 3,12% (yoy) dan 1,05% (yoy). Secara bulanan, kinerja

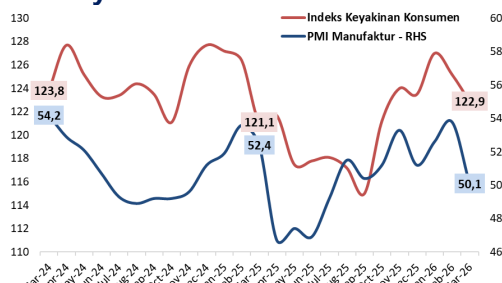
penjualan motor dalam negeri juga sempat mencatatkan peningkatan sebesar 25,08% (yoy) pada Januari 2026 dan kembali tumbuh 1,66% (yoy) pada Februari 2026. Dengan demikian, kontraksi yang terjadi pada Maret 2026 menunjukkan adanya perubahan momentum permintaan dibandingkan dua bulan sebelumnya. Sejalan dengan tren penjualan sepeda motor di dalam negeri, kinerja penjualan mobil *wholesale* (pengiriman dari pabrik ke dealer) juga menunjukkan penurunan yang cukup signifikan secara tahunan maupun bulanan. Pada Maret 2026, penjualan mobil *wholesale* tercatat sebanyak 61.271 unit, terkontraksi -13,82% (yoy) dan -24,50% (mtm). Pelemahan yang terjadi secara bersamaan pada penjualan sepeda motor dan mobil mengindikasikan bahwa permintaan domestik, khususnya pada sektor otomotif, mulai mengalami perlambatan setelah menunjukkan kinerja yang relatif stabil pada awal tahun. Sebelumnya, pada Januari dan Februari 2026, penjualan mobil *wholesale* masih menunjukkan pertumbuhan positif secara tahunan, masing-masing sebesar 3,12% (yoy) dan 1,05% (yoy). Secara ekonomi, pelemahan penjualan otomotif pada Maret 2026 mengindikasikan bahwa sebagian rumah tangga masih cenderung menahan pengeluaran untuk pembelian barang tahan lama (*durable goods*), terutama yang memerlukan komitmen keuangan relatif besar. Kondisi ini sejalan dengan berbagai indikator konsumsi yang menunjukkan bahwa daya beli masyarakat masih dalam tahap pemulihan dan belum sepenuhnya merata pada seluruh kelompok pendapatan. Hal ini terjadi di tengah meningkatnya kebutuhan konsumsi selama

Ramadhan dan menjelang Idulfitri, sebagian rumah tangga tampaknya lebih memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan pokok, makanan dan minuman, serta kebutuhan musiman lainnya dibandingkan pembelian kendaraan baru.

Dari sisi produksi, kinerja manufaktur nasional masih menunjukkan ketahanan dengan tetap berada pada zona ekspansi selama delapan bulan berturut-turut. Hal ini tercermin dari PMI manufaktur Indonesia sebesar 50,1 pada Maret 2026, sedikit turun dari capaian Februari 2026 yang mencapai 53,8 atau merupakan level tertinggi dalam 23 bulan terakhir. Tidak hanya itu, PMI Manufaktur Indonesia pada periode ini juga lebih rendah dibandingkan Maret tahun lalu yang berada pada level 52,4. Melambatnya ekspansi sektor manufaktur terutama dipengaruhi oleh melemahnya permintaan, khususnya dari pasar perdagangan internasional. Di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, perlambatan aktivitas ekonomi di sejumlah negara mitra dagang serta masih berlanjutnya dinamika perdagangan internasional telah menahan

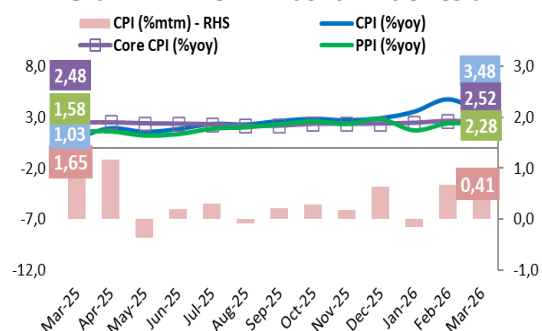
pertumbuhan permintaan terhadap produk manufaktur Indonesia. Kondisi tersebut tercermin pada melambatnya pesanan baru (*new orders*), terutama yang berasal dari pasar ekspor, sehingga berdampak pada penyesuaian aktivitas produksi di sejumlah industri pengolahan. Kondisi tersebut membuat permintaan terhadap produk manufaktur Indonesia cenderung menurun sehingga turut menekan aktivitas produksi di dalam negeri. Selain tekanan dari sisi permintaan, pelaku industri juga masih menghadapi tantangan dari sisi biaya produksi. Kenaikan harga sejumlah input produksi, biaya energi, serta volatilitas harga bahan baku impor turut meningkatkan tekanan biaya operasional perusahaan. Di samping itu, gangguan rantai pasok global yang masih terjadi pada beberapa komoditas tertentu menyebabkan industri perlu melakukan penyesuaian dalam pengadaan bahan baku dan manajemen persediaan. Kombinasi antara moderasi permintaan dan tekanan biaya tersebut pada akhirnya menahan laju ekspansi sektor manufaktur pada Maret 2026.

Grafik 11 PMI Manufaktur dan Indeks Keyakinan Konsumen Indonesia



Sumber: S&P dan BI diolah

Grafik 12 Tren Inflasi di Indonesia



Sumber: BPS, diolah

Penguatan kinerja konsumsi dan produksi turut tercermin pada persepsi rumah tangga terhadap kondisi ekonomi. Hal ini terlihat dari hasil Survei Konsumen Bank Indonesia pada Maret 2026 yang menunjukkan bahwa Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tetap konsisten berada di zona optimis (>100) yakni sebesar 122,9. Angka tersebut menjadi yang terendah dalam lima bulan terakhir, namun sedikit meningkat dari Maret tahun lalu sebesar 121,1. Adapun keyakinan konsumen yang masih berada di level optimis pada Maret 2026 antara lain ditopang oleh persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi ekonomi ke depan yang masih terjaga positif. Hal ini mengindikasikan bahwa sentimen masyarakat masih cukup tangguh walau dihadapkan pada beragam sinyal makroekonomi. Kendati demikian, perlu diwaspadai bahwa tren penurunan IKK dalam beberapa bulan terakhir dapat mencerminkan mulai munculnya kekhawatiran masyarakat terhadap potensi tekanan ekonomi ke depan. Penurunan keyakinan konsumen umumnya mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya, sehingga berpotensi menahan laju konsumsi. Sebaliknya, ketika keyakinan terhadap kondisi ekonomi menguat, maka dorongan untuk berbelanja akan meningkat dan pada akhirnya memperkuat ekspansi konsumsi domestik. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi pelemahan optimisme ini antara lain adalah kenaikan harga barang konsumsi, potensi pelemahan daya beli akibat inflasi yang meningkat, ketidakpastian kondisi global, serta penyesuaian kebijakan moneter dan fiskal di dalam negeri. Keyakinan konsumen yang tetap terjaga pada Maret 2026 tidak terlepas dari

perkembangan harga secara umum yang masih berada dalam rentang yang terkendali. Stabilitas harga yang relatif terjaga memberikan ruang bagi rumah tangga untuk mempertahankan daya beli dan mendukung keberlanjutan konsumsi, yang merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Pada periode laporan, Indeks Harga Konsumen (IHK) mencatat inflasi sebesar 3,48% (yoy) meningkat dibandingkan inflasi sebesar 1,03% (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya. Meskipun lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, tingkat inflasi tersebut masih berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$. Sementara itu, secara bulanan IHK mengalami inflasi sebesar 0,41% (mtm), lebih rendah dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang mencapai 0,68% (mtm). Perkembangan ini menunjukkan bahwa tekanan harga ketika momentum Ramadhan dan menjelang HBKN Idul Fitri mulai muncul, namun masih berada pada level yang relatif terkendali. Dari sisi pembentuknya, inflasi tahunan terutama didorong oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang mencatat inflasi sebesar 7,24% (yoy) dengan andil sebesar 1,08%. Tingginya inflasi pada kelompok ini terutama dipengaruhi oleh komoditas tarif listrik. Namun demikian, peningkatan inflasi tarif listrik lebih banyak dipengaruhi oleh faktor basis (*base effect*), yaitu berakhirnya dampak program diskon tarif listrik yang masih berlaku pada periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan demikian, kenaikan inflasi pada kelompok ini tidak sepenuhnya mencerminkan peningkatan tekanan permintaan, melainkan lebih disebabkan oleh penyesuaian statistik

akibat rendahnya basis perbandingan pada tahun sebelumnya. Sementara itu, dari sisi bulanan, sumber tekanan inflasi terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas seperti ikan segar, daging ayam ras, dan beras menjadi penyumbang utama inflasi pada periode laporan. Kenaikan harga komoditas pangan tersebut sejalan dengan meningkatnya permintaan masyarakat selama Ramadhan dan menjelang Idulfitri, yang secara musiman mendorong konsumsi bahan pangan. Selain faktor permintaan, dinamika pasokan akibat faktor cuaca, distribusi, serta siklus produksi beberapa komoditas pangan turut memengaruhi perkembangan harga pada periode tersebut. Di sisi lain, inflasi inti yang mencerminkan tekanan harga yang lebih fundamental dan berkaitan erat dengan kondisi permintaan domestik tercatat sebesar 2,52% (yoy), sedikit melandai dibandingkan 2,63% (yoy) pada bulan sebelumnya. Inflasi inti terutama didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan, biaya pendidikan, dan sewa rumah.

Selain dari sisi konsumen, dinamika harga juga tercermin pada tingkat produsen sebagai gambaran tekanan di sisi hulu. Dari sisi produksi, inflasi di tingkat produsen (PPI) pada Maret 2026 yang diukur melalui Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) tercatat tumbuh sebesar 2,28% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan 2,41% (yoy) pada bulan sebelumnya namun meningkat dibandingkan 1,58% (yoy) pada periode yang sama tahun lalu. Kenaikan IHPB tertinggi terjadi pada Seksi Hasil Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yakni sebesar 3,71% (yoy). Peningkatan harga pada kelompok ini antara lain dipicu oleh

komoditas beras biasa, daging ayam ras, jagung, dan SKM (rokok/sigaret kretek mesin). Tekanan harga di tingkat produsen tersebut diduga berkaitan dengan meningkatnya biaya produksi yang mencakup kenaikan harga bahan baku, penyesuaian upah tenaga kerja, serta meningkatnya biaya energi. Khusus di sektor pertanian, faktor musiman, gangguan cuaca, serta fluktuasi permintaan domestik maupun global ditengarai turut memperkuat tekanan harga, sehingga ketersediaan pasokan sejumlah komoditas menjadi lebih terbatas. Kenaikan IHPB yang bersumber dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berpotensi memberikan tekanan lanjutan terhadap inflasi konsumen (IHK), terutama pada kelompok harga bergejolak (*volatile food*). Namun demikian, transmisi kenaikan harga dari tingkat produsen ke tingkat konsumen biasanya terjadi dengan jeda waktu (*lag*) waktu tertentu, sehingga dampaknya terhadap harga ritel diperkirakan baru akan terlihat dalam beberapa bulan kemudian. Secara keseluruhan tekanan inflasi yang masih terkendali menunjukkan bahwa penguatan permintaan domestik belum menimbulkan tekanan berlebih terhadap perkembangan harga.

Kondisi ini sekaligus mencerminkan ekspektasi inflasi yang tetap terjaga, didukung oleh keseimbangan antara sisi permintaan dan penawaran yang relatif baik di tengah dinamika tantangan ekonomi global dan domestik. Stabilitas tersebut juga menunjukkan efektivitas bauran kebijakan yang ditempuh, baik dari sisi moneter, fiskal, maupun pengendalian

pasokan yang menjaga ketersediaan komoditas strategis. Sinergi kebijakan ini berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat serta menopang keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Dalam kaitan tersebut, terjaganya stabilitas inflasi dan ekspektasi harga dapat memberikan ruang bagi otoritas moneter untuk menjaga konsistensi arah kebijakan, salah satunya melalui penetapan suku bunga acuan. Pada Maret 2026, Bank Indonesia masih mempertahankan BI-Rate pada level 4,75%. Selaras dengan itu, suku bunga *Deposit Facility* tetap sebesar 3,75%, dan suku bunga *Lending Facility* berada pada level 5,50%. Keputusan tersebut mencerminkan *stance* kebijakan yang berhati-hati (*prudent*), dengan tetap mengedepankan stabilitas di tengah ketidakpastian global, sekaligus menjaga ruang bagi perekonomian domestik untuk terus tumbuh.

2 Kinerja Industri Perbankan Nasional

Halaman ini sengaja dikosongkan

2 Kinerja Industri Perbankan Nasional

Secara umum ketahanan perbankan pada triwulan I-2026 cukup terjaga, tecermin dari tingkat permodalan bank yang cukup solid dan ditopang ketersediaan likuiditas yang memadai. Fungsi intermediasi perbankan masih cukup baik ditandai dengan kredit dan DPK bank umum yang masih tumbuh. Rentabilitas dan efisiensi perbankan juga masih terjaga meskipun menurun dari tahun sebelumnya.

Kinerja Bank Umum

Secara umum ketahanan perbankan pada triwulan I-2026 terjaga baik, tecermin dari tingkat permodalan bank yang solid dan ditopang ketersediaan likuiditas yang memadai dengan rasio AL/NCD dan AL/DPK tercatat jauh di atas *threshold* dan mengalami peningkatan, seiring dengan penghimpunan dana yang tumbuh melebihi penyaluran kredit. Di sisi lain, hal ini juga menggambarkan fungsi intermediasi perbankan yang sedikit menurun, akibat

pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dari pertumbuhan kredit. Rentabilitas perbankan juga tercatat cukup baik yang terlihat dari rasio ROA sebesar 2,47%, meskipun turun 11 bps dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, perlu diperhatikan juga terkait efisiensi perbankan yang juga tercatat menurun dibandingkan tahun sebelumnya tecermin dari BOPO yang meningkat 112 bps menjadi sebesar 86,96%.

Tabel 1 Indikator Umum Bank Umum

Indikator	2025		2026	qtq		yoy	
	Mar	Des	Mar	Des'25	Mar'26	Mar'25	Mar'26
Jumlah Bank	105	105	105	-	-	-	-
BUK	91	91	91	-	-	(1)	-
BUS	14	14	14	-	-	-	-
Total Aset (Rp Miliar)	12,726,828	13,646,417	13,904,600	3.41%	1.89%	7.17%	9.25%
BUK	12,072,331	12,849,191	13,096,918	2.67%	1.93%	7.10%	8.49%
BUS	654,498	797,226	807,682	17.08%	1.31%	8.40%	23.40%
Kredit (Rp Miliar)	7,908,425	8,585,829	8,659,053	5.18%	0.85%	9.16%	9.49%
BUK	7,486,388	8,068,113	8,128,431	4.46%	0.75%	9.03%	8.58%
BUS	422,037	517,716	530,621	17.97%	2.49%	11.53%	25.73%
DPK (Rp Miliar)	9,010,153	10,059,187	10,230,801	3.75%	1.71%	4.75%	13.55%
BUK	8,512,501	9,419,949	9,597,458	2.94%	1.88%	4.78%	12.75%
BUS	497,652	639,238	633,343	17.33%	-0.92%	4.24%	27.27%
- Giro (Rp Miliar)	2,770,539	3,277,832	3,362,581	5.81%	2.59%	4.01%	21.37%
BUK	2,689,247	3,152,240	3,230,166	4.80%	2.47%	4.17%	20.11%
BUS	81,292	125,592	132,415	39.96%	5.43%	-1.26%	62.89%
- Tabungan (Rp Miliar)	2,901,841	3,083,780	3,144,430	4.78%	1.97%	7.74%	8.36%
BUK	2,710,216	2,854,226	2,915,857	4.01%	2.16%	7.65%	7.59%
BUS	191,625	229,554	228,573	15.36%	-0.43%	8.96%	19.28%
- Deposito (Rp Miliar)	3,337,773	3,697,575	3,723,790	1.18%	0.71%	2.89%	11.57%
BUK	3,113,037	3,413,483	3,451,435	0.44%	1.11%	2.92%	10.87%
BUS	224,736	284,092	272,355	10.94%	-4.13%	2.53%	21.19%

Sumber: SPI dan Portal Data

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam basis point (bps)

1.1 Aset Bank Umum

Aset Bank Umum tumbuh 9,25% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 7,17% (yoy). Berdasarkan jenis usaha bank, baik aset BUK maupun BUS sama-sama tumbuh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. BUK tercatat tumbuh 8,49% (yoy) meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 7,10% (yoy), selanjutnya BUS tercatat tumbuh 23,40% (yoy) yang juga meningkat dari 8,40% (yoy) pada tahun sebelumnya. Peningkatan pertumbuhan aset bank umum secara umum sejalan dengan peningkatan pertumbuhan DPK bank umum pada periode laporan.

Sebagian besar aset bank umum merupakan aset BUK dengan porsi 94,19%, sementara itu aset BUS memiliki porsi 5,81%. Meskipun masih cukup kecil, porsi aset BUS tersebut sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,14%.

Pada periode laporan, BUMN, yang merupakan kelompok Bank dengan porsi terbesar (47,13%), tercatat tumbuh 20,94% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8,44% (yoy). Kelompok bank terbesar kedua, BUSN (porsi 40,93%) menurun -0,10% (yoy) dibanding tahun sebelumnya yang dapat tumbuh sebesar 7,08% (yoy). Selanjutnya, kelompok bank

BPD (porsi 7,45%) tumbuh 3,20% (yoy) sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 3,23% (yoy).

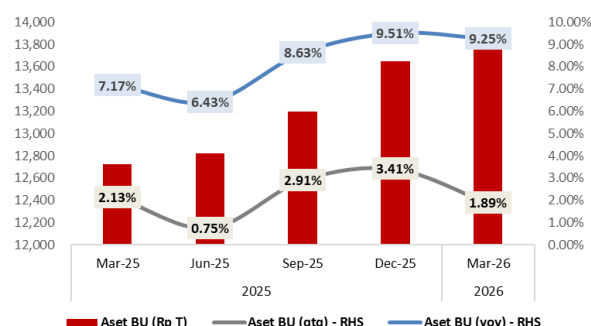
Aset perbankan Indonesia masih terkonsentrasi pada beberapa bank. Total aset empat Bank Umum terbesar mencapai 52,03% atau melebihi setengah dari aset perbankan Indonesia, sedangkan total aset 20 Bank Umum terbesar mencapai 79,74% dari aset perbankan.

Tabel 2 Tingkat Konsentrasi Aset Bank Umum

Periode	Aset	
	CR4 %	CR20 %
Mar-25	50.62%	79.85%
Jun-25	50.88%	79.81%
Sep-25	50.47%	79.31%
Dec-25	51.38%	79.52%
Mar-26	52.03%	79.74%

Sumber: OJK

Grafik 13 Perkembangan Aset Bank Umum



Sumber: SPI dan Portal Data

Tabel 3 Perkembangan Aset Bank Umum berdasarkan Kelompok Kepemilikan

Kelompok Bank	Nominal (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Mar '25	Des '25	Mar '26		Des '25	Mar '26	Mar '25	Mar '26
BUMN	5,419,230	5,924,340	6,553,833	47.13%	4.52%	10.63%	8.44%	20.94%
BUSN	5,697,320	6,071,334	5,691,602	40.93%	4.11%	-6.25%	7.08%	-0.10%
BPD	1,004,350	1,063,582	1,036,508	7.45%	-0.53%	-2.55%	3.23%	3.20%
KCBLN	605,920	587,161	622,656	4.48%	-6.32%	6.05%	3.57%	2.76%
Total	12,726,820	13,646,417	13,904,599	100%	3.41%	1.89%	7.17%	9.25%

Sumber: SPI dan Portal Data

1.2 Sumber Dana Bank Umum

Pada periode laporan, DPK Bank Umum tumbuh 13,55% (yoy), naik dibanding tahun sebelumnya sebesar 4,75% (yoy). Berdasarkan jenis usaha, DPK tercatat naik baik pada BUK maupun BUS. DPK BUK pada bulan laporan tumbuh 12,75% (yoy) dari 4,78% (yoy) pada Mar-25, atau meningkat Rp1.084,96 triliun.

Peningkatan pertumbuhan DPK utamanya didorong oleh pertumbuhan komponen Giro dan Deposito yang cukup tinggi. Giro (porsi 32,87%) tumbuh 21,37% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 4,01% (yoy). Deposito yang merupakan komponen terbesar DPK (porsi 36,40%) tumbuh 11,57% (yoy) dari tahun sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar 2,89% (yoy). Selanjutnya, tabungan (porsi 30,73%) juga tumbuh 8,36% (yoy) meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 7,74% (yoy).

Grafik 14 Tren Pertumbuhan DPK per Komponen

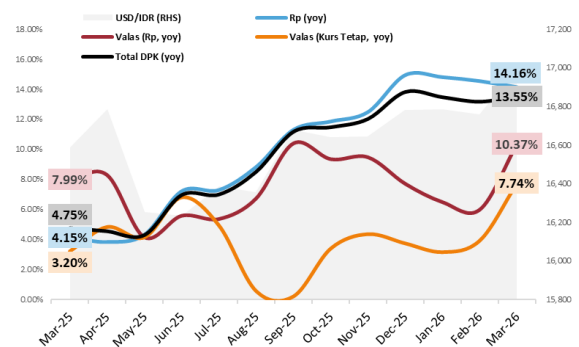


Sumber: SPI dan Portal Data

Berdasarkan valuta, DPK Rupiah yang juga merupakan komponen dengan porsi terbesar (84,25%) tercatat tumbuh 14,16%

(yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 4,15% (yoy). Selanjutnya, DPK Valas juga tercatat tumbuh 10,37% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 7,99% (yoy). Jika menggunakan kurs tetap, DPK Valas tercatat tumbuh 7,74% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 3,20% (yoy). Hal tersebut menandakan bahwa secara umum pertumbuhan DPK Valas meningkat, di tengah kurs Rupiah yang terdepresiasi pada periode laporan.

Grafik 15 Pergerakan DPK Berdasarkan Valuta



Sumber: SPI dan Portal Data

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar DPK terdapat pada kelompok Bank BUMN sebesar 49,34%, diikuti BUSN sebesar 40,22%. DPK BUMN tumbuh 17,09% (yoy) meningkat dari tahun sebelumnya 14,28% (yoy). Sejalan dengan pertumbuhan pada BUMN, DPK BUSN juga tumbuh 3,10% (yoy) meskipun lebih rendah dari tahun sebelumnya yang tumbuh 4,43% (yoy).

Tabel 4 DPK Bank Umum berdasarkan Kelompok Kepemilikan Bank

Kelompok Bank	Nominal (Rp M)			Porsi (%)	yoy			
	Mar '25	Des '25	Mar '26		qtq		yoy	
BUMN	4,310,672	4,916,578	5,047,503	49.34	14.28%	2.66%	14.28%	17.09%
BUSN	3,991,328	4,090,891	4,115,240	40.22	-4.45%	0.60%	4.43%	3.10%
BPD	746,676	792,242	782,042	7.64	-5.70%	-1.29%	-0.75%	4.74%
KCBLN	252,413	259,476	286,024	2.80	-4.45%	10.23%	-0.98%	13.32%
Total	9,010,153	10,059,186	10,230,808	100	3.75%	1.71%	4.75%	13.55%

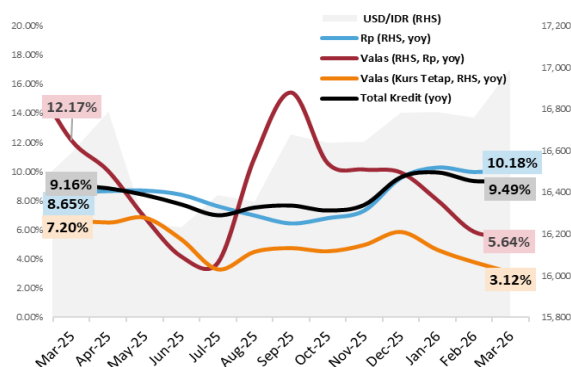
Sumber: SPI dan Portal Data

1.3 Penggunaan Dana Bank Umum

Kredit Bank Umum tumbuh 9,49% (yoy), meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 9,16% (yoy). Berdasarkan jenis usaha, kredit BUK (porsi 93,87%) tumbuh 8,58% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 9,03% (yoy). Sementara itu, pembiayaan BUS tumbuh hingga sebesar 25,73% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 11,53% (yoy), meskipun dengan porsi relatif kecil (6,13%).

Berdasarkan valuta, kredit kepada pihak ketiga bukan bank didominasi dalam bentuk rupiah dengan porsi 85,45%, sedangkan kredit valas sebesar 14,55%. Secara umum, melambatnya pertumbuhan kredit disebabkan oleh pertumbuhan kredit valas yang tumbuh 5,64% (yoy) melambat dari 12,17% (yoy) pada tahun sebelumnya. Jika menggunakan kurs tetap, kredit valas hanya tercatat tumbuh 3,12% (yoy) dari tahun sebelumnya yang tumbuh 7,20% (yoy). Di sisi lain, kredit Rupiah tercatat tumbuh 10,18% (yoy) dari 8,65% (yoy) (Grafik 18).

Grafik 16 Kredit per Valuta

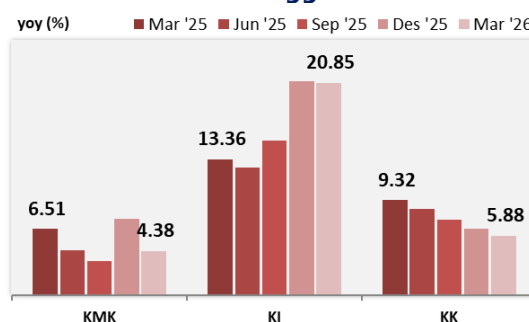


Sumber: SPI dan Portal Data

Berdasarkan jenis penggunaan, porsi kredit didominasi kredit produktif (73,52%), yang terdiri dari kredit modal kerja (KMK) dengan

porsi sebesar 42,03% dan kredit investasi (KI) sebesar 31,49%, sedangkan kredit konsumsi (KK) sebesar 26,48%. Secara umum, KI mencatat pertumbuhan tertinggi yang mendorong pertumbuhan kredit. KI tercatat tumbuh 20,85% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 13,36% (yoy). Sedangkan KMK dan KK cenderung melambat, yaitu menjadi 4,38% dan 5,88% setelah Maret tahun sebelumnya mampu tumbuh masing-masing 6,51% dan 9,32%.

Grafik 17 Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: SPI dan Portal Data

1.4 Rentabilitas Bank Umum

Pada Maret 2026, rentabilitas Bank Umum tercatat menurun ditandai dengan ROA yang turun 11 bps menjadi sebesar 2,47% dari 2,58% pada tahun sebelumnya. Penurunan ROA disebabkan oleh pertumbuhan laba yang lebih rendah daripada pertumbuhan total aset. Adapun laba pada bulan laporan tumbuh sebesar 5,06% (yoy) melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 5,19% (yoy). Sementara itu total aset tumbuh 9,75% (yoy) lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,74% (yoy).

Dari sisi margin, NIM bulan Maret 2026 tercatat turun 13 bps menjadi sebesar 4,38% dari 4,51% pada tahun sebelumnya. Penurunan NIM seiring dengan pertumbuhan bunga bersih sebesar 4,60%,

yoy (Mar-25: 4,30%), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan rata-rata *earning asset* sebesar 7,63% (yoy).

Selain itu, efisiensi Bank Umum tercatat menurun (yoy) tecermin dari rasio BOPO perbankan yang meningkat 112 bps dari 85,84% menjadi 86,96%.

Selanjutnya, CIR tercatat 77,73% pada Maret 2026 turun dari 78,32% pada Maret 2025. Penurunan CIR tersebut disebabkan oleh beban operasional selain beban bunga yang tumbuh 3,48% (yoy) lebih rendah dari tahun sebelumnya. Secara umum rasio CIR sebesar 77,73% mencerminkan tingkat efisiensi bank umum yang masih cukup baik.

1.5 Permodalan Bank Umum

Secara umum pada periode Maret 2026, kondisi permodalan perbankan masih relatif

solid meski menurun, yaitu tecermin dari nilai CAR sebesar 25,09% yang turun 29 bps dari tahun lalu sebesar 25,38%. Penurunan nilai CAR tersebut disebabkan oleh peningkatan ATMR yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan modal, utamanya pada peningkatan ATMR Kredit.

Pertumbuhan ATMR masih didorong oleh pertumbuhan ATMR kredit (porsi 89,42%) yang tumbuh 7,98% (yoy) meskipun melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 9,61% (yoy). Selain itu, ATMR Operasional juga masih tumbuh 8,77% (yoy) melampaui tahun sebelumnya yang tumbuh 6,96% (yoy). Sementara itu, modal tumbuh 7,21% (yoy) meningkat dari tahun lalu yang tumbuh 6,66% (yoy).

Tabel 5 Rasio Keuangan Bank Umum

Indikator	2025		2026		qtq		yoy	
	Mar	Des	Mar	Des'25	Mar'26	Mar'25	Mar'26	
CAR (%)	25.38	25.87	25.09	(28)	(78)	(58)	(29)	
BUK	25.39	25.91	25.07	(32)	(84)	(59)	(32)	
BUS	25.08	25.07	25.35	45	28	(58)	27	
ROA (%)	2.58	2.53	2.47	-	(6)	(4)	(11)	
BUK	2.61	2.56	2.50	0	(6)	(4)	(11)	
BUS	2.07	2.02	2.07	(2)	5	4	-	
NIM / NOM (%)	4.51	4.56	4.38	(2)	(18)	(8)	(13)	
BUK	4.60	4.67	4.49	(2)	(18)	(8)	(11)	
BUS	2.72	2.45	2.43	(1)	(2)	(1)	(29)	
BOPO (%)	85.84	87.26	86.96	(10)	(30)	579	112	
BUK	86.09	87.45	87.21	(10)	(24)	593	112	
BUS	76.36	80.88	79.45	36	(143)	(53)	309	
NPL / NPF Gross (%)	2.17	2.05	2.14	(19)	9	(8)	(3)	
BUK	2.17	2.04	2.13	(20)	9	(10)	(4)	
BUS	2.16	2.19	2.29	-	10	12	13	
NPL / NPF Net (%)	0.80	0.79	0.83	(8)	4	3	3	
BUK	0.80	0.79	0.83	(8)	4	2	3	
BUS	0.79	0.77	0.82	(10)	5	15	3	
LDR / FDR (%)	87.77	85.35	84.64	116	(71)	354	(313)	
BUK	87.95	85.65	84.69	124	(96)	343	(326)	
BUS	84.81	80.99	83.78	44	279	555	(103)	
AL/DPK (%)	26.22	28.57	27.85	(73)	(72)	(96)	163	
BUK	26.05	28.47	27.72	(82)	(75)	(98)	167	
BUS	29.05	30.01	29.83	49	(18)	(71)	78	
AL/NCD (%)	116.05	126.15	122.55	(432)	(360)	(500)	650	
BUK	114.84	125.15	121.51	(462)	(364)	(502)	667	
BUS	138.55	142.13	139.40	(115)	(273)	(441)	85	

Sumber: SPI dan Portal Data

Tabel 6 Rasio Permodalan dan Rentabilitas Bank Umum

Rasio	KBMI 1			KBMI 2		
	Mar '25	Des '25	Mar '26	Mar '25	Des '25	Mar '26
CAR	30.15%	30.91%	30.54%	36.82%	41.29%	39.15%
ROA	1.58%	1.39%	1.52%	1.93%	2.07%	1.91%
BOPO	87.78%	91.52%	91.28%	94.09%	94.31%	93.07%
NIM	4.77%	4.26%	4.20%	4.21%	4.88%	4.57%

Rasio	KBMI 3			KBMI 4		
	Mar '25	Des '25	Mar '26	Mar '25	Des '25	Mar '26
CAR	24.67%	24.67%	24.48%	21.69%	22.31%	21.28%
ROA	1.74%	1.63%	1.62%	3.39%	3.35%	3.20%
BOPO	82.36%	90.03%	88.77%	82.61%	82.28%	83.36%
NIM	3.53%	3.60%	3.50%	5.01%	5.08%	4.79%

Sumber: SPI dan Portal Data

Tabel 7 Komponen ATMR Bank Umum

Komponen ATMR (Rp T)	Mar '25	Des '25	Mar '26	yoy		
				Mar '25	Des '25	Mar '26
ATMR Kredit	6,798	7,191	7,341	9.61%	8.31%	7.98%
ATMR Pasar	185	208	222	-1.42%	10.96%	20.09%
ATMR Operasional	595	596	647	6.96%	7.45%	8.77%
Total ATMR	7,570	7,994	8,210	9.11%	8.44%	8.46%

Sumber: OJK

Overview Kinerja BPR dan BPRS

Fungsi intermediasi BPR dan BPRS secara umum masih dalam kondisi yang cukup baik tecermin dari DPK yang masih tumbuh meningkat dan kredit/pembiayaan yang juga masih tumbuh meskipun melambat. Aset BPR dan BPRS tumbuh sebesar 3,69% (yoy), meskipun melambat dari tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan DPK BPR dan BPRS yang juga tumbuh melambat yaitu sebesar 3,16% (yoy). Kredit/pembiayaan BPR dan BPRS juga masih tumbuh 3,79% (yoy), meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 8 Rasio Keuangan BPR dan BPRS

Indikator	Nominal		qtq		yoy	
	Mar'25	Des '25	Mar '26	Des '25	Mar '26	Mar'25
Total Aset (Rp Miliar)	228,262	242,563	236,692	2.92%	-2.42%	5.32%
BPR	203,684	216,057	210,714	2.83%	-2.47%	5.00%
BPRS	24,577	26,506	25,978	3.66%	-1.99%	8.06%
Kredit/Pembiayaan (Rp milyar)	172,110	179,018	178,636	2.64%	-0.21%	6.30%
BPR	152,676	158,714	157,970	2.68%	-0.47%	5.87%
BPRS	19,434	20,305	20,665	2.31%	1.78%	9.82%
DPK (Rp Miliar)	160,418	169,686	165,490	2.58%	-2.47%	5.00%
BPR	143,785	151,516	147,530	2.39%	-2.63%	4.45%
BPRS	16,632	18,170	17,959	4.21%	-1.16%	10.01%
Tabungan	47,790	53,486	50,385	6.01%	-5.80%	5.68%
BPR	42,962	47,829	45,077	5.43%	-5.75%	5.58%
BPRS	4,827	5,658	5,308	11.18%	-6.18%	6.57%
Deposito	112,628	116,200	115,104	1.08%	-0.94%	4.71%
BPR	100,823	103,688	102,453	1.05%	-1.19%	3.97%
BPRS	11,805	12,512	12,651	1.33%	1.11%	11.48%

Sumber: OJK

2. Kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR)

Pada periode Maret 2026, BPR masih menunjukkan pertumbuhan. DPK dan penyaluran kredit tetap mampu tumbuh masing-masing sebesar 2,60% (yoy) dan 3,47% (yoy), meskipun lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Ketahanan BPR juga cukup solid didukung dengan permodalan yang masih tinggi di atas *threshold* meskipun menurun dibanding

tahun lalu. Selain itu, kinerja BPR yang membaik juga sejalan dengan adanya peningkatan laba dan efisiensi dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, di sisi lain perlu diperhatikan terdapat peningkatan risiko kredit pada periode laporan yang ditunjukkan dari NPL *gross* yang masih cukup tinggi dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 9 Indikator Umum BPR

Indikator	Nominal		qtq		yoy	
	Mar'25	Des'25	Mar'26	Des'25	Mar '25	Mar'26
Jumlah BPR	1,345	1,313	1,289	(13)	(24)	(56)
Total Aset (Rp milyar)	203,684	216,057	210,714	2.83%	-2.47%	3.45%
Kredit (Rp milyar)	152,676	158,714	157,970	2.68%	-0.47%	3.47%
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar)	143,785	151,516	147,530	2.39%	-2.63%	2.60%
- Tabungan (Rp milyar)	42,962	47,829	45,077	5.43%	-5.75%	4.92%
- Deposito (Rp milyar)	100,823	103,688	102,453	1.05%	-1.19%	1.62%
CAR (%)	31.49	28.82	28.00	(107)	(82)	(349)
ROA (%)	1.40	2.23	1.83	42	(40)	51
BOPO (%)	89.16	85.55	87.60	32	205	(219)
NPL Gross (%)	11.90	11.85	12.48	(94)	63	120
NPL Net (%)	8.29	8.49	9.04	(55)	55	96
LDR (%)	79.29	104.76	107.07	2591	231	192
CR (%)	12.44	17.93	16.47	378	(146)	(1)

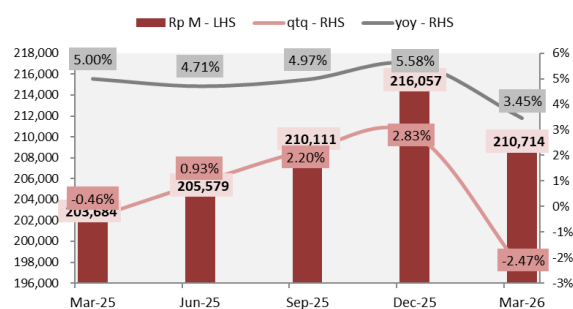
Sumber: SPI dan Portal Data

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

2.1 Aset BPR

Aset BPR pada Maret 2026 tumbuh 3,45% (yoy), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,00% (yoy). Perlambatan pertumbuhan aset tersebut sejalan dengan DPK yang juga tumbuh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Grafik 18 Perkembangan Aset BPR



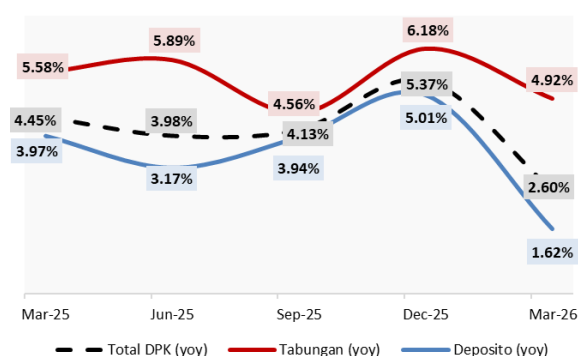
Sumber: SPI dan Portal Data

2.2 Sumber Dana BPR

DPK BPR pada Maret 2026 tumbuh 2,60% (yoy) menjadi Rp147,53 triliun, melambat dibandingkan dengan Maret 2025 yang tercatat tumbuh hingga 4,45% (yoy). Perlambatan DPK tersebut didorong oleh

komponen deposito maupun tabungan. Deposito tercatat tumbuh sebesar 1,62% (yoy) lebih rendah dari periode tahun sebelumnya yang mampu tumbuh 3,97% (yoy). Sejalan dengan deposito, komponen tabungan juga tercatat tumbuh melambat sebesar 4,92% (yoy) lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,58% (yoy).

Grafik 19 Perkembangan DPK BPR



Sumber: SPI dan Portal Data

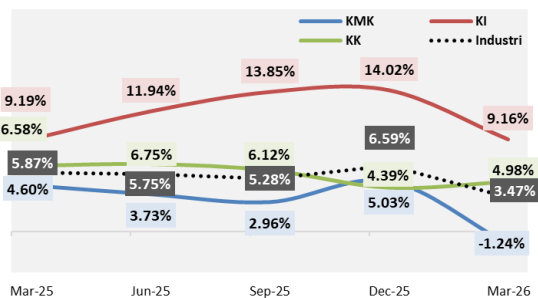
2.3 Penggunaan Dana BPR

Kredit BPR pada Maret 2026 tumbuh 3,47% (yoy), melambat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 5,87% (yoy).

Ditinjau dari jenis penggunaan, mayoritas kredit BPR disalurkan untuk kredit produktif (55,97%) yang terdiri dari KMK (46,66%) dan KI (9,31%) sedangkan sisanya untuk KK (44,03%).

Kredit BPR tumbuh pada jenis penggunaan KI dan KK. KI tumbuh 9,16% (yoy), sedikit lebih rendah dari 9,19% (yoy), dan untuk KMK tercatat terkontraksi -1,24% (yoy), turun dibandingkan Maret 2025 yang tumbuh mencapai 4,60% (yoy). Selain itu, kredit konsumtif juga masih tetap mampu tumbuh positif sebesar 4,98% (yoy) kendati masih lebih rendah dari pertumbuhan tahun sebelumnya yaitu 6,58% (yoy).

Grafik 20 Kredit BPR berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: SPI dan Portal Data

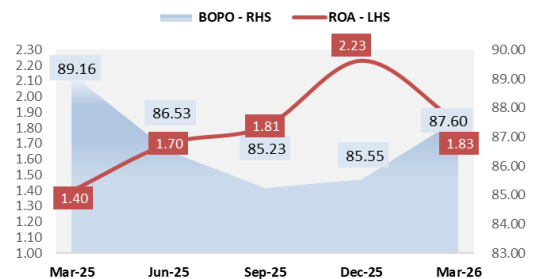
2.4 Rentabilitas BPR

Rentabilitas BPR pada Maret 2026 naik dibandingkan tahun sebelumnya, tecermin dari rasio ROA sebesar 1,83% atau naik 43

bps dibandingkan tahun sebelumnya (1,40%).

Seiring dengan peningkatan rentabilitas, efisiensi BPR juga tercatat meningkat, tecermin dari turunnya rasio BOPO sebesar 156 bps menjadi 87,60% dari 89,16% pada tahun sebelumnya. Penurunan rasio BOPO disebabkan oleh penurunan beban operasional sebesar -7,85% (yoy) yang lebih dalam dibandingkan penurunan pendapatan operasional sebesar -6,20% (yoy).

Grafik 21 Tren ROA dan BOPO BRPS



Sumber: SPI dan Portal Data

2.5 Permodalan BPR

Permodalan BPR relatif cukup solid dan memadai untuk menyerap potensi risiko yang dihadapi. Hal tersebut terlihat dari indikator CAR BPR yang tinggi sebesar 28,00% jauh di atas KPMM, meskipun menurun 349 bps dari tahun sebelumnya yang tercatat 31,49%. Penurunan CAR didorong oleh pertumbuhan ATMR yang melampaui pertumbuhan dari modal.

3. Kinerja Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)

Aset, DPK, dan pembiayaan BPRS pada Maret 2026 masih tetap tumbuh walaupun melambat dibanding tahun sebelumnya, yaitu masing-masing sebesar 5,70% (yoy), 7,98% (yoy), dan 6,34% (yoy). Namun demikian, perlu diperhatikan risiko pembiayaan BPRS tercatat meningkat

tecermin dari adanya peningkatan rasio NPF *gross* pada periode laporan. Rentabilitas dan efisiensi BPRS tercatat jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya, namun ketahanan BPRS masih terjaga yang tecermin pada permodalan yang masih cukup baik.

Tabel 10 Indikator Umum BPRS

Indikator	Nominal		qtq			yoy	
	Mar '25	Des '25	Mar '26	Des '25	Mar '26	Mar '25	Mar '26
Total Aset (Rp Miliar)	24,577	26,505.93	25,977.68	3.66%	-1.99%	8.06%	5.70%
Pembiayaan (Rp Miliar)	19,434	20,304.67	20,665.19	2.31%	1.78%	9.82%	6.34%
Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar)	16,632	18,170	17,959	4.21%	-1.16%	10.01%	7.98%
- Tabungan iB (Rp Miliar)	4,827	5,658	5,308	11.18%	-6.18%	6.57%	9.96%
- Deposito iB (Rp Miliar)	11,805	12,512	12,651	1.33%	1.11%	11.48%	7.16%
CAR (%)	24.47	19.73	20.45	(27)	72	90	(402)
ROA (%)	1.86	0.25	0.12	(72)	(13)	23	(174)
BOPO (%)	93.43	97.94	97.94	276	0	(39)	451
NPF Gross (%)	8.83	10.23	11.78	(64)	155	139	295
FDR (%)	116.85	111.74	115.06	(207)	332	(19)	(179)

Sumber: SPI dan Portal Data

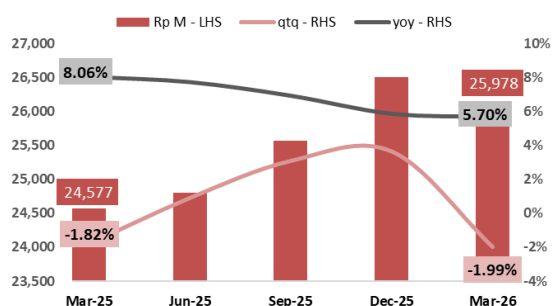
Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

3.1 Aset BPRS

Pada Maret 2026, aset BPRS tercatat sebesar Rp25,97 triliun atau tumbuh 5,70% (yoy), melambat dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,06% (yoy).

Sebagian besar BPRS memiliki total aset >Rp10 Miliar (168 BPRS dari 174 BPRS). Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya di mana jumlah BPRS dengan total aset pada kelompok ini sebanyak 167 BPRS.

Grafik 22 Tren Aset BPRS



Sumber: SPI dan Portal Data

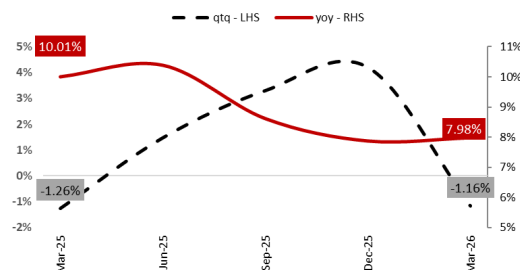
3.2 Sumber Dana BPRS

Sumber dana BPRS didominasi oleh DPK sebesar Rp17,95 triliun. Pada Maret 2026, DPK BPRS tumbuh 7,98% (yoy), melambat

dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 10,01% (yoy).

Berdasarkan komposisi, porsi DPK BPRS terbesar berada pada deposito iB dengan porsi 70,44%. Secara keseluruhan deposito iB BPRS masih tercatat tumbuh 7,16% (yoy), melambat dibandingkan dengan tahun lalu yang tumbuh 11,48% (yoy). Perlambatan terbesar berada pada deposito iB untuk tenor 12 bulan yang melambat sebesar 5,82% dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 34,49%. Di sisi lain, tabungan iB BPRS tumbuh 9,96% (yoy), meningkat dari tahun lalu yang tumbuh 6,57% (yoy).

Grafik 23 Tren Pertumbuhan DPK BPRS



Sumber: SPI dan Portal Data

3.3 Penggunaan Dana BPRS

Pada Maret 2026, pembiayaan BPRS mencapai Rp20,66 triliun, tumbuh sebesar 6,34% (yoy) melambat dari periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tumbuh 9,82% (yoy).

Pembiayaan BPRS utamanya masih disalurkan dalam bentuk piutang murabahah (49,48%) dan pembiayaan musyarakah (32,75%).

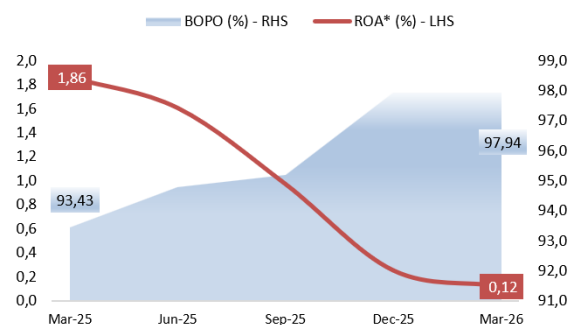
Berdasarkan sektor ekonomi, pembiayaan BPRS mayoritas disalurkan ke sektor konstruksi (20,42%) dan jasa dunia usaha (12,38%). Pembiayaan ke sektor konstruksi tercatat tumbuh 20,08% (yoy), meskipun masih tumbuh tinggi namun melambat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh mencapai 24,55% (yoy). Sementara itu, sektor jasa dunia usaha berkontraksi -3,05% (yoy), di mana tahun sebelumnya tumbuh tinggi sebesar 29,87% (yoy).

Berdasarkan jenis penggunaan, pembiayaan BPRS didominasi pembiayaan produktif sebesar 58,04% di mana pembiayaan modal kerja (porsi 47,06%) berkontraksi sebesar -0,19% (yoy), menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang dapat tumbuh 15,69% (yoy). Di sisi lain, pembiayaan investasi tercatat mengalami pertumbuhan mencapai dua digit sebesar 17,71% (yoy) dibandingkan tahun lalu yang berkontraksi -1,98% (yoy), meskipun dengan porsi yang kecil (10,98% dari total pembiayaan BPRS). Pembiayaan konsumtif meningkat, tumbuh 11,70% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 6,24% (yoy).

3.4 Rentabilitas BPRS

Pada periode laporan, rentabilitas BPRS mengalami penurunan yang tecermin dari rasio ROA turun 174 bps menjadi 0,12% dari 1,86% pada tahun sebelumnya seiring dengan laba BPRS yang berkontraksi -89,9% (yoy) melanjutkan tren penurunan dari tahun sebelumnya yang berkontraksi -9,12% (yoy). Sejalan dengan penurunan rentabilitas, efisiensi BPRS juga mengalami penurunan tecermin dari rasio BOPO yang naik 451 bps menjadi 97,94%.

Grafik 24 Tren ROA dan BOPO BPRS



***) Data masih dalam tahap konfirmasi**

Sumber: SPI dan Portal Data

3.5 Permodalan BPRS

Permodalan BPRS masih cukup solid dengan CAR sebesar 20,45%, meskipun turun 402 bps dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 24,47%. Penurunan CAR didorong oleh ATMR BPRS yang tumbuh 119,23% (yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan modal BPRS yang tumbuh 83,18% (yoy). CAR BPRS tersebut masih cukup tinggi untuk dapat menyerap potensi risiko yang dihadapi BPRS, atau masih jauh di atas *threshold*.

Halaman ini sengaja dikosongkan

3 Penyaluran Kredit/Pembiayaan Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

3 Kredit/Pembiayaan Perbankan

Pada triwulan I-2026, perkembangan kredit/pembiayaan perbankan (Bank Umum) masih cukup baik didorong oleh aktivitas usaha yang masih berada pada level ekspansif. Dilihat dari kenaikan nominal kredit secara tahunan, kredit/pembiayaan Bank Umum pada periode ini utamanya didorong oleh sektor industri pengolahan, konstruksi, serta real estat. Sementara pada BPR dan BPRS kredit/pembiayaan mengalami perlambatan utamanya pada sektor bukan lapangan usaha – lainnya dan konstruksi namun sektor bukan lapangan usaha – lainnya tumbuh relatif tinggi menahan perlambatan yang semakin dalam.

A. Kredit/Pembiayaan Bank Umum (BUK dan BUS)

1. Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi

Penyaluran kredit/pembiayaan Bank Umum (selanjutnya disebut kredit) pada triwulan I-2026 masih tumbuh baik sebesar 9,49% (yoy), meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 9,16% (yoy). Secara triwulanan, kredit tumbuh 0,85% (qtq), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,18% (qtq). Pertumbuhan kredit secara tahunan utamanya didorong oleh meningkatnya penyaluran kredit kepada debitur korporasi.

Porsi terbesar penyaluran kredit bank umum masih kepada non-lapangan usaha sektor rumah tangga (porsi: 26,48%). Penyaluran kredit pada sektor ini tumbuh 5,88% (yoy), meskipun melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 9,32% (yoy). Melambatnya pertumbuhan kredit pada sektor ini didorong oleh sub sektor rumah tangga keperluan rumah tangga lainnya yang tumbuh 8,28% melambat dari 9,90% (yoy) pada tahun sebelumnya. Selanjutnya, perlambatan pada sektor rumah tangga juga didorong oleh sub sektor rumah tangga untuk pemilikan rumah tinggal tipe 22 s.d. 70 yang tumbuh 5,85%

(yoy) melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 16,39% (yoy). Kredit kepemilikan rumah tangga untuk pemilikan rumah tinggal tipe di atas 70 juga tumbuh 4,07% (yoy) melambat dari sebelumnya tumbuh sebesar 11,77% (yoy) pada Maret 2025. Lebih lanjut, kredit rumah tinggal s.d. tipe 21 tercatat berkontraksi sebesar -9,03% (yoy), setelah pada tahun sebelumnya tumbuh hingga 82,38% (yoy). Adapun subsektor rumah tangga untuk pemilikan apartemen tumbuh 0,26% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 8,07% (yoy).

Sebaliknya, kredit untuk pemilikan ruko atau rukan tumbuh sebesar 2,83% (yoy) setelah tahun sebelumnya berkontraksi hingga -58,23% (yoy) pada Maret 2025. Di sisi lain, kredit untuk pemilikan kendaraan bermotor berkontraksi -9,26% (yoy), dibandingkan Maret 2025 yang tumbuh 6,01% (yoy). Hal ini ikut menarik ke bawah pertumbuhan kredit konsumtif pada Maret 2026.

Sementara itu untuk kredit produktif, sektor ekonomi dengan porsi penyaluran kredit terbesar yaitu sektor industri pengolahan

(porsi 15,29%) tumbuh 7,96% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 8,78% (yoy). Melambatnya pertumbuhan kredit pada sektor ini didorong oleh subsektor industri makanan yang tumbuh sebesar 5,93% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 14,89% (yoy).

Sektor ekonomi dengan porsi penyaluran kredit kedua terbesar yaitu sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (porsi 14,25%) yang juga tercatat tumbuh melambat. Pertumbuhan penyaluran kredit ke sektor ini tumbuh 2,11% (yoy), melambat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 2,38% (yoy). Melambatnya pertumbuhan pada sektor ini utamanya diakibatkan oleh subsektor perdagangan eceran bukan mobil dan motor yang berkontraksi -4,48% (yoy), lebih dalam dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar -0,21% (yoy). Selain itu, subsektor perdagangan, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor juga berkontraksi -1,93% (yoy), setelah tahun sebelumnya berkontraksi sebesar -1,91% (yoy).

Sektor konstruksi (porsi 6,60%) tumbuh sebesar 46,67% (yoy), jauh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berkontraksi sebesar -0,03% (yoy) dan menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit agregat. Tumbuhnya kredit pada sektor ini didorong oleh subsektor penyelesaian konstruksi bangunan yang tumbuh sangat tinggi mencapai 2.376,00% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berkontraksi -3,49% (yoy). Selain itu, subsektor konstruksi khusus lainnya tumbuh 248,22% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang berkontraksi -4,30%

(yoy) dan subsektor konstruksi gedung lainnya yang tumbuh 152,32% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,11% (yoy).

Kredit yang disalurkan ke sektor pertanian, kehutanan dan perikanan juga masih cukup besar dengan porsi 6,56% dari total penyaluran kredit perbankan. Kredit ke sektor ini tumbuh 3,22% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 4,83% (yoy). Melambatnya pertumbuhan kredit pada sektor ini didorong oleh subsektor perkebunan buah kelapa sawit yang tumbuh sebesar 3,73% (yoy), dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,74% (yoy) serta subsektor jasa penunjang pasca panen yang berkontraksi -36,91% (yoy), dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,65% (yoy). Selanjutnya subsektor pembibitan dan budidaya sapi potong berkontraksi -13,71% (yoy) dari tahun sebelumnya yang juga berkontraksi -3,18% (yoy).

Penyaluran kredit ke aktivitas keuangan dan asuransi juga memiliki porsi yang cukup besar (5,66%). Sektor ini tercatat tumbuh lebih rendah pada periode laporan, yaitu 9,18% (yoy) menurun dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,41% (yoy). Melambatnya pertumbuhan di sektor aktivitas keuangan dan asuransi didorong oleh subsektor aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi dan dana pensiun yang tumbuh 7,71% (yoy), menurun setelah tahun sebelumnya tumbuh sebesar 8,92% (yoy).

Selain itu, sektor pertambangan dan penggalan dengan porsi 4,81% juga tumbuh melambat. Sektor ini tumbuh 8,18% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan pada tahun

lalu yang tumbuh 25,66% (yoy). Adapun subsektor yang mendorong perlambatan pertumbuhan kredit pada sektor pertambangan dan penggalian antara lain subsektor pertambangan minyak bumi dan gas alam yang berkontraksi -30,16% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,17%. Selain itu subsektor pertambangan bijih nikel juga mengalami kontraksi sebesar

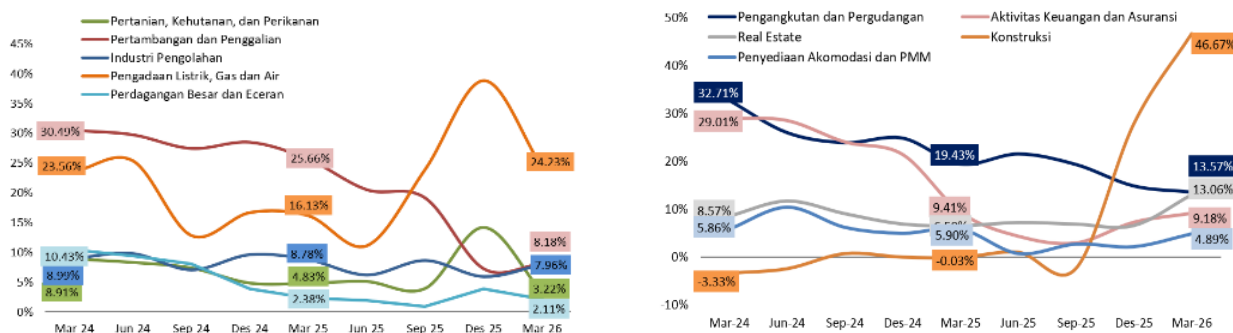
-14,60% jika dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh mencapai 59,06%. Subsektor pertambangan batubara dan lignit tumbuh melambat sebesar 11,55% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh mencapai 37,83% (yoy).

Tabel 11 Konsentrasi dan Pertumbuhan Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi

No	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp T)		qtq		yoy		Porsi
		Mar '25	Des '25	Mar '26	Des '25	Mar '26	Mar '25	
	Lapangan Usaha / Sektor Produktif	5.742,86	6.306,46	6.366,10	6,41%	0,95%	9,10%	73,52%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	550,16	620,78	567,85	10,93%	-8,53%	4,83%	6,56%
2	Pertambangan dan Penggalian	385,04	399,43	416,55	-1,64%	4,29%	25,66%	4,81%
3	Industri Pengolahan	1.226,22	1.295,10	1.323,84	3,05%	2,22%	8,78%	15,29%
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	210,34	286,40		22,88%	-8,76%	16,13%	3,02%
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	17,58	14,60	15,04	-19,50%	3,05%	57,68%	0,17%
6	Konstruksi	389,94	505,22	571,91	28,43%	13,20%	-0,03%	46,67%
7	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	1.208,43	1.244,64	1.233,99	1,67%	-0,86%	2,38%	14,25%
8	Pengangkutan dan Pergudangan	278,09	313,23	315,84	4,11%	0,83%	19,43%	3,65%
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	137,55	140,37		0,30%	2,78%	5,90%	1,67%
10	Informasi dan Komunikasi	186,80	209,89	205,16	4,16%	-2,26%	7,33%	2,37%
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	449,14	481,85	490,39	9,09%	1,77%	9,41%	5,66%
12	Real Estat	235,16	254,35	265,88	3,15%	4,53%	6,58%	3,07%
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	34,02	53,14	55,31	32,23%	4,07%	4,91%	0,64%
14	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha	94,28	95,53		3,23%	1,74%	10,45%	1,12%
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	98,32	128,18	135,01	12,00%	5,33%	48,33%	1,56%
16	Pendidikan	18,32	20,03	20,23	3,39%	0,99%	6,81%	0,23%
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	47,07	52,47	53,33	5,3%	1,6%	24,57%	0,62%
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	8,39	9,57	9,04	13,2%	-5,5%	8,63%	0,10%
19	Aktivitas Jasa Lainnya	164,42	178,14	180,46	0,9%	1,3%	32,56%	2,08%
20	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi	3,58	3,51	3,50	-0,2%	-0,5%	-7,96%	0,04%
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan	0,01	0,02	0,01	21,0%	-10,5%	-37,95%	0,00%
	Bukan Lapangan Usaha / Sektor Konsumtif	2.165,54	2.279,37	2.292,96	1,94%	0,60%	9,32%	26,48%
22	Rumah Tangga	1.868,54	1.960,30	1.972,37	1,66%	0,62%	9,49%	22,78%
	- Pemilikan Rumah Tinggal	741,95	774,59	777,46	1,72%	0,37%	16,31%	8,98%
	- Pemilikan Flat atau Apartemen	32,02	32,45	32,10	0,50%	-1,08%	8,07%	0,37%
	- Pemilikan Ruko atau Rukan	29,29	30,49	30,12	0,17%	-1,24%	-58,23%	0,35%
	- Pemilikan Kendaraan Bermotor	142,92	132,56	129,68	-4,50%	-2,17%	6,01%	1,50%
	- Pemilikan Peralatan Rumah Tangga	23,63	29,47	29,87	6,14%	1,37%	44,54%	0,34%
	- Keperluan Rumah Tangga Lainnya	898,72	960,73	973,13	2,48%	1,29%	9,90%	11,24%
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	297,01	319,07	320,59	3,68%	0,48%	8,29%	3,70%
	Industri	7.908,41	8.585,83	8.659,05	5,18%	0,85%	9,16%	100,00%

Sumber: Portal Data OJK

Grafik 25 Tren Pertumbuhan Kredit Produktif per Sektor Ekonomi



Sumber: LBUT Desember 2025, diolah

2. Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Lokasi Proyek (Spasial)

Pada Maret 2026, distribusi penyaluran kredit/pembiayaan (selanjutnya disebut kredit) Bank Umum berdasarkan wilayah penyebaran (spasial) masih didominasi oleh Jawa dan Sumatera dengan porsi masing-masing sebesar 68,61% dan 13,48%. Di wilayah Jawa, kredit tumbuh 9,81% (yoy) meningkat dibandingkan pertumbuhan pada Maret 2025 sebesar 8,95% (yoy). Sementara itu, penyaluran kredit di wilayah Sumatera tercatat tumbuh 8,31% (yoy) melambat dari 9,68% (yoy) pada Maret 2025. Perlambatan di wilayah Sumatera mengindikasikan adanya moderasi aktivitas pembiayaan di salah satu wilayah utama perekonomian nasional, meskipun pangsa penyalurannya masih sangat dominan secara spasial.

Di wilayah Jawa, Jawa Barat menjadi provinsi dengan perlambatan pertumbuhan kredit paling signifikan dari 7,25% (yoy) pada Maret 2025 menjadi 1,35% (yoy) pada Maret 2026. Adapun kontribusi Jawa Barat terhadap total penyaluran kredit regional relatif besar dengan pangsa sekitar 17,21% dari total kredit di wilayah Jawa. Perlambatan terbesar berasal dari sektor pertambangan dan penggalian yang ditandai dengan penurunan nominal kredit sebesar Rp9,69 triliun, sehingga berkontraksi semakin dalam dari -14,34% (yoy) pada Maret 2025 menjadi -49,03% (yoy) pada Maret 2026. Selain itu, penurunan nominal kredit terlihat jelas pada sektor informasi dan komunikasi sebesar Rp6,22 triliun sehingga pertumbuhannya berkontraksi cukup dalam hingga -28,29% (yoy) dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,44 (yoy). Sektor perdagangan besar dan eceran mengalami perkembangan serupa yang ditandai dengan penurunan nominal kredit sebesar Rp4,30 triliun atau

terkontraksi -3,30% (yoy) dari yang sebelumnya tumbuh terbatas sebesar 0,45% (yoy). Tidak hanya itu, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan juga mencatatkan penurunan nominal kredit cukup signifikan sebesar Rp3,67 triliun sehingga berkontraksi semakin dalam dari -5,41% (yoy) menjadi -12,30% (yoy).

Provinsi dengan perlambatan pertumbuhan kredit terbesar berikutnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Berbeda dengan Jawa Barat, DIY memiliki pangsa penyaluran kredit yang relatif kecil di wilayah Jawa, yakni hanya sekitar 1,03%. Meskipun demikian, dinamika pertumbuhan kredit di provinsi ini menunjukkan perlambatan cukup tajam. Pada Maret 2026, kredit di DIY tumbuh 1,10% (yoy), melambat signifikan dibandingkan Maret 2025 yang tercatat sebesar 10,07% (yoy). Perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh melemahnya penyaluran kredit pada beberapa sektor utama. Penurunan nominal kredit terbesar terjadi pada sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp664,59 miliar, yang menyebabkan pertumbuhannya semakin berkontraksi dari -3,19% (yoy) pada Maret tahun sebelumnya menjadi -5,47% (yoy). Di samping itu, sektor aktivitas jasa lainnya mencatatkan penurunan nominal kredit sebesar Rp396,43 miliar sehingga memengaruhi berkontraksinya pertumbuhan kredit yang semakin dalam dari -4,50% (yoy) menjadi -14,46% (yoy). Sejalan dengan perkembangan tersebut, sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum juga mengalami penurunan nominal kredit yang cukup besar mencapai Rp286,45 miliar, sehingga pertumbuhannya turun tajam dari

4,91% (yoy) menjadi terkontraksi sebesar -6,87% (yoy).

Sementara itu, di wilayah Sumatera, Sumatera Utara menjadi provinsi dengan perlambatan pertumbuhan kredit paling signifikan dari 13,79% (yoy) menjadi 3,90% (yoy). Perlambatan tersebut menjadi cukup penting mengingat kontribusi Sumatera Utara terhadap total penyaluran kredit regional relatif besar, dengan pangsa sekitar 26,59% dari total kredit di wilayah Sumatera. Perlambatan kredit terbesar berasal dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang ditandai dengan penurunan nominal kredit sebesar Rp603,83 miliar, sehingga pertumbuhannya terkontraksi dari 18,19% (yoy) menjadi -1,15% (yoy). Selain itu, penurunan nominal kredit terlihat jelas pada sektor real estate sebesar Rp308,57 miliar yang menyebabkan pertumbuhannya turun tajam dari 57,00% (yoy) menjadi -7,93% (yoy). Provinsi dengan perlambatan kredit terbesar berikutnya adalah Lampung. Berbeda dengan Sumatera Utara yang memiliki pangsa kredit cukup dominan di wilayah Sumatera, Lampung memiliki pangsa penyaluran kredit yang relatif lebih kecil, yakni sekitar 8,11% di wilayah tersebut. Pada Maret 2026, kredit di Lampung tumbuh 5,22% (yoy), lebih rendah dibandingkan Maret 2025 yang tercatat sebesar 9,63% (yoy). Penurunan nominal kredit terbesar terjadi pada sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp465,24 miliar, yang menyebabkan pertumbuhannya terkontraksi dari 5,94% (yoy) pada Maret tahun sebelumnya menjadi -2,31% (yoy). Selain itu, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan juga mengalami penurunan nominal kredit yang cukup besar sebesar Rp258,01 miliar,

sehingga pertumbuhannya terkontraksi dari 5,50 (yoy) menjadi sebesar -1,78% (yoy).

Selain Jawa dan Sumatera, wilayah Sulawesi, dengan pangsa sekitar 5,21% terhadap total kredit nasional, juga menunjukkan perlambatan pertumbuhan kredit dari 8,90% (yoy) menjadi 7,40% (yoy). Tren ini mencerminkan melemahnya permintaan pembiayaan seiring tertahannya aktivitas ekonomi di beberapa sektor. Perlambatan di wilayah Sulawesi terutama disebabkan oleh Provinsi Sulawesi Tenggara dengan perlambatan pertumbuhan kredit paling signifikan dari 16,59% (yoy) menjadi 4,94% (yoy). Adapun provinsi ini tercatat memiliki pangsa sekitar 11,95% dari total kredit di wilayah Sulawesi. Perlambatan kredit terbesar berasal dari sektor industri pengolahan yang ditandai dengan penurunan nominal kredit sebesar Rp407,14 miliar, sehingga pertumbuhannya terkontraksi dari 38,71% (yoy) menjadi -8,15% (yoy). Selain itu, penurunan nominal kredit juga terlihat jelas pada sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp271,42 miliar, sehingga pertumbuhannya turun dari 7,11% (yoy) menjadi -3,26% (yoy).

Sementara itu, wilayah Papua dan Maluku yang memiliki pangsa sekitar 1,50% terhadap total kredit nasional mencatatkan perlambatan pertumbuhan kredit dari 11,98% (yoy) pada Maret 2025 menjadi 7,28% (yoy) pada Maret 2026. Perlambatan tersebut terutama didorong oleh provinsi Maluku Utara yang memiliki pangsa mencapai 26,07% terhadap total kredit wilayah ini, dengan penurunan nominal kredit sebesar Rp28,82 miliar dan penurunan pertumbuhan kredit yang signifikan dari 35,24% (yoy) menjadi -0,08% (yoy) pada Maret 2026. Perlambatan nominal kredit

terbesar di Maluku Utara utamanya didorong oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp1,32 triliun. Kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan kredit di sektor tersebut berkontraksi cukup dalam hingga -31,70% (yoy), setelah tahun sebelumnya tumbuh tinggi sebesar 26,75% (yoy). Selain itu, Provinsi Papua Pegunungan yang memiliki pangsa sekitar 2,64% terhadap total kredit di wilayah Papua dan Maluku juga menunjukkan penurunan kinerja penyaluran kredit. Pertumbuhan kredit di provinsi ini sebesar 4,43% (yoy) pada Maret 2026, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,62% (yoy) pada Maret 2025. Perlambatan tersebut terutama didorong oleh sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang berkontraksi cukup dalam dari 21,28% (yoy) menjadi -40,94% (yoy), sejalan dengan penurunan nominal sebesar Rp83,36 miliar.

Sebagai pembanding, terdapat dua wilayah lain yang mencatat peningkatan pertumbuhan kredit pada Maret 2026. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perlambatan masih terjadi di beberapa daerah, masih terdapat wilayah lain dengan kinerja penyaluran kredit yang menguat, seiring membaiknya aktivitas ekonomi dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan. Kondisi ini menegaskan bahwa pemulihan kredit nasional belum merata, dengan dinamika pertumbuhan yang berbeda antarwilayah. Pertama, wilayah Kalimantan yang memiliki pangsa sekitar 6,34% terhadap total kredit nasional mencatat pertumbuhan meningkat dari 5,73% (yoy) pada Maret 2025 menjadi 11,53% (yoy) pada Maret 2026. Kenaikan ini terutama ditopang oleh Provinsi Kalimantan Utara, dengan pangsa kredit sekitar 7,44% di wilayah tersebut, yang

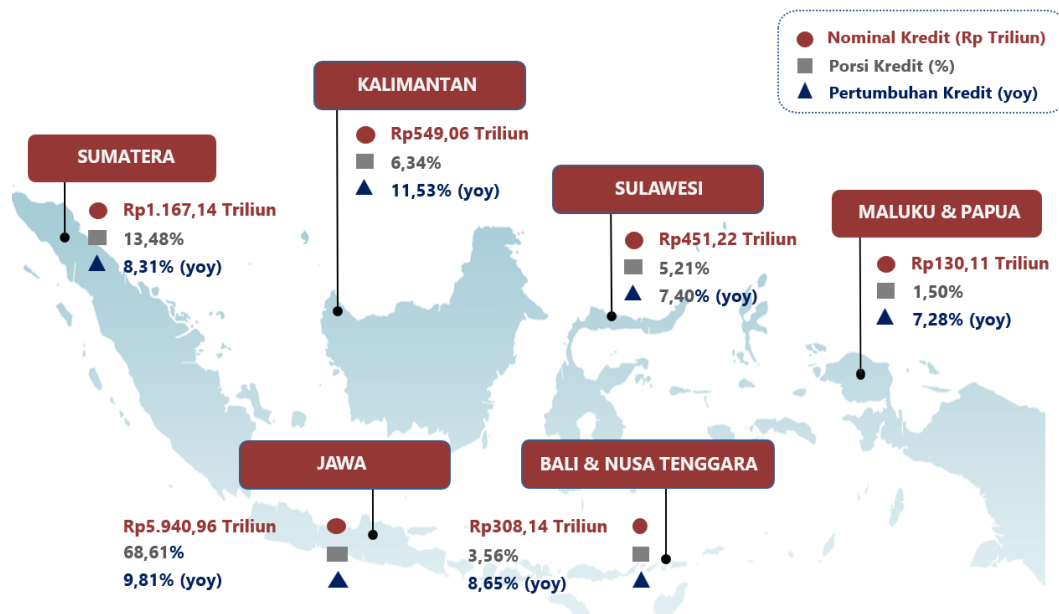
tumbuh drastis dari 26,70% (yoy) menjadi 76,33% (yoy). Lonjakan pertumbuhan kredit tersebut terjadi seiring meningkatnya nominal penyaluran kredit sebesar Rp17,67 triliun dalam setahun terakhir (yoy). Adapun peningkatan nominal kredit terbesar terjadi di sektor industri pengolahan mencapai Rp12,21 triliun, sehingga mendorong pertumbuhan sektor tersebut dari 191,11% (yoy) menjadi 215,25% (yoy). Selain itu, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin dengan kenaikan nominal kredit sebesar Rp4,41 triliun sehingga mencatatkan angka pertumbuhan sangat tinggi mencapai 297,58% (yoy) meningkat dari 206,44% (yoy) pada Maret 2025. Kontribusi lain datang dari Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki pangsa sebesar 37,40% terhadap total kredit Kalimantan. Pertumbuhan kredit di provinsi ini meningkat dari 3,03% (yoy) menjadi 9,43% (yoy), terutama didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian yang mencatat tambahan nominal kredit sebesar Rp8,09 triliun, sehingga pertumbuhannya melonjak dari -8,23% (yoy) menjadi 22,06% (yoy).

Kedua, wilayah Bali dan Nusa Tenggara yang memiliki pangsa sekitar 3,56% terhadap total kredit nasional yang tumbuh meningkat dari 8,17% (yoy) pada Maret 2025 menjadi 8,65% (yoy) pada Maret 2026. Peningkatan tersebut terutama ditopang oleh kinerja kredit di provinsi Nusa Tenggara Barat dengan pangsa 38,89% dengan kenaikan pertumbuhan dari 12,34% (yoy) menjadi 13,96% (yoy). Akselerasi kredit di provinsi ini utamanya didorong oleh sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh dari 21,42% (yoy) pada Maret 2025 menjadi 30,22% (yoy) pada Maret 2026 seiring

nominal kredit yang naik Rp12,01 triliun. Selain itu, provinsi Bali yang memiliki pangsa kredit sebesar 43,45% di wilayah tersebut turut menunjukkan peningkatan kinerja intermediasi. Pertumbuhan kredit di provinsi tersebut meningkat dari 6,75% (yoy) pada

Maret 2025 menjadi 8,44% (yoy) pada Maret 2026 utamanya didorong oleh sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum yang tumbuh dari 6,53% (yoy) pada Maret 2025 menjadi 15,99% (yoy).

Grafik 26 Persebaran Kredit/Pembiayaan Bank Umum menurut Lokasi Proyek (Spasial)



Sumber: LBUT, diolah

Tabel 12 Porsi Kredit/Pembiayaan berdasarkan Sektor Ekonomi menurut Lokasi Proyek (Spasial)

No.	Sektor Ekonomi	Porsi					
		Pulau Jawa	Pulau Sumatera	Pulau Kalimantan	Pulau Sulawesi	Bali dan Nusa Tenggara	Papua dan Maluku
Lapangan Usaha							
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,50%	15,81%	19,72%	8,04%	5,18%	10,89%
2	Pertambangan dan Penggalian	3,08%	3,32%	16,62%	6,06%	17,18%	6,82%
3	Industri Pengolahan	16,10%	18,72%	8,44%	11,76%	4,03%	9,21%
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	2,97%	3,30%	3,92%	3,72%	1,53%	1,32%
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	0,22%	0,09%	0,04%	0,09%	0,06%	0,04%
6	Konstruksi	8,47%	2,69%	3,33%	2,40%	1,71%	1,53%
7	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	14,24%	13,39%	11,36%	15,39%	17,59%	13,72%
8	Pengangkutan dan Pergudangan	4,16%	2,53%	4,82%	1,03%	0,62%	1,66%
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	1,36%	1,39%	1,27%	1,46%	9,68%	1,97%
10	Informasi dan Komunikasi	3,33%	0,49%	0,03%	0,09%	0,07%	0,30%
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	7,99%	0,28%	0,14%	0,82%	0,33%	0,46%
12	Real Estat	3,98%	1,01%	0,77%	1,09%	2,01%	0,72%
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	0,85%	0,08%	0,04%	0,53%	0,18%	0,03%
14	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	1,20%	0,77%	1,26%	1,09%	0,63%	0,86%
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,86%	0,02%	0,17%	0,01%	0,00%	0,30%
16	Pendidikan	0,26%	0,21%	0,09%	0,19%	0,24%	0,03%
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	0,66%	0,71%	0,14%	0,31%	0,93%	0,11%
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	0,14%	0,02%	0,04%	0,04%	0,07%	0,04%
19	Aktivitas Jasa Lainnya	2,37%	1,30%	1,19%	2,09%	2,04%	1,45%
20	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	0,03%	0,05%	0,02%	0,08%	0,09%	0,42%
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Bukan Lapangan Usaha Lainnya							
22	Rumah Tangga	19,98%	29,58%	25,38%	36,07%	26,83%	41,78%
23	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	3,26%	4,22%	1,20%	7,67%	9,01%	6,32%
Total		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Ket: Shading hijau menunjukkan lima sektor dengan porsi terbesar di wilayah tersebut

Sumber: LBUT, diolah

3. Perkembangan Kredit/Pembiayaan UMKM

Pada triwulan I-2026, kredit UMKM tumbuh 0,12% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 1,95% (yoy). Porsi penyaluran kredit UMKM per Maret 2026 tercatat sebesar 17,31% terhadap total kredit bank umum.

Penyaluran kredit UMKM masih terfokus pada sektor perdagangan besar dan eceran (porsi 44,24%) yang berkontraksi -4,28% (yoy), lebih dalam dari tahun sebelumnya yang berkontraksi -0,75% (yoy) sehingga mengakibatkan perlambatan pertumbuhan kredit UMKM agregat. Selain itu, sektor ekonomi dengan porsi penyaluran kredit UMKM terbesar kedua yakni pertanian, kehutanan, dan perikanan (19,72%) tercatat tumbuh sebesar 4,20% (yoy), melambat dari 5,86% (yoy) pada tahun sebelumnya.

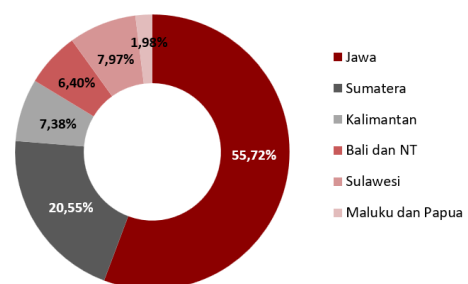
Di tengah perlambatan kredit UMKM, kualitas kredit UMKM masih terjaga dengan rasio NPL di bawah *threshold* 5% yaitu sebesar 4,60%, meskipun naik dari tahun sebelumnya sebesar 4,14%. Adapun kenaikan rasio NPL utamanya terjadi pada sektor industri pengolahan yang meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 4,63% menjadi 5,12% pada triwulan I-2026, serta sektor perdagangan besar dan eceran yang naik dari 4,49% menjadi 5,07%, dengan porsi NPL masing-masing sebesar 10,55% dan 48,81% dari total NPL UMKM. Sementara itu, terdapat perbaikan rasio NPL kredit UMKM antara lain pada sektor aktivitas keuangan dan asuransi serta real estat.

Secara spasial, sebagian besar kredit UMKM masih terpusat di wilayah Jawa dengan porsi sebesar 55,72%, terutama di provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sementara itu, porsi kredit UMKM di wilayah

Indonesia bagian tengah dan timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) sebesar 23,74%. Dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan kredit UMKM tertinggi terdapat di provinsi Kepulauan Riau sebesar 8,51% (yoy), meskipun melambat dari tahun lalu sebesar 17,16% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan kredit UMKM di Jawa Timur sebagai wilayah dengan porsi penyaluran kredit UMKM terbesar (14,90%), berkontraksi sebesar -0,96% (yoy), dibandingkan tahun sebelumnya yang masih tumbuh sebesar 3,64% (yoy).

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh kelompok bank BUMN (65,38%) dengan pertumbuhan sebesar 0,46% (yoy), lebih rendah dari tahun sebelumnya yang tumbuh 0,54% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan kredit UMKM kelompok bank BUSN tumbuh 1,25% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang sebesar 5,38% (yoy). Kredit kelompok BPD berkontraksi sebesar -1,46% (yoy), dari tahun sebelumnya tumbuh sebesar 8,01% (yoy). Di sisi lain, kelompok KCBLN masih melanjutkan tren kontraksi sebesar -80,35% (yoy), lebih dalam dibandingkan tahun sebelumnya yang berkontraksi sebesar -36,82% (yoy).

Grafik 27 Penyebaran Kredit/Pembiayaan UMKM



Sumber: Portal Data OJK

Tabel 13 Kredit/Pembiayaan UMKM berdasarkan Kelompok Bank

Kelompok Bank	Baki Debet (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Mar'25	Des'25	Mar'26		Des'25	Mar'26	Mar'25	Mar'26
BUMN	981.134	926.020	979.749	65,38%	-0,17%	5,80%	6,21%	-0,14%
BUSN	398.119	454.993	403.108	26,90%	1,04%	-11,40%	-8,60%	1,25%
BPD	117.500	120.680	115.780	7,73%	-0,54%	-4,06%	8,01%	-1,46%
KCBLN	41	41	8	0,00%	-2,41%	-80,69%	-36,82%	-80,35%
Total UMKM	1.496.794	1.501.734	1.498.644	100%	0,16%	-0,21%	1,95%	0,12%

Sumber: Portal Data OJK

B. Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS

1. Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi

Kredit/pembiayaan BPR dan BPRS (selanjutnya disebut kredit) pada triwulan I-2026 tumbuh 2,83% (yoy), melambat dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 6,29% (yoy).

Melambatnya pertumbuhan kredit tersebut utamanya pada sektor perdagangan, restoran, dan hotel yang merupakan penyaluran kredit terbesar kedua dengan porsi 19,86%, berkontraksi -1,94% (yoy) pada bulan laporan, setelah tahun sebelumnya tumbuh 1,45% (yoy). Selanjutnya, sektor Bukan Lapangan Usaha - Rumah Tangga (porsi 8,56%) juga berkontraksi sebesar -28,14% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh mencapai 10,03% (yoy).

Lebih lanjut, sektor jasa sosial/masyarakat dengan porsi sebesar 6,55% mencatatkan kontraksi sebesar -0,68% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh sebesar 2,36% (yoy). Penyaluran kredit kepada sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan (porsi 5,88%) juga berkontraksi sebesar -2,62% (yoy), setelah tahun sebelumnya tumbuh 3,99% (yoy).

Selain itu, sektor *real estate*, usaha persewaan, dan jasa perusahaan (porsi: 5,13%) berkontraksi sebesar -2,01% (yoy), setelah tahun sebelumnya tumbuh tinggi sebesar 18,47% (yoy).

Sektor konstruksi (porsi 7,43%) tumbuh 6,47% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 13,21% (yoy). Selain itu, sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi (porsi: 3,89%) tumbuh 3,15% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 18,25% (yoy).

Kendati beberapa sektor mencatatkan kontraksi maupun perlambatan pada kredit atau pembiayaan, sektor Bukan Lapangan Usaha - Lainnya dengan porsi 35,71% tumbuh sebesar 19,13% (yoy), naik dari 5,22% (yoy) pada tahun sebelumnya. Meskipun tumbuh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhan tersebut belum dapat mendorong peningkatan penyaluran kredit BPR dan BPRS secara umum.

Tabel 14 Konsentrasi Kredit/Pembiayaan BPR/BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi

No	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp M)			qtq		yoy		Porsi
		Mar-25	Dec-25	Mar-26	Dec-25	Mar-26	Mar-25	Mar-26	
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	10.684	10.230	10.405	2,30%	1,71%	3,99%	-2,62%	5,88%
2	Perikanan	587	597	591	-0,13%	-1,00%	-6,70%	0,64%	0,33%
3	Pertambangan dan Penggalian	1.229	1.354	1.359	7,86%	0,37%	-8,96%	10,56%	0,77%
4	Industri Pengolahan	6.027	6.493	6.285	4,29%	-3,20%	9,60%	4,28%	3,55%
5	Listrik, Gas dan Air	289	293	312	-4,79%	6,49%	33,66%	8,11%	0,18%
6	Konstruksi	12.357	13.643	13.157	1,56%	-3,56%	13,21%	6,47%	7,43%
7	Perdagangan, Restoran dan Hotel	35.846	35.330	35.152	0,45%	-0,50%	1,45%	-1,94%	19,86%
8	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	6.677	7.028	6.887	0,27%	-2,00%	18,25%	3,15%	3,89%
9	Perantara Keuangan	2.293	2.651	2.815	17,24%	6,19%	0,88%	22,76%	1,59%
10	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	9.273	9.554	9.086	1,98%	-4,89%	18,47%	-2,01%	5,13%
11	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan Dan Jaminan Sosial Wajib	267	245	257	-1,79%	4,89%	10,40%	-3,81%	0,14%
12	Jasa Pendidikan	572	540	538	3,12%	-0,39%	11,15%	-5,95%	0,30%
13	Jasa Sosial/Masyarakat	11.675	11.472	11.595	1,32%	1,07%	2,36%	-0,68%	6,55%
14	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	168	166	170	-0,93%	2,57%	-11,83%	1,35%	0,10%
15	Kegiatan Usaha yang Belum Jelas Batasannya	12	6	6	-9,50%	8,25%	-21,84%	-47,20%	0,00%
16	Bukan Lapangan Usaha - Rumah Tangga	21.077	14.663	15.146	-35,14%	3,30%	10,03%	-28,14%	8,56%
17	Bukan Lapangan Usaha - Lainnya	53.050	63.154	63.197	17,15%	0,07%	5,22%	19,13%	35,71%
Total		172.083	177.418	176.959	1,72%	-0,26%	6,29%	2,83%	100%

Sumber: Portal Data OJK

2. Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS berdasarkan Lokasi (Spasial)

Berdasarkan lokasi, sebagian besar kredit BPR dan BPRS disalurkan ke wilayah Jawa dengan porsi sebesar 58,26%. Besarnya kredit di wilayah Jawa sejalan dengan mayoritas BPR dan BPRS di Indonesia beroperasi di wilayah tersebut. Kredit di wilayah ini tumbuh 0,92% (yoy), melambat dari tahun lalu yang tumbuh 4,75% (yoy). Jawa Tengah yang merupakan Provinsi dengan penyaluran kredit BPR dan BPRS terbesar (porsi 23,37%) tumbuh melambat sebesar 0,24% (yoy), dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 0,70% (yoy). Selain itu, Jawa Barat (porsi 14,05%) berkontraksi sebesar -0,93% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 1,01% (yoy), sehingga turut menarik ke bawah pertumbuhan penyaluran kredit BPR dan BPRS secara umum.

Selain itu, kredit kedua terbesar terdapat di wilayah Sumatera dengan porsi 20,68%.

Kredit di wilayah ini tumbuh 5,64% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 11,95% (yoy). Penurunan utamanya didorong oleh Sumatera Utara yang berkontraksi -1,62% (yoy), dibandingkan tahun sebelumnya yang juga berkontraksi sebesar -0,50% (yoy) dan Bangka Belitung yang berkontraksi sebesar -5,86% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang juga berkontraksi sebesar -1,25% (yoy). Dilihat dari pertumbuhannya, kredit di wilayah Bali dan Nusa Tenggara tumbuh meningkat di antara wilayah lainnya, tercatat tumbuh sebesar 9,63% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 4,80% (yoy), dengan porsi sebesar 10,69% dari total kredit BPR dan BPRS. Pertumbuhan di wilayah ini terutama didorong oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tumbuh 26,19% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 11,40% (yoy).

Tabel 15 Persebaran Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS menurut Lokasi (Spasial)

	Kredit (RP M)			qtq		yoy		Porsi
	Mar-25	Dec-25	Mar-26	Dec-25	Mar-26	Mar-25	Mar-26	
Jawa	102.154	104.405	103.093	1,83%	-1,26%	4,75%	0,92%	58,26%
Sumatera	34.636	36.384	36.589	0,82%	0,56%	11,95%	5,64%	20,68%
Kalimantan	5.146	4.601	4.625	2,14%	0,52%	5,94%	-10,13%	2,61%
Bali - Nusra	17.248	18.404	18.909	3,11%	2,74%	4,80%	9,63%	10,69%
Sulampua	12.899	13.624	13.742	1,33%	0,87%	6,36%	6,54%	7,77%
Total	172.083	177.418	176.959	1,72%	-0,26%	6,29%	2,83%	100%

Sumber: Portal Data OJKK

Halaman ini sengaja dikosongkan

4 Profil Risiko Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

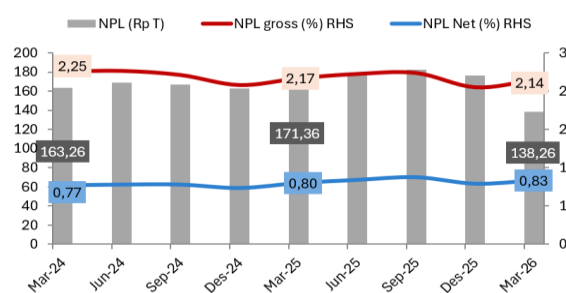
4 Profil Risiko Perbankan

Pada periode laporan, profil risiko bank umum cukup terkelola dengan baik, tecermin dari risiko kredit yang masih terjaga serta kondisi likuiditas yang cukup memadai. Selain itu, risiko pasar juga cukup terjaga seiring upaya bank untuk menyeimbangkan portofolio SSB yang dimiliki (*bond portfolio rebalancing*). Namun demikian, ke depannya risiko likuiditas tetap perlu diwaspadai seiring dengan sentimen ketidakpastian kebijakan moneter dan perdagangan global.

1. Risiko Kredit

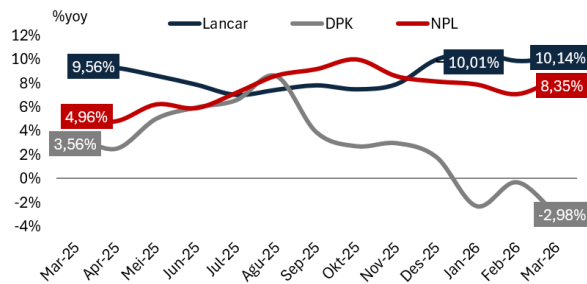
Pada akhir triwulan I 2026, risiko kredit tetap terjaga, tecermin dari rasio NPL *gross* yang tercatat sebesar 2,14%, menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,17%, meskipun rasio NPL net sedikit meningkat menjadi 0,83%.

Grafik 28 Tren Rasio NPL Gross dan NPL Net



Sumber: Portal Data OJK

Grafik 29 Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit



Sumber: Portal Data OJK

Pada periode laporan, nominal NPL tumbuh 8,35% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,96% (yoy). Namun demikian, kenaikan total kredit

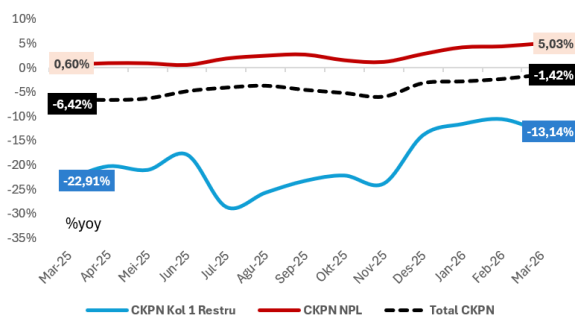
yang lebih tinggi dibandingkan dengan nominal NPL mendorong penurunan rasio NPL *gross* dari tahun sebelumnya.

Kenaikan nominal NPL direspon dengan pembentukan CKPN, terlihat dari CKPN NPL yang meningkat 5,03% (yoy). Namun, kenaikan tersebut masih lebih rendah dibandingkan kenaikan nominal NPL sehingga rasio NPL net mengalami peningkatan sebesar 3 bps (yoy). Selain itu, CKPN kredit non restrukturisasi kualitas lancar juga tumbuh sebesar 8,86% (yoy), sejalan dengan meningkatnya penyaluran kredit.

Meskipun demikian, CKPN secara total terkontraksi sebesar -1,42% (yoy). Angka tersebut lebih baik dibandingkan tahun lalu yang terkontraksi -6,42% (yoy), disebabkan oleh CKPN kredit restru utamanya pada kolektibilitas 1 dan kolektibilitas 2, sejalan terkontraksinya nominal kredit restrukturisasi pada kedua kolektibilitas tersebut (yoy). Hal tersebut mengindikasikan masih berlanjutnya perbaikan kredit restrukturisasi sejalan dengan normalisasi kegiatan bisnis perbankan. Penurunan CKPN pada kedua kolektibilitas tersebut menyebabkan *coverage* CKPN kredit restrukturisasi kualitas Lancar dan kredit Dalam Perhatian Khusus

(DPK) menurun menjadi sebesar 12,91% dan 24,18%, dari tahun sebelumnya yang masing-masing sebesar 14,29% dan 26,68%. Selain itu, *coverage* total CKPN terhadap NPL juga masih cukup baik sebesar 166,73%, yang mencerminkan antisipasi bank terhadap risiko kredit bermasalah masih memadai.

Grafik 30 Pertumbuhan CKPN

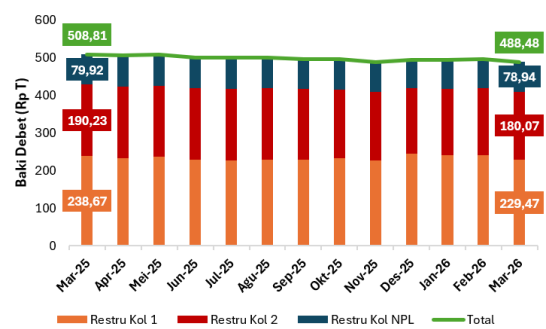


Sumber: LBUT

Di sisi lain, kredit restrukturisasi perbankan sudah turun sebesar -4,00% (yoy) menjadi sebesar Rp488,48 triliun. Hal ini sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian pasca pandemi Covid-19 dan berakhirnya kebijakan stimulus restrukturisasi. Adapun kredit restrukturisasi masih didominasi oleh kredit restrukturisasi kualitas Lancar sebesar Rp229,47 triliun atau 46,98% terhadap total kredit restrukturisasi. Kredit restrukturisasi kualitas Lancar tersebut berkontraksi -3,85% (yoy), melanjutkan kontraksi pada tahun sebelumnya yang sebesar -15,89% (yoy). Porsi kredit restrukturisasi kualitas Lancar terhadap total kredit juga mulai

menunjukkan tren penurunan menjadi 2,65% dari 3,02% pada Maret 2025. Terkontraksinya kredit restrukturisasi kualitas Lancar tersebut yang juga diikuti terkontraksinya kredit kualitas DPK mendorong penurunan rasio *Loan at Risk* (LaR) menjadi sebesar 8,94%, dari tahun sebelumnya 9,86%. Angka tersebut juga lebih rendah dibandingkan rasio LaR sebelum pandemi (Des'19 = 9,93%).

Grafik 31 Tren Kredit Restrukturisasi



Sumber: LBUT

Meskipun risiko kredit relatif terjaga, perbankan harus tetap mengedepankan aspek prudensial dan mengantisipasi terjadinya pemburukan kualitas kredit ke depan di tengah masih tingginya ketidakpastian global. Ketidakpastian global yang dimaksud di antaranya berupa risiko akibat eskalasi perang dagang, ketidakpastian kebijakan moneter global, perkembangan ekonomi negara-negara utama, serta kenaikan tensi geopolitik yang dapat berpotensi meningkatkan tekanan ekonomi domestik.

Tabel 16 Perkembangan Kualitas Kredit

Kualitas Kredit (Rp T)	Mar-25	Des-25	Mar-26	Porsi	qtq		yoy	
					Des-25	Mar-26	Mar-25	Mar-26
1. Lancar	7.367	8.078	8.115	93,71%	6,08%	0,45%	9,56%	10,14%
- Non Restru	7.129	7.833	7.885	91,06%	6,05%	0,67%	10,68%	10,61%
- Restru	239	245	229	2,65%	7,02%	-6,41%	-15,89%	-3,85%
2. DPK	370	332	359	4,14%	-9,24%	8,22%	3,56%	-2,98%
3. Kurang Lancar	20	18	19	0,22%	-17,14%	4,16%	-8,25%	-6,20%
4. Diragukan	29	26	28	0,33%	-4,40%	8,04%	-1,62%	-2,88%
5. Macet	122	132	138	1,60%	-1,03%	5,05%	9,34%	13,47%
Nominal NPL	171	176	186		-3,48%	5,41%	4,96%	8,35%
Rasio NPL Gross %	2,17%	2,05%	2,14%		-18	9	-9	-2
Rasio NPL Net %	0,80%	0,79%	0,83%		-8	4	3	3
Kredit DPK + Restru Kredit Lancar	609	577	588		-2,97%	2,00%	-5,05%	-3,33%
Rasio Kredit DPK + Restru Kredit Lancar %	7,70%	6,72%	6,79%		-56	8	-115	-90
Loan at Risk (LaR)	780	753	774		-3,09%	2,80%	-3,02%	-0,76%
Rasio Loan at Risk (LaR) %	9,86%	8,77%	8,94%		-75	17	-124	-92
Total Kredit	7.908	8.586	8.659		5,18%	0,85%	9,16%	9,49%

Sumber: LBUT

Keterangan: Perubahan (qtq dan yoy) untuk data rasio dalam *basis point* (bps)

1.1 Risiko Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan

Pada periode laporan, perlambatan pertumbuhan kredit antara lain dipengaruhi oleh melemahnya penyaluran kredit modal kerja dan kredit konsumsi. Kredit Modal Kerja (KMK) tercatat tumbuh 4,38% (yoy) pada Maret 2026, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 6,51% (yoy). Pelemahan pertumbuhan kredit modal kerja mengindikasikan tertahannya aktivitas usaha, khususnya pada sektor-sektor yang sensitif terhadap perlambatan permintaan domestik maupun eksternal. Kondisi ini terjadi seiring kecenderungan pelaku usaha untuk menahan ekspansi dan mengoptimalkan penggunaan likuiditas internal di tengah ketidakpastian prospek usaha, sehingga kebutuhan pembiayaan jangka pendek menjadi lebih terbatas.

Sejalan dengan itu, Kredit Konsumsi (KK) juga tumbuh melambat dari 9,32% (yoy) menjadi 5,88% (yoy). Perlambatan kredit konsumsi tersebut ditengarai sejalan dengan sikap rumah tangga yang lebih berhati-hati dalam berbelanja dan berutang, seiring dengan tekanan biaya hidup, kewaspadaan terhadap

ekonomi ke depan, serta penyesuaian prioritas konsumsi. Sebaliknya, Kredit Investasi (KI) justru mencatatkan akselerasi pertumbuhan dari 13,36% (yoy) menjadi 20,85% (yoy). Hal ini mengindikasikan masih kuatnya minat pembiayaan untuk kegiatan jangka menengah dan panjang lantaran didorong oleh berlanjutnya proyek-proyek investasi strategis, baik di sektor infrastruktur, industri pengolahan, maupun sektor prioritas lainnya, disertai optimisme pelaku usaha terhadap prospek pertumbuhan dalam jangka panjang.

Beriringan dengan dinamika tersebut, kualitas kredit juga perlu dicermati lebih lanjut untuk melihat potensi peningkatan risiko yang menyertai perkembangan penyaluran kredit. Sejalan dengan perbaikan risiko kredit secara agregat, risiko kredit produktif cenderung membaik sebagaimana tecermin dari rasio NPL KMK dan KI yang masing-masing turun menjadi 2,60% dan 1,37% dari 2,69% dan 1,44% pada Maret tahun lalu. Sebaliknya, rasio NPL KK justru menunjukkan peningkatan dari 2,08% menjadi 2,35% untuk periode yang sama.

Rasio NPL KMK tercatat menurun dibanding tahun sebelumnya namun masih lebih tinggi dibanding KI dan KK antara lain didorong oleh aktivitas usaha yang belum sepenuhnya kondusif di tengah ketidakpastian. Sementara itu, penurunan rasio NPL KI ditengarai lantaran didukung oleh berlanjutnya proyek strategis dan tingginya fokus pembiayaan pada sektor-sektor produktif dengan dukungan Pemerintah dan permintaan yang relatif terjaga turut menopang kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembiayaannya. Penurunan NPL tersebut juga

Tabel 17 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan

Kredit (Rp T)	Mar'25	Des '25	Mar'26	yoy	
				Mar '25	Mar '26
KMK	3.486	3.665	3.639	6,51%	4,38%
KI	2.256	2.642	2.727	13,36%	20,85%
KK	2.166	2.279	2.293	9,32%	5,88%
Total Kredit	7.908	8.586	8.659	9,16%	9,49%

Sumber: Portal Data OJK Maret 2026

Berdasarkan kepemilikan, penurunan rasio NPL KMK terjadi pada Bank Swasta dan Bank KCBLN yaitu masing-masing menjadi 2,30% dan 0,18% dari 2,48% dan 0,94%. Sementara itu, terjadi peningkatan rasio NPL KMK pada Bank BPD dan Bank Persero. Untuk informasi, rasio NPL KMK pada BPD masih tercatat sebagai yang tertinggi dibandingkan kelompok bank lainnya, yaitu mencapai 10,16% pada Maret 2026 atau meningkat dari 9,17% pada Maret tahun lalu. Tingginya NPL KMK pada BPD sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana BPD dalam penyaluran kredit produktif seperti infrastruktur dalam melakukan pemantauan, serta kompetensi dan pengetahuan SDM BPD yang lebih difokuskan pada KK utamanya kredit bagi pegawai Pemerintah Daerah. Rasio NPL KMK pada Bank Persero juga mengalami

mengindikasikan penyaluran kredit yang lebih selektif sebagai antisipasi risiko di tengah ketidakpastian yang masih cukup tinggi. Di sisi lain, peningkatan rasio NPL KK menunjukkan adanya tekanan pada keuangan rumah tangga. Kenaikan biaya hidup serta penyesuaian pola konsumsi membuat sebagian rumah tangga menghadapi keterbatasan ruang dalam mengelola keuangan. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya keterlambatan pembayaran kredit, khususnya pada segmen konsumsi, sehingga risikonya tercatat naik dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 18 Rasio NPL Gross per Jenis Penggunaan

NPL Gross %	Mar'25	Des '25	Mar'26	yoy	
				Mar '25	Mar '26
NPL KMK	2,69	2,44	2,60	-14	-9
NPL KI	1,44	1,33	1,37	-32	-8
NPL KK	2,08	2,25	2,35	28	27
Total NPL	2,17	2,05	2,14	-2	-2

peningkatan, meskipun relatif terbatas dari 2,59% menjadi 2,62%.

Adapun dari sisi KI, rasio NPL menunjukkan penurunan pada hampir seluruh kelompok bank, kecuali BPD. Hal ini mencerminkan perbaikan kualitas KI yang relatif lebih merata antar kelompok bank. Sementara itu pada KCBLN, adanya peningkatan nominal penyaluran KI tanpa disertai kenaikan rasio NPL (tetap nol persen, sama seperti Maret tahun lalu) mengindikasikan bahwa ekspansi kredit dilakukan secara prudent dengan didukung tata kelola risiko yang memadai. ~~mengindikasikan adanya hapus buku sejak periode sebelumnya.~~ Sementara itu, NPL KI pada Bank Persero dan Bank Swasta masing-masing turun dari 1,45% dan 1,35% menjadi 1,28% dan 1,34%.

Di sisi lain, kenaikan rasio NPL KK terjadi pada semua kelompok bank, kecuali KCBLN. Bank Persero dan BPD mencatatkan kenaikan rasio NPL tertinggi, yaitu masing-masing menjadi 2,59% dan 1,45% dari 2,23% dan 1,14%. Sementara itu, pada Bank Swasta mengalami kenaikan dari 2,48% menjadi 2,54%. Namun demikian, KCBLN mengalami penurunan NPL KK menjadi 1,31% dari 1,45%. Perkembangan

ini mengindikasikan adanya peningkatan tekanan pada kualitas KK secara lebih luas pada hampir seluruh kelompok perbankan, kecuali KCBLN. Secara keseluruhan, perkembangan ini menunjukkan adanya divergensi kualitas kredit antar jenis penggunaan, di mana tekanan kualitas lebih terasa pada kredit jangka pendek dan konsumsi, sementara KI relatif lebih terjaga

Tabel 19 Rasio NPL Gross berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank

Kelompok Kepemilikan Bank	KMK			KI			KK			NPL (%)
	Kredit (Rp M)	Porsi KMK Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	Kredit (Rp M)	Porsi KI Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	Kredit (Rp M)	Porsi KK Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	
Bank Persero	1.681.355	37,77	2,62	1.646.443	36,99	1,28	1.123.680	25,24	2,59	2,12
Bank Swasta	1.681.116	50,18	2,30	956.926	28,56	1,34	712.350	21,26	2,54	2,08
BPD	113.754	17,32	10,16	93.037	14,16	3,58	450.080	68,52	1,45	3,26
KCBLN	163.031	81,39	0,18	30.435	15,19	0,00	6.847	3,42	1,31	0,19
TOTAL	3.639.255	42,03	2,60	2.726.841	31,49	1,37	2.292.956	26,48	2,35	2,14

Sumber: Portal Data OJK Maret 2026

1.2 Risiko Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi

Kualitas kredit pada beberapa sektor terpantau membaik, sebagaimana tecermin dari penurunan rasio NPL pada periode laporan. Sektor-sektor tersebut antara lain: konstruksi, industri pengolahan; pertambangan dan penggalian; serta pengangkutan dan perdagangan.

Rasio NPL sektor konstruksi tercatat membaik dari 2,61% menjadi 1,93%. Penurunan rasio NPL tersebut didorong oleh pertumbuhan kredit konstruksi yang signifikan yaitu sebesar 46,67% dari tahun sebelumnya yang berkontraksi sebesar -0,03%. Seiring dengan pertumbuhan yang signifikan tersebut, rasio NPL sektor konstruksi menjadi menurun meskipun secara nominal NPL meningkat Rp869,56 miliar dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan sektor konstruksi sejalan dengan peningkatan aktivitas pembangunan.

Pertumbuhan sektor konstruksi utamanya didorong oleh golongan nasabah BUMN yang tumbuh hingga 50,57% (yoy) dari tahun sebelumnya.

Nominal NPL sektor industri pengolahan tercatat turun sebesar Rp5,11 triliun, sehingga rasio NPL membaik dari 2,82% menjadi 2,23%. Penurunan nominal NPL terutama didorong oleh kinerja positif industri tekstil. Capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan kebijakan Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan sektor industri pengolahan, khususnya industri tekstil melalui berbagai instrumen yang meningkatkan investasi, memperkuat kinerja ekspor, serta mendorong penyerapan tenaga kerja secara signifikan. Upaya ini tidak hanya mendukung produktivitas dan daya saing industri, tetapi juga berkontribusi pada perbaikan kualitas kredit di sektor industri pengolahan secara keseluruhan.

Sementara itu, nominal NPL sektor pertambangan dan penggalian menunjukkan penurunan yang cukup signifikan sebesar Rp1,41 triliun, sehingga rasio NPL membaik dari 1,12% menjadi 0,70%. Penurunan nominal NPL terutama didorong oleh kinerja positif subsektor pertambangan dan penggalian lainnya. Menariknya, perbaikan kualitas kredit tersebut terjadi di tengah perlambatan pertumbuhan kredit sektor pertambangan dan penggalian dari 25,66% (yoy) menjadi 8,18% (yoy). Perkembangan ini mengindikasikan bahwa penurunan rasio NPL tidak semata-mata dipengaruhi oleh ekspansi penyaluran kredit, tetapi juga mencerminkan mulai membaiknya kualitas aset perbankan melalui berkurangnya akumulasi kredit bermasalah pada sektor tersebut.

Selanjutnya, sektor pengangkutan dan perdagangan menunjukkan penurunan nominal NPL sebesar Rp71,12 miliar sehingga mendorong perbaikan rasio NPL dari 1,27% pada Maret 2025 menjadi 1,09% pada Maret 2026. Penurunan kredit bermasalah tersebut terutama berasal dari subsektor angkutan laut untuk wisata. Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa kondisi usaha dan kapasitas pembayaran debitur pada subsektor tersebut mengalami perbaikan, sehingga turut mendukung terjaganya kualitas aset perbankan pada sektor pengangkutan dan perdagangan. Mengingat aktivitas angkutan laut untuk wisata sangat dipengaruhi oleh mobilitas masyarakat dan perkembangan sektor pariwisata, membaiknya kualitas kredit pada subsektor ini juga mengindikasikan pemulihan aktivitas ekonomi yang mendukung keberlanjutan

kinerja debitur. Data BPS mencatat bahwa selama Januari–Maret 2026, jumlah penumpang angkutan laut dalam negeri mencapai 7,4 juta orang atau naik 4,44% (ctc) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2025. Peningkatan jumlah penumpang terjadi di semua pelabuhan yang diamati, yaitu Pelabuhan Balikpapan sebesar 65,11%, Tanjung Priok sebesar 16,60%, Makassar sebesar 8,59%, Belawan 3,42%, dan Tanjung Perak sebesar 1,40%.

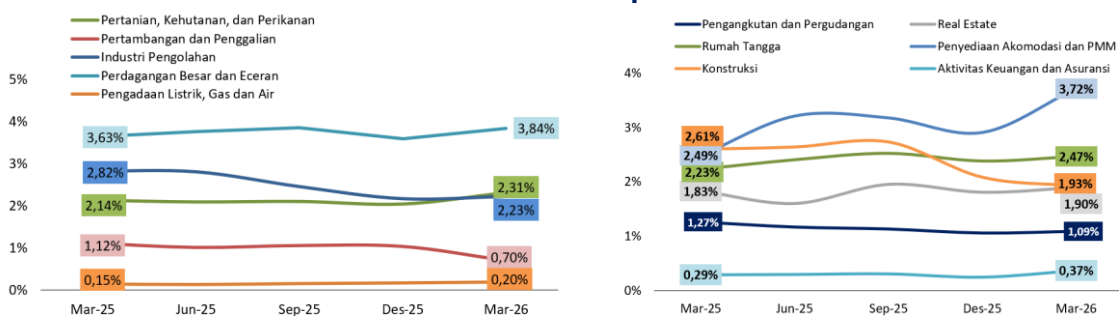
Di sisi lain, sektor rumah tangga menunjukkan pemburukan kualitas kredit yang cukup nyata, tecermin dari kenaikan nominal NPL sebesar Rp7,08 triliun. Peningkatan ini turut mendorong rasio NPL sektor rumah tangga naik dari 2,23% pada Maret 2025 menjadi 2,47% pada Maret 2026. Peningkatan nominal NPL sektor rumah tangga terutama bersumber dari subsektor kredit kepemilikan rumah tinggal, khususnya pada kelompok rumah tipe di atas 21 s.d. 70 serta tipe di atas 70. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya kerentanan yang lebih tinggi pada segmen pembiayaan perumahan berbiaya relatif terjangkau sekaligus mengindikasikan tekanan yang semakin kuat terhadap kemampuan bayar debitur rumah tangga. Tekanan ini kemungkinan dipengaruhi oleh melemahnya pendapatan *disposable* serta meningkatnya beban finansial rumah tangga selama periode laporan.

Sektor perdagangan besar dan eceran turut mencatatkan peningkatan nominal NPL sebesar Rp3,52 triliun, sehingga mendorong rasio NPL meningkat dari 3,63% pada Maret 2025 menjadi 3,84% pada Maret 2026. Kenaikan tersebut menunjukkan adanya peningkatan risiko kredit pada salah satu sektor dengan pangsa kredit yang relatif

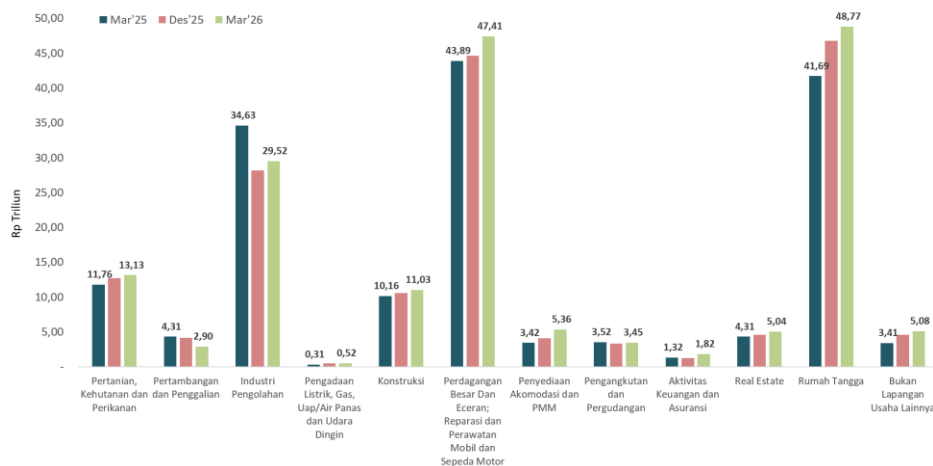
besar dan berperan penting dalam mendukung aktivitas perdagangan domestik. Berdasarkan subsektornya, peningkatan risiko kredit terutama bersumber dari perdagangan besar, bukan perdagangan dan reparasi mobil maupun sepeda motor. Perkembangan ini mengindikasikan bahwa tekanan terhadap kualitas kredit tidak hanya terjadi pada aktivitas perdagangan yang berorientasi pada konsumsi akhir, tetapi juga telah menjangkau aktivitas distribusi pada tingkat hulu dalam rantai perdagangan. Mengingat perdagangan besar memiliki peran strategis dalam penyaluran barang dari produsen kepada pelaku usaha maupun konsumen, peningkatan NPL pada subsektor ini berpotensi memengaruhi kelancaran aktivitas perdagangan dan menjadi salah satu faktor yang perlu dicermati dalam menjaga kualitas aset perbankan ke depan. Tidak hanya itu, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga mencatatkan peningkatan nominal NPL sebesar Rp1,38

triliun. Namun demikian, kenaikan tersebut berdampak terhadap rasio NPL yang meningkat dari 2,14% pada Maret 2025 menjadi 2,31% pada Maret 2026. Hal ini menunjukkan bahwa secara relatif, kualitas kredit di sektor ini masih cukup terjaga meskipun terdapat tambahan tekanan pada sisi nominal. Peningkatan nominal NPL terbesar terutama berasal dari subsektor pertanian tanaman semusim maupun tahunan yang ditengarai berkaitan dengan karakteristik sektoral yang rentan terhadap risiko cuaca maupun volatilitas harga komoditas. Meskipun demikian, kenaikan risiko NPL yang relatif terbatas mengindikasikan bahwa risiko kredit pada sektor ini masih berada dalam batas yang terkendali. Adapun secara umum kenaikan rasio NPL pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan ini juga terjadi di tengah pertumbuhan kredit pada sektor tersebut yang mengalami perlambatan dari 4,83% (yoy) pada Maret 2025 menjadi sebesar 3,22% (yoy) pada Maret 2026.

Grafik 32 Tren NPL Gross per Sektor Ekonomi



Sumber: LBUT Maret 2026, diolah

Grafik 33 Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi

Sumber: LBUT Maret 2026, diolah

1.3 Risiko Kredit berdasarkan Lokasi (Spasial)

Secara umum, tingkat risiko kredit yang terjadi saat ini masih relatif terjaga dan menunjukkan perkembangan lebih baik dibandingkan Maret tahun lalu. Capaian ini didukung oleh konsistensi penerapan prinsip kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan pinjaman, terutama di tengah rambatan risiko global dan ketegangan geopolitik yang masih berlanjut.

Meski demikian, berdasarkan lokasi proyek, perbaikan kualitas kredit pada periode laporan hanya terjadi di wilayah Jawa dan Kalimantan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbaikan kualitas kredit belum terjadi secara merata antarwilayah, seiring dengan adanya perbedaan karakteristik ekonomi, struktur sektor unggulan, serta tingkat eksposur terhadap risiko di masing-masing daerah. Disparitas tersebut mengindikasikan bahwa dinamika risiko kredit masih bersifat spasial dan kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor spesifik regional. Ke depan, kondisi ini menjadi sinyal perlunya strategi penyaluran kredit yang lebih terarah dan disesuaikan dengan kondisi serta potensi masing-masing wilayah. Pendekatan ini diharapkan tidak

hanya menjaga stabilitas sektor perbankan, tetapi juga mendorong pemulihan ekonomi yang lebih inklusif dan merata antarwilayah.

Pada Maret 2026, rasio NPL di wilayah Jawa tercatat sebesar 2,15%, membaik dibandingkan 2,23% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Perbaikan kualitas kredit tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya pertumbuhan kredit dari 8,95% (yoy) pada Maret 2025 menjadi 9,81% (yoy) di wilayah Jawa pada periode laporan. Kondisi ini menunjukkan bahwa akselerasi penyaluran kredit masih diimbangi dengan penerapan manajemen risiko yang memadai, sehingga kualitas aset perbankan tetap terjaga di tengah peningkatan aktivitas intermediasi perbankan. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap perbaikan kualitas kredit di wilayah Jawa adalah membaiknya kualitas kredit di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki pangsa sebesar 8,26% terhadap total penyaluran kredit di wilayah tersebut. Rasio NPL di provinsi ini tercatat turun dari 4,77% menjadi 3,94%, seiring dengan penurunan nominal kredit bermasalah sebesar Rp3,86 triliun. Berdasarkan lapangan usaha, sektor industri pengolahan menjadi kontributor utama

perbaikan tersebut dengan mencatatkan penurunan nominal NPL terbesar, yakni sebesar Rp4,80 triliun. Meskipun demikian, tingkat NPL pada sektor ini masih berada pada level yang relatif tinggi yaitu mencapai 9,27% pada Maret 2026. Angka tersebut memang telah menurun dibandingkan rasio NPL sebesar 13,70% pada periode yang sama tahun sebelumnya, namun masih berada jauh di atas ambang batas indikatif sebesar 5%, sehingga tetap memerlukan perhatian dalam pengelolaan risiko kredit ke depan. Selain sektor industri pengolahan, perbaikan kualitas kredit juga didukung oleh sektor aktivitas keuangan dan asuransi serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Pada sektor aktivitas keuangan dan asuransi, penurunan nominal NPL sebesar Rp56,60 miliar mendorong perbaikan rasio NPL secara signifikan dari 6,05% menjadi 1,58%. Sementara itu, sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum mencatatkan penurunan nominal NPL sebesar Rp40,38 miliar yang diikuti dengan perbaikan rasio NPL dari 2,66% menjadi 2,52%.

Perbaikan kualitas kredit juga terlihat pada wilayah Kalimantan yang ditandai dengan perkembangan rasio NPL dari 1,99% pada Maret 2025 menjadi 1,93% pada Maret 2026. Perbaikan kualitas kredit di wilayah tersebut seiring dengan akselerasi pertumbuhan kredit dari 5,73% (yoy) pada Maret 2025 menjadi 11,53% (yoy) di wilayah Kalimantan pada periode laporan. Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan fungsi intermediasi tetap disertai dengan kualitas penyaluran kredit yang terjaga, sehingga ekspansi pembiayaan turut menopang perbaikan kualitas aset perbankan. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap perbaikan kualitas

kredit di wilayah Kalimantan adalah membaiknya kualitas kredit di Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki pangsa sebesar 19,47% terhadap total penyaluran kredit di wilayah tersebut. Rasio NPL di provinsi ini menurun dari 2,12% menjadi 1,75%, sejalan dengan penurunan nominal kredit bermasalah sebesar Rp191,11 miliar. Berdasarkan lapangan usaha, sektor perdagangan besar dan eceran menjadi kontributor utama perbaikan tersebut dengan mencatatkan penurunan nominal NPL terbesar, yakni sebesar Rp291,7 miliar. Perkembangan tersebut mendorong perbaikan rasio NPL sektor perdagangan besar dan eceran dari 5,60% menjadi 3,49%. Selain itu, perbaikan kualitas kredit juga didukung oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor konstruksi. Pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan penurunan nominal NPL sebesar Rp12,48 miliar dan mendorong perubahan tipis pada rasio NPL dari 0,62% menjadi 0,58%. Sementara itu, sektor konstruksi mencatatkan penurunan nominal NPL sebesar Rp11,10 miliar yang diikuti dengan perbaikan rasio NPL dari 5,63% menjadi 4,35%.

Berbanding terbalik dengan perbaikan kualitas kredit yang terjadi di wilayah Jawa dan Kalimantan, rasio NPL di wilayah Sumatera justru mencatatkan kenaikan dari 1,97% pada Maret 2025 menjadi 2,02% pada Maret 2026 seiring meningkatnya nominal NPL sebesar Rp2,43 triliun. Peningkatan risiko kredit tersebut diperkirakan tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhi kualitas aset perbankan, salah satunya adalah serangkaian bencana hidrometeorologi ekstrem, seperti banjir bandang, luapan sungai, dan tanah longsor

yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada November-Desember 2025. Bencana tersebut memberikan tekanan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pada sektor-sektor yang bergantung pada kondisi alam dan kelancaran infrastruktur. Wilayah yang terdampak signifikan antara lain Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berdasarkan hasil studi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), total kerugian ekonomi nasional akibat bencana tersebut diproyeksikan mencapai sekitar Rp68,67 triliun. Besarnya kerugian tersebut mencerminkan adanya tekanan terhadap kegiatan produksi, distribusi, serta kemampuan bayar pelaku usaha dan rumah tangga di wilayah terdampak. Dalam konteks tersebut, Provinsi Sumatera Utara (porsi kredit 26,59% dari total kredit yang disalurkan di wilayah Sumatera) menjadi kontributor utama terhadap peningkatan NPL di wilayah Sumatera. Rasio NPL di provinsi ini tercatat meningkat dari 1,72% pada Maret 2025 menjadi 1,95% pada Maret 2026 dengan kenaikan nominal NPL sebesar Rp894,66 miliar. Berdasarkan sektor ekonomi, peningkatan nominal NPL di provinsi Sumatera Utara terutama berasal dari sektor rumah tangga yaitu sebesar Rp261,35 miliar, sehingga mendorong rasio NPL sektor tersebut naik dari 2,00% menjadi 2,19%. Perkembangan ini mengindikasikan adanya tekanan terhadap kapasitas pembayaran debitur rumah tangga. Kondisi tersebut diperkirakan turut dipengaruhi oleh sejumlah perlambatan aktivitas ekonomi di sejumlah wilayah terdampak bencana, meskipun tidak menutup kemungkinan dipengaruhi pula oleh faktor-faktor lain, seperti kondisi pendapatan rumah tangga dan profil risiko

debitur. Di samping itu, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga mencatatkan pemburukan kualitas kredit yang tercermin dari peningkatan nominal NPL sebesar Rp194,38 miliar, sehingga rasio NPL meningkat dari 0,92% menjadi 1,30%. Peningkatan risiko kredit pada sektor ini diperkirakan dipengaruhi oleh karakteristik usaha yang sangat bergantung pada faktor musiman dan kondisi cuaca, sehingga rentan terhadap gangguan produksi. Selain itu, volatilitas harga komoditas pertanian dan perikanan turut menekan margin usaha petani dan nelayan, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kapasitas pembayaran debitur.

Selanjutnya, kualitas kredit di wilayah Sulawesi mengalami penurunan yang tercermin pada kenaikan rasio NPL dari 2,75% pada Maret 2025 menjadi 3,19% seiring dengan meningkatnya nominal NPL sebesar Rp2,84 triliun. Peningkatan risiko kredit tersebut terutama dipengaruhi oleh perkembangan di Provinsi Sulawesi Selatan (porsi kredit 41,01% dari total kredit yang disalurkan di wilayah Sulawesi). Rasio NPL di provinsi ini meningkat dari 3,56% menjadi 4,41% sejalan dengan bertambahnya nominal NPL sebesar Rp1,79 triliun pada periode laporan. Berdasarkan lapangan usaha, sektor perdagangan besar dan eceran menjadi kontributor utama peningkatan risiko kredit di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut tercermin dari lonjakan nominal NPL sebesar Rp1,31 triliun, dari Rp1,78 triliun pada Maret 2025 menjadi Rp3,09 triliun pada Maret 2026, sehingga rasio NPL sektor tersebut meningkat signifikan dari 4,49% menjadi 8,13%. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya peningkatan risiko pada sektor perdagangan besar dan eceran

yang diikuti dengan memburuknya kualitas aset perbankan pada sektor tersebut. Mengingat sektor perdagangan merupakan salah satu sektor dengan pangsa kredit yang relatif besar, peningkatan NPL pada sektor ini berpotensi memberikan tekanan yang lebih besar terhadap kualitas kredit perbankan di wilayah Sulawesi apabila tidak diantisipasi melalui penguatan pengelolaan risiko kredit.

Selain Sumatera dan Sulawesi, kualitas kredit di wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Bali Nusra) turut mengalami penurunan yang ditandai dengan kenaikan rasio NPL dari 1,78% pada Maret 2025 menjadi 1,91% pada Maret 2026. Pemburukan kualitas kredit di wilayah ini terjadi sejalan dengan meningkatnya nominal NPL sebesar Rp843,17 miliar. Salah satu faktor yang memengaruhi pemburukan kualitas kredit di wilayah ini adalah meningkatnya rasio NPL di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki pangsa kredit sebesar 38,89% terhadap total penyaluran kredit di wilayah Bali Nusra. Di provinsi ini, rasio NPL meningkat dari 1,64% menjadi 1,92%, seiring dengan kenaikan nominal kredit bermasalah sebesar Rp579,34 miliar. Berdasarkan lapangan usaha, peningkatan nominal NPL di Provinsi Nusa Tenggara Barat terutama berasal dari sektor konstruksi serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada sektor konstruksi, nominal NPL meningkat sebesar Rp270,04 miliar sehingga rasio NPL melonjak dari 15,06% menjadi 44,22%. Sementara itu, pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, nominal NPL meningkat sebesar Rp152,07 miliar yang mendorong rasio NPL naik dari 9,92% menjadi 11,86%. Tingginya rasio NPL pada kedua sektor tersebut yang jauh melampaui 5% mengindikasikan bahwa risiko kredit masih berada pada level yang

tinggi. Oleh karena itu, kedua sektor tersebut perlu menjadi fokus penguatan pengelolaan risiko kredit guna mencegah peningkatan kredit bermasalah yang dapat memberikan tekanan lebih lanjut terhadap kualitas aset perbankan di wilayah Bali Nusra.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, kualitas kredit di wilayah Papua dan Maluku juga menunjukkan penurunan yang ditandai dengan kenaikan rasio NPL dari 2,15% pada Maret 2025 menjadi 2,55% pada Maret 2026. Pemburukan kualitas kredit di wilayah ini terjadi seiring dengan meningkatnya nominal NPL sebesar Rp713,41 miliar. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penurunan kualitas kredit di wilayah tersebut adalah meningkatnya risiko kredit di Provinsi Papua (porsi kredit 18,24% dari total kredit yang disalurkan di wilayah Papua dan Maluku). Di Provinsi ini, rasio NPL meningkat dari 2,45% menjadi 3,44%, seiring dengan kenaikan nominal kredit bermasalah sebesar Rp261,42 miliar. Berdasarkan sektor ekonomi, peningkatan nominal NPL di Provinsi Papua terutama berasal dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor rumah tangga. Pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, nominal NPL meningkat sebesar Rp114,15 miliar sehingga rasio NPL melonjak dari 3,26% menjadi 18,12%. Sementara itu, pada sektor rumah tangga, nominal NPL meningkat sebesar Rp84,59 miliar yang mendorong rasio NPL naik dari 0,96% menjadi 1,63%. Lonjakan rasio NPL pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum di atas 5% menunjukkan tingginya risiko kredit pada sektor tersebut. Oleh karena itu, penguatan pengelolaan risiko kredit, perlu terus dilakukan guna menjaga kualitas aset perbankan dan mendukung

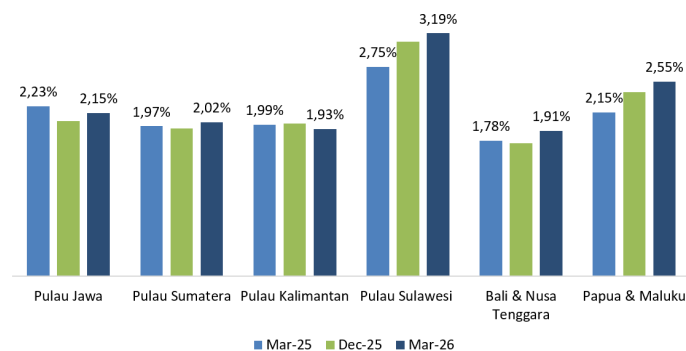
keberlanjutan fungsi intermediasi di wilayah Papua dan Maluku.

Tabel 20 NPL Gross Lokasi Berdasarkan Sektor Ekonomi Periode Maret 2026

		Pertanian	Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan	Listrik, Gas dan Air	Konstruksi	Perdagangan Besar dan Eceran	Pengangkutan dan Pergudangan	Rumah Tangga	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	Total
Jawa	NPL %	2,88%	0,31%	2,76%	0,22%	1,35%	3,77%	0,99%	2,79%	0,34%	2,15%
Sumatera	NPL %	1,66%	0,93%	0,98%	0,25%	5,06%	3,92%	1,66%	2,00%	3,94%	2,02%
Kalimantan	NPL %	0,81%	1,98%	0,60%	0,02%	5,34%	3,49%	0,74%	2,36%	1,99%	1,93%
Sulawesi	NPL %	5,76%	0,45%	0,89%	0,02%	6,80%	6,43%	2,96%	1,87%	0,73%	3,19%
Bali & Nusa Tenggara	NPL %	6,44%	0,01%	1,33%	0,39%	12,58%	3,07%	4,60%	1,37%	0,81%	1,91%
Papua & Maluku	NPL %	0,74%	0,49%	0,55%	0,00%	13,88%	4,58%	4,65%	2,43%	2,09%	2,55%
Total		2,31%	0,70%	2,23%	0,20%	1,93%	3,84%	1,09%	2,47%	0,37%	2,14%

Sumber: LBUT, diolah

Grafik 34 Tren Rasio NPL Gross berdasarkan Lokasi Proyek (Spasial)



Sumber: LBUT, diolah

2. Risiko Pasar

Pada triwulan I 2026, dinamika perekonomian global masih diwarnai sejumlah ketidakpastian antara lain diakibatkan oleh konflik geopolitik utamanya konflik AS-Iran yang masih berada pada fase eskalasi tinggi meski mulai muncul upaya diplomasi. Potensi perlambatan ekonomi juga terlihat dari laju inflasi global yang cenderung meningkat, seiring dengan melonjaknya harga energi global akibat dinamika geopolitik.

Upaya diplomasi antara AS-Iran untuk melakukan gencatan senjata mendapatkan respon yang cukup baik dari pasar yang tecermin dari *Volatility Index* (VIX) menurun

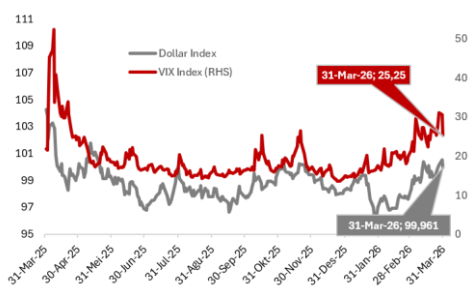
pada akhir triwulan I 2026, setelah sebelumnya terus mengalami peningkatan sejak awal tahun 2026.

Di tengah dinamika global tersebut, sejumlah bank sentral memutuskan untuk mempertahankan suku bunga, salah satunya yaitu The Fed pada *Federal Open Market Committee* (FOMC) 17-18 Maret 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan Fed Funds Rate (FFR) di kisaran 3,50%-3,75%.

Di sisi lain, mata uang dolar AS cenderung mengalami pelemahan terhadap mata uang negara utama sepanjang triwulan I 2026, dipicu antara lain oleh dinamika dan perkembangan kondisi fiskal serta ekonomi

AS selama terjadinya konflik geopolitik. Sementara itu, arah suku bunga The Fed pada tahun 2026 diperkirakan akan cenderung lebih ketat seiring dengan inflasi yang tetap persisten tinggi, membuat imbal hasil obligasi di pasar AS lebih menarik sehingga berpotensi mendorong *capital outflow* dari *Emerging Market* (EM) ke AS. Nilai obligasi pada EM yang turun dapat memicu kerugian pada portofolio investasi bank. Selain itu, bank yang memiliki eksposur dalam USD (pembiayaan, investasi, *trading*) berpotensi mengalami kerugian nilai tukar dan *market losses*.

Grafik 35 Dolar Index dan VIX Index



Sumber: Reuters

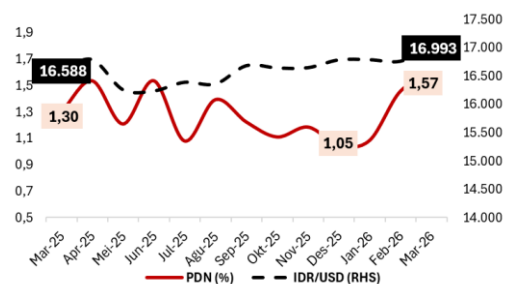
2.1 Risiko Nilai Tukar

Pada akhir Maret 2026, nilai tukar Rupiah terhadap USD tercatat sebesar Rp16.993/USD, melemah 2,38% dari posisi akhir Maret 2025 sebesar Rp16.588/USD. Namun demikian, pelemahan rupiah tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan mata uang negara lainnya, seperti India dan Jepang yang masing-masing melemah sebesar -8,57% dan -5,52% *point-to-point* posisi akhir Maret 2026 terhadap akhir Maret 2025.

Seiring pelemahan nilai tukar tersebut, Posisi Devisa Neto (PDN) perbankan pada Maret 2025 masih terjaga rendah sebesar 1,57%, dan meningkat dari tahun lalu

sebesar 1,30%. PDN masih berada pada posisi *Long* sehingga dampaknya terhadap pendapatan perbankan masih positif. Rasio PDN tersebut menunjukkan eksposur risiko nilai tukar terhadap portofolio valuta asing bank yang terjaga dan masih berada jauh di bawah *threshold* 20%. Berdasarkan individu bank, sebagian besar bank devisa (55 bank) memiliki rasio PDN rendah (<2%).

Grafik 36 PDN dan Pergerakan Nilai Tukar



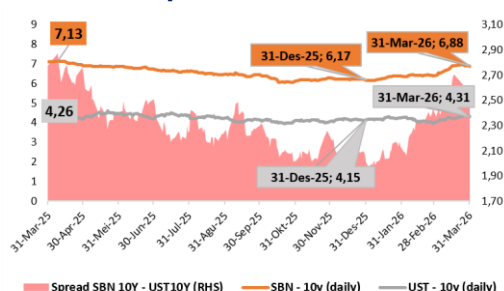
Sumber: Bank Indonesia

2.2 Risiko Suku Bunga

Ketidakpastian global akibat lonjakan harga minyak dan komoditas dunia berdampak negatif terhadap rantai pasok perdagangan sehingga menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi dunia dan meningkatkan tekanan inflasi, termasuk inflasi AS yang mengalami peningkatan diiringi dengan resiliensi pasar tenaga kerja di AS. Selain itu, pasar menangkap sinyal bahwa peluang penyesuaian suku bunga The Fed akan terbatas dengan kecenderungan *hawkish* pada 2026. Seiring dengan proyeksi pasar terhadap perkembangan suku bunga FFR tersebut, *Yield US Treasury* (UST) cenderung meningkat, mencerminkan ekspektasi pasar terhadap kondisi fiskal AS dan risiko global. Di dalam negeri, *yield* Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun juga turut mengalami peningkatan, diiringi

spread antara *yield* UST dan SBN yang cenderung melebar. Melebarnya *spread* tersebut dapat mencerminkan meningkatnya *sovereign risk* Indonesia, sehingga mendorong *capital outflow* yang tercatat keluar dari pasar dalam negeri.

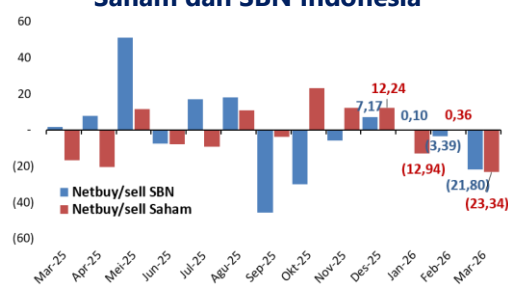
Grafik 37 Spread Yield UST dan SBN



Sumber: PHEI dan Reuters

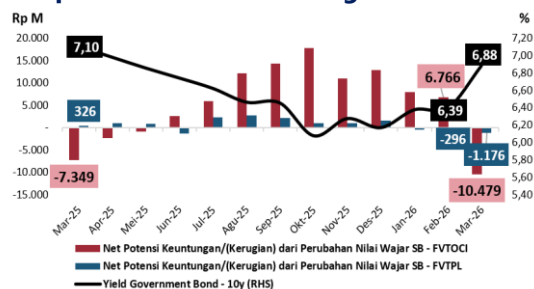
Pada pasar keuangan, meningkatnya premi risiko domestik dan realokasi dana oleh investor dari *emerging market* seperti Indonesia ditandai *capital outflow* atau *net sell* transaksi non-residen di Pasar SBN sebesar Rp13,27 triliun selama setahun terakhir. Selain itu, transaksi investor asing atau non-residen di pasar saham kembali mencatatkan *capital outflow* sebesar Rp7,31 triliun dari Maret 2025 hingga Maret 2026. *Shifting* dana investor dan perubahan sikap dari *risk-on* menjadi *risk off* di pasar keuangan Indonesia tersebut, turut mendorong terjadinya pelemahan nilai tukar dalam negeri.

Grafik 38 Transaksi Non Residen di Pasar Saham dan SBN Indonesia

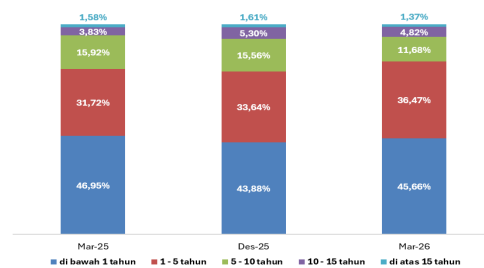


Sumber: DJPPR dan BEI

Di perbankan, risiko suku bunga yang dilihat dari nilai wajar berdasarkan *mark-to-market* surat berharga masih terjaga. Pada Maret 2026, *yield* SBN 10 tahun naik menjadi 6,88% dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2025 sebesar 6,17%, meskipun masih lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Nilai wajar portofolio obligasi kategori *Fair Value Through Other Comprehensive Income* (FVTOCI) mulai menunjukkan potensi kerugian, diikuti juga oleh obligasi kategori *Fair Value Through Profit or Loss* (FVTPL) yang mulai mencatatkan peningkatan *loss* setelah beberapa periode sebelumnya mencatatkan profit. Namun demikian, terdapat indikasi *shifting* kepemilikan SSB dengan tenor pendek hingga menengah, terlihat dari porsi SSB dengan tenor 1-5 tahun yang meningkat $\pm 5\%$ (yoy). Dengan kata lain, risiko perubahan suku bunga masih cukup terjaga dengan mengurangi SSB berdurasi panjang yang lebih sensitif terhadap kenaikan *yield*.

Grafik 39 Potensi Keuntungan/Kerugian Kepemilikan Surat Berharga Perbankan

Sumber: Reuters dan LBUT

Grafik 40 Porsi Kepemilikan Surat Berharga Perbankan (FVTPL dan FVTOCI) per Tenor

Sumber: LBUT

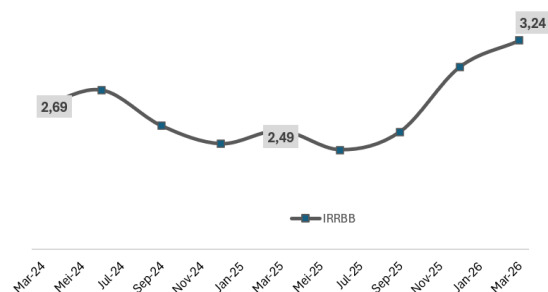
Tabel 21 Porsi Kepemilikan Surat Berharga Perbankan berdasarkan Kategori

Kategori SSB	Nominal SSB (Rp T)			Porsi SSB (%)		
	Mar-25	Des-25	Mar-26	Mar-25	Des-25	Mar-26
FVTOCI	1.013,25	1.234,88	1.250,46	44,90%	47,84%	46,53%
FVTPL	263,54	292,26	355,46	11,68%	11,32%	13,23%
AC	979,83	1.054,37	1.081,73	43,42%	40,84%	40,25%
Total Industri	2.256,62	2.581,51	2.687,65	100%	100%	100%

Sumber: LBUT

Risiko suku bunga yang berasal dari portofolio *banking book* tecermin pada *Interest Rate Risk in the Banking Book* (IRRBB) yang berada pada level rendah sebesar 3,24%, meski meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 2,49%. Adapun peningkatan IRRBB tersebut di tengah ekspektasi peningkatan suku bunga, sehingga dapat meningkatkan risiko. Naiknya suku bunga tersebut dapat berdampak pada *cost of fund* yang lebih mahal, mengingat suku bunga kewajiban yang lebih cepat disesuaikan dibandingkan suku bunga aset. Peningkatan IRRBB didorong oleh kewajiban dengan suku bunga tetap jangka panjang yang tumbuh sebesar 42,55% (yoy) dan melampaui pertumbuhan aset suku bunga tetap jangka panjang yang hanya tumbuh 9,70% (yoy). Pertumbuhan kewajiban jangka panjang tersebut juga lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,22% (yoy), utamanya didorong oleh

pinjaman yang diterima dan kewajiban repo. Sementara itu, aset jangka panjang yang tumbuh melambat dibanding tahun sebelumnya utamanya disebabkan perlambatan pada kredit yang hanya tumbuh 5,53% (yoy) dari tahun lalu yang tumbuh 24,41% (yoy). Namun demikian surat berharga yang dimiliki oleh perbankan tumbuh sebesar 23,29% (yoy) setelah tahun sebelumnya terkontraksi - 11,96% (yoy), menopang pertumbuhan aset jangka panjang secara tahunan.

Grafik 41 Perkembangan Parameter IRRBB

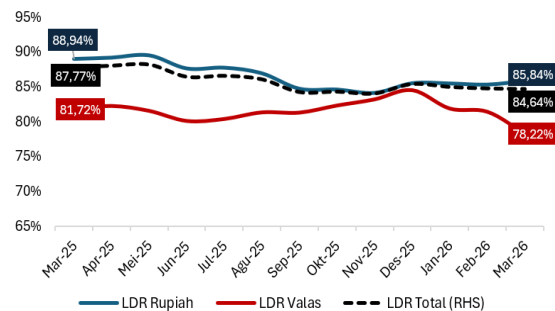
Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK

3. Risiko Likuiditas

Pada periode laporan, kondisi likuiditas perbankan masih cukup memadai di tengah tumbuhnya penyaluran kredit. Hal ini tecermin dari rasio LDR yang masih terjaga berada dalam *range* (78%-92%). Kemampuan likuiditas bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek juga tetap terjaga, tecermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masih berada jauh di atas *threshold*, rasio *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) di atas 100%, serta kemampuan bank dalam mengelola dana stabil atau *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) yang masih berada di atas *threshold* (100%).

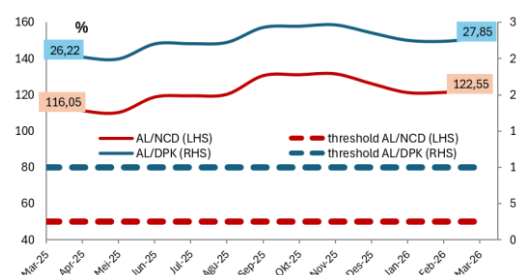
LDR perbankan tercatat sebesar 84,64%, menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 87,77%. Penurunan tersebut sejalan dengan turunnya LDR rupiah dari 88,94% pada Maret 2025 menjadi 85,84% pada bulan laporan. Selain itu, rasio AL/NCD dan AL/DPK masing-masing masih terjaga sebesar 122,55% dan 27,85%, jauh di atas *threshold* (masing-masing sebesar 50% dan 10%), dan meningkat dari tahun sebelumnya masing-masing sebesar 116,05% dan 26,22%. Sejalan dengan pertumbuhan DPK yang cukup tinggi sebesar 13,55% (yoy), *Non Core Deposit* juga tercatat tumbuh *double digit* sebesar 14,22% (yoy). Peningkatan sumber dana bank yang cukup signifikan tersebut mendorong peningkatan kepemilikan alat likuid yang dimiliki oleh bank sehingga tumbuh mencapai 20,62% (yoy).

Grafik 42 LDR berdasarkan Valuta



Sumber: LBUT

Grafik 43 AL/NCD dan AL/DPK



Sumber: Bank Indonesia

Selanjutnya, untuk mengantisipasi penarikan dana dalam jangka pendek (30 hari ke depan), likuiditas perbankan masih terpantau memadai. Hal tersebut tecermin dari LCR perbankan yang berada jauh di atas 100% yaitu sebesar 193,64%, meskipun menurun dibandingkan tahun lalu sebesar 204,77%. Kenaikan alat likuid perbankan dari tahun sebelumnya turut mendorong *High Quality Liquid Asset* (HQLA) sehingga tumbuh sebesar 6,38% (yoy). Namun demikian, *Net Cash Outflow* (NCO) diproyeksikan meningkat lebih tinggi sebesar 12,50% (yoy) yang menyebabkan LCR lebih rendah dari Maret 2025.

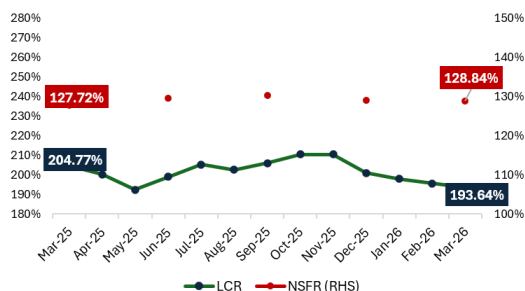
Tabel 22 Perkembangan LCR Perbankan

Kelompok	HQLA (Rp T)		
	Mar-25	Dec-25	Mar-26
KBMI 1	289	275	273
KBMI 2	576	530	521
KBMI 3	713	844	788
KBMI 4	1,327	1,472	1,508
TOTAL HQLA	2,905	3,122	3,090

Kelompok	NCO (Rp T)		
	Mar-25	Dec-25	Mar-26
KBMI 1	142	118	118
KBMI 2	229	190	191
KBMI 3	305	381	351
KBMI 4	743	865	937
TOTAL NCO	1,418	1,553	1,596

Kelompok	LCR (%)		
	Mar-25	Dec-25	Mar-26
KBMI 1	203.29	234.02	232.42
KBMI 2	251.52	278.30	273.35
KBMI 3	233.87	221.81	224.58
KBMI 4	178.70	170.27	160.98
LCR Industri	204.77	200.97	193.64

Sumber: OJK

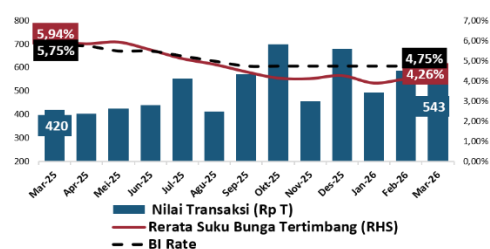
Grafik 44 Perkembangan LCR dan NSFR

Sumber: APOLO

Lebih lanjut, kemampuan bank dalam memelihara pendanaan yang stabil juga masih memadai, tecermin dari rasio pendanaan stabil bersih atau NSFR yang terjaga pada level 128,84%, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 127,72%.

Untuk memenuhi kondisi likuiditas jangka pendek, bank juga dapat meminjam dan/atau menyalurkan dana melalui PUAB. Akses bank terhadap sumber likuiditas di PUAB masih cukup terjaga, dengan volume transaksi yang meningkat diiringi suku bunga rata-rata tertimbang yang menurun.

Penurunan suku bunga PUAB terjadi seiring dengan suku bunga acuan BI *rate* yang turun sebesar 100 bps dari tahun sebelumnya menjadi 4,75% pada Maret 2026. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kebutuhan dana yang bersifat *short term* oleh bank, antara lain untuk pemenuhan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) BI ataupun pemenuhan *cash outflow* lainnya.

Grafik 45 Perkembangan Suku Bunga PUAB

Sumber: LBUT Harian

4. Risiko Hukum

4.1 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank)

Selama periode Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2026, Pengawas Bank telah melaporkan 7 (tujuh) Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) yang terjadi di 4 (empat) Kantor Bank (KB) kepada Satuan Kerja Pemeriksaan Khusus Perbankan. Selanjutnya terhadap PKP yang telah diterima pada Triwulan I maupun pada periode sebelumnya, sebanyak 8 (delapan) PKP pada 8 (delapan) KB berstatus masih dalam proses, dan 6 (enam) PKP pada 5 (lima) KB telah dilimpahkan untuk penanganan lebih lanjut kepada Satuan Kerja Penyidikan. Terdapat 1 (satu) PKP pada 1 (satu) KB dikembalikan kepada Pengawas.

Selain itu, dalam rangka melakukan pendalaman terhadap indikasi penyimpangan ketentuan perbankan yang

ditemukan oleh Satuan Kerja Pengawasan Bank, selama Triwulan I-2026 telah dilaksanakan Pemeriksaan Khusus Indikasi Penyimpangan Ketentuan Perbankan (Riksus IPKP) dan Riksus bersama Pengawas terhadap 7 (tujuh) KB.

Tabel 23 Statistik Penanganan Penyimpangan Ketentuan Perbankan

Tahapan Kegiatan	Triwulan I-2026	
	Total	
	KB	PKP
1. PKP yang diterima	4	7
2. PKP dalam proses *)	8	8
3. PKP yang dikembalikan *)	1	1
4. PKP yang dilimpahkan kepada Penyidik OJK *)	5	6

*) Termasuk *carryover* PKP yang diterima dari periode sebelumnya
Sumber: OJK

4.2 Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi

Selama Triwulan I-2026, OJK telah memberikan keterangan Ahli dan/atau Saksi sebanyak 5 (lima) kali dalam rangka memenuhi 2 (dua) permintaan keterangan Ahli dan 1 (satu) permintaan keterangan sebagai Saksi dari Kepolisian; serta 2 (dua)

permintaan keterangan Ahli dari Kejaksaan terkait tindak pidana perbankan.

Tabel 24 Pemberian Keterangan Ahli/Saksi

No.	APH	Permintaan		
		Ahli	Saksi	Total
1	Polri	2	1	3
2	Kejaksaan RI	2	0	2
3	Penyidik OJK	0	0	0
Total		4	1	5

Sumber: OJK

Keterangan Ahli yang diberikan mencakup kasus-kasus yang ditangani oleh OJK maupun kasus yang dilaporkan oleh bank atau pihak lainnya kepada Polri dan Kejaksaan. Pemberian keterangan ini dilakukan berdasarkan kompetensi dalam bidang perbankan dan pengawasan bank, serta pengalaman pegawai dalam menangani dugaan tipibank. Adapun keterangan Saksi diberikan atas permintaan Kejaksaan terkait kasus yang tengah dalam proses persidangan, yang sebelumnya telah ditangani oleh OJK.

5 Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

5 Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan

Pada periode laporan, OJK menerbitkan dua ketentuan terkait perbankan yaitu dalam bentuk satu POJK dan satu PADK. Secara umum, ketentuan-ketentuan tersebut mengatur tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan oleh Bank Umum serta Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum

1. Pengaturan Perbankan

Pada triwulan I-2026, OJK menerbitkan dua ketentuan terkait perbankan, yaitu dalam bentuk satu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan satu Peraturan Anggota Dewan Komisiner (PADK), sebagai berikut:

1.1 POJK Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan oleh Bank Umum

Dalam rangka meningkatkan ketangguhan, daya saing industri perbankan, dan pembangunan ekonomi nasional pada sektor strategis serta mendukung program alih pengetahuan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia sektor perbankan, diperlukan pengaturan yang adaptif dan seimbang atas penggunaan tenaga kerja asing. Untuk mengembangkan kapasitas sumber daya manusia perbankan nasional diperlukan peningkatan pelaksanaan penugasan pegawai bank yang merupakan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dalam rangka pertukaran pegawai atau *intracorporate transferee*. POJK Nomor 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan sudah tidak sesuai dengan

kebijakan ketenagakerjaan nasional dan kebutuhan industri perbankan, sehingga perlu diganti. Atas pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan POJK tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan oleh Bank Umum.

Dalam POJK ini diatur mengenai Prinsip penggunaan TKA, yang terdiri dari jabatan dan bidang tugas yang dapat menggunakan TKA, jangka waktu penggunaan TKA yaitu paling lama 5 (lima) tahun, termasuk syarat dan kewajiban bagi Bank atau Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (KPBLN) dalam penggunaan TKA; dan tata cara penggunaan TKA, yaitu perencanaan penggunaan TKA, permohonan persetujuan, pelaporan pengangkatan TKA, kewajiban pelaksanaan program alih pengetahuan, penyampaian laporan realisasi, perpanjangan jangka waktu penggunaan TKA, dan pemberhentian TKA.

1.2 PADK Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum

Teknologi Informasi (TI) memiliki peranan penting dalam mendukung operasional dan bisnis industri perbankan. Perkembangan TI

yang sangat cepat menawarkan beragam alternatif solusi dan kemudahan bagi industri perbankan. Di sisi lain, peningkatan pemanfaatan TI juga dapat memunculkan risiko yang perlu diidentifikasi, dimitigasi, bahkan dikendalikan, sehingga tidak mengganggu bisnis perbankan. Oleh karena itu, Bank perlu memperkuat tata kelola dalam penyelenggaraan TI sehingga pemanfaatan TI dapat memberikan nilai tambah bagi Bank melalui optimalisasi sumber daya untuk memitigasi risiko yang dihadapi oleh Bank.

PADK OJK ini mengatur antara lain:

- a. Penerapan aspek tata kelola TI, termasuk peran dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan komite pengarah TI, serta satuan kerja TI;
- b. Proses penyusunan arsitektur TI dan rencana strategis TI;
- c. Proses manajemen risiko TI, termasuk pengamanan informasi dan jaringan komunikasi;
- d. Penggunaan pihak penyedia jasa TI;
- e. Perizinan atas penempatan sistem elektronik dan pemrosesan transaksi berbasis TI di luar wilayah Indonesia;
- f. Pengelolaan data dan perlindungan data pribadi;
- g. Penyediaan jasa TI oleh bank;
- h. Pengendalian dan audit intern; dan
- i. Pelaporan.

2. Kelembagaan Perbankan

2.1 Bank Umum Konvensional (BUK)

2.1.1 Perizinan

Pada triwulan I-2026, telah diselesaikan 10 (sepuluh) perizinan kelembagaan BUK, terdiri dari 1 (satu) pembukaan Kantor Wilayah, 1 (satu) pembukaan Kantor Cabang, 5 (lima) penutupan Kantor Cabang, dan 3 (tiga) peningkatan status Kantor Cabang Pembantu menjadi Kantor Cabang.

2.1.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan I-2026, terdapat 112.959 jaringan kantor BUK, terdiri dari 112.889 jaringan kantor di dalam negeri dan 70 jaringan kantor di luar negeri. Jaringan kantor terbanyak masih didominasi oleh terminal perbankan elektronik (ATM/CDM/CRM) sebanyak 89.361 unit.

Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat penurunan sebanyak 348 jaringan kantor, terutama pada Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) dan terminal perbankan elektronik (ATM/CDM/CRM) yang masing-masing turun sebesar 75 unit dan 289 unit menjadi 18.316 unit Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) dan 89.361 unit terminal perbankan elektronik pada triwulan – I 2026.

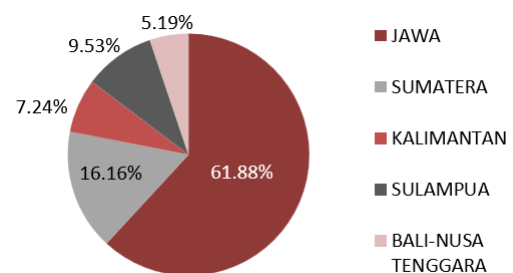
Tabel 25 Jaringan Kantor BUK

JARINGAN KANTOR		2025 TW IV	2026 TW I	Δ
1	Kantor Pusat Operasional	37	37	-
2	Kantor Pusat Non Operasional	53	53	-
3	Kantor Cabang dari bank yang berkedudukan di Luar Negeri (KCBLN)	7	7	-
4	Unit Usaha Syariah	19	19	-
5	Kantor Wilayah	149	147	(2)
6	Kantor Cabang (Dalam Negeri)	2,698	2,698	-
7	Kantor Cabang (Luar Negeri)	17	17	-
8	Kantor Cabang Pembantu dari bank yang berkedudukan di Luar Negeri	17	17	-
9	Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	18,391	18,316	(75)
10	Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri)	6	6	-
11	Kantor Fungsional (KF)	1,221	1,230	9
12	Kantor dibawah KCP KCBLN yg tidak termasuk KF	9	9	-
13	Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	5	5	-
14	Terminal Perbankan Elektronik (ATM/CDM/CRM)	89,650	89,361	(289)
JARINGAN KANTOR UUS				
15	Kantor Cabang (Dalam Negeri)	157	157	-
16	Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	247	249	2
17	Kantor Kas	-	-	-
18	Kantor Fungsional	200	203	3
19	Payment Point	-	-	-
20	Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung	-	-	-
21	Terminal Elektronik (ATM/CDM/CRM)	200	203	3
22	Layanan Syariah Bank Umum	222	222	-
TOTAL		113,307	112,959	(348)

Sumber: APOLO OJK

Ket: merupakan jaringan kantor BUK di seluruh Indonesia

Berdasarkan pembagian wilayah untuk jaringan kantor BUK di dalam negeri, sebaran jaringan kantor tersebut sebagian besar berada di pulau Jawa sejumlah 69.854 jaringan kantor (61,88%), diikuti pulau Sumatera 18.245 (16,16%), Sulampua 10.755 (9,53%), Kalimantan 8.175 (7,24%), dan Bali-Nusa Tenggara 5.860 (5,19%). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat penurunan jaringan kantor pada beberapa wilayah dengan penurunan terbanyak di wilayah Jawa dan Sulampua, sementara wilayah Sumatera dan Kalimantan mengalami peningkatan.

Grafik 46 Penyebaran Jaringan Kantor BUK

Sumber: APOLO OJK

2.2 Bank Perekonomian Rakyat (BPR)

2.2.1 Perizinan

Selama periode Triwulan I Tahun-2026, telah diselesaikan Perizinan Kelembagaan BPR yang terdiri dari Perizinan Penggabungan sebanyak 38 BPR menjadi 12 BPR dan Perizinan Pencabutan Izin Usaha sebanyak 6 BPR.

2.2.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan I-2026, terdapat 1.289 BPR dengan 8.123 jaringan kantor. Dari jaringan kantor tersebut, 5.840 di antaranya merupakan kantor bank yang meliputi Kantor Pusat (KP), Kantor Cabang (KC), dan Kantor Kas (KK). Terdapat perbedaan data perubahan jumlah BPR dengan data perizinan disebabkan antara lain terdapat perbedaan antara periode perizinan dengan periode efektif berlakunya perizinan karena adanya masa proses transisi, termasuk *carry over* hasil perizinan periode sebelumnya.

Tabel 26 Jaringan Kantor BPR

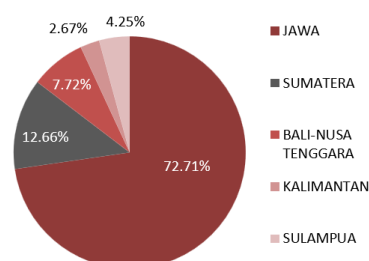
JARINGAN KANTOR	2025 TW IV	2026 TW I	Δ
- Kantor Pusat (KP)	1,312	1,289	(23)
- Kantor Cabang (KC)	1,992	1,993	1
- Kantor Kas (KK)	2,563	2,558	(5)
- ATM	476	462	(14)
- EDC	1,861	1,821	(40)
TOTAL	8,204	8,123	(81)

Sumber: OJK

Selain itu, terdapat perubahan mengenai jaringan kantor sehubungan dengan ketentuan pelaporan terbaru bagi BPR dan BPRS yang mengatur di dalamnya terkait informasi jenis jaringan kantor, termasuk ATM dan EDC.

Berdasarkan lokasi, penyebaran jaringan kantor BPR (termasuk ATM dan EDC) masih terpusat di wilayah Jawa dengan porsi sebesar 72,71% (5.906 jaringan kantor), diikuti wilayah Sumatera sebesar 12,86% (1.028 jaringan kantor). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat penurunan jaringan kantor hampir di seluruh wilayah Indonesia dengan terbanyak di wilayah Jawa dan diikuti oleh wilayah Sumatera.

Grafik 47 Penyebaran Jaringan Kantor BPR



Sumber: OJK

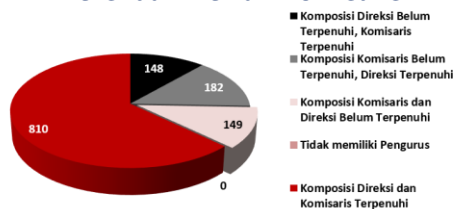
2.2.3 Tata Kelola

Penerapan tata kelola BPR dan BPRS diatur dalam masing-masing POJK Nomor 4/POJK.03/2015 (BPR) dan POJK Nomor 24/POJK.03/2018 (BPRS) serta dibedakan sesuai besaran modal inti. Besaran modal inti BPR dan BPRS akan menentukan antara lain syarat pemenuhan minimal jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan jumlah DPS. Selanjutnya, OJK juga telah menerbitkan POJK Nomor 9 Tahun 2024 mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan BPRS guna menyempurnakan dua POJK sebelumnya serta mulai efektif digunakan per tanggal 1 Juli 2024.

Sampai dengan Maret 2026, terdapat 810 BPR yang sudah memenuhi masing-masing jumlah anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan yang dipersyaratkan. Sementara itu, masih terdapat 149 BPR yang belum memenuhi komposisi anggota Direksi dan Komisaris sesuai persyaratan. Tantangan dalam pemenuhan Direksi dan Dewan Komisaris BPR umumnya dipengaruhi oleh faktor lokasi BPR yang berada di *remote area*, persaingan remunerasi dengan LJK lain, serta keterbatasan SDM yang memiliki persyaratan minimal pengalaman dan sertifikasi profesi sebagaimana dipersyaratkan ketentuan.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola BPR, OJK juga secara aktif melakukan sosialisasi kepada BPR.

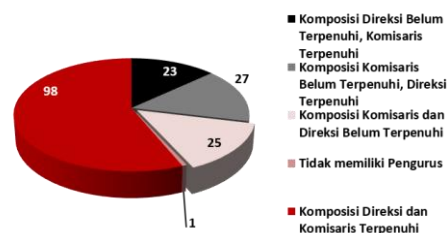
Grafik 48 Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris



Sumber: OJK

Untuk BPRS, sampai dengan Maret 2026, terdapat 98 BPRS yang sudah memenuhi masing-masing jumlah anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan yang dipersyaratkan. Sementara itu, masih terdapat 25 BPRS yang belum memenuhi jumlah anggota keduanya untuk Direksi dan Dewan Komisaris sesuai persyaratan dan terdapat satu BPRS yang masih belum memiliki susunan kepengurusan.

Grafik 49 Jumlah BPRS berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris



Sumber: OJK

Tabel 27 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah

JARINGAN KANTOR	2025	2026	Δ
	TW IV	TW I	
1 Kantor Pusat Operasional Bank Umum Syariah	8	8	-
2 Kantor Pusat Non Operasional Bank Umum Syariah	8	8	-
3 Kantor Wilayah Bank Umum Syariah	21	21	-
4 Kantor Cabang (Dalam Negeri) Bank Umum Syariah	449	449	-
5 Kantor Cabang (Luar Negeri) Bank Umum Syariah	2	2	-
6 Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) Bank Umum Syariah	1,646	1,651	5
7 Kantor Fungsional Bank Umum Syariah	1,857	1,853	(4)
8 Kantor Perwakilan Bank Umum Syariah di Luar Negeri	-	-	-
9 Terminal Elektronik (ATM/CDM/CRM) Bank Umum Syariah	8,067	8,076	9
Layanan Syariah Bank Umum	12,058	12,068	10

Sumber: APOLO OJK

2.3 Perbankan Syariah

2.3.1 Perizinan

Pada triwulan I-2026, telah diselesaikan 4 (empat) Perizinan Kelembagaan BUS dan UUS yang terdiri dari 2 (dua) Perizinan pembukaan Kantor Wilayah, 1 (satu) Perizinan Pemisahan Unit Usaha Syariah berupa Izin Prinsip Pendirian BUS Baru dan 1 (satu) Cabut Izin Usaha UUS. Sementara itu, tidak terdapat permohonan kelembagaan dan pencabutan izin usaha BPRS yang telah diselesaikan.

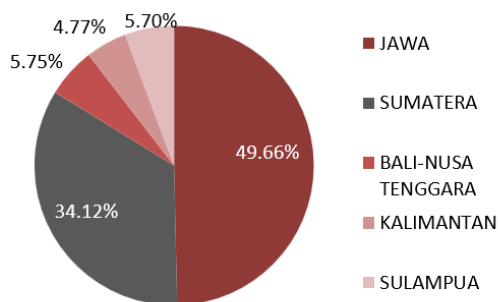
2.3.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan I-2026, terdapat 12.068 jaringan kantor BUS, dengan 3 (tiga) di antaranya merupakan jaringan kantor luar negeri (dua KC dan satu terminal elektronik). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, secara total terdapat peningkatan sebanyak 10 jaringan kantor BUS, dengan kenaikan terbesar yaitu pada Terminal Elektronik dan Kantor Cabang Pembantu Dalam Negeri Umum Syariah.

Sebaran jaringan kantor BUS dalam negeri sebagian besar berada di wilayah Jawa dan Sumatera masing-masing memiliki porsi 49,66% (5.991 kantor) dan 34,12% (4.117 kantor). Selanjutnya diikuti Bali-Nusa Tenggara (5,75%, 694 kantor), Sulampua (5,70%, 688 kantor), dan Kalimantan (4,77%, 575 kantor).

Terdapat peningkatan jaringan kantor di seluruh wilayah, dengan kenaikan terbanyak pada wilayah Jawa dan Sumatera.

Grafik 50 Penyebaran Jaringan Kantor BUS



Sumber: APOLO OJK

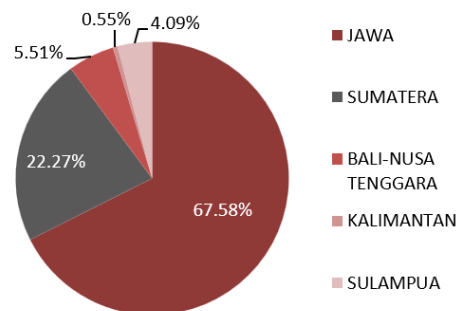
Untuk BPRS, pada periode laporan terdapat 1.271 jaringan kantor, meningkat 16 jaringan kantor dari triwulan sebelumnya. Lebih lanjut, sebaran jaringan kantor BPRS umumnya terkonsentrasi di wilayah Jawa (67,58%, 859 kantor), diikuti Sumatera (22,27%, 283 kantor), Bali-Nusa Tenggara (5,51%, 70 kantor), Sulampua (4,09%, 52 kantor), dan Kalimantan (0,55%, 7 kantor).

Tabel 28 Jaringan Kantor BPRS

JARINGAN KANTOR	2025 TW IV	2026 TW I	Δ
- Kantor Pusat (KP)	174	174	-
- Kantor Cabang (KC)	225	229	4
- Kantor Kas (KK)	300	297	(3)
- ATM	72	76	4
- EDC	484	495	11
TOTAL	1,255	1,271	16

Sumber: Laporan Bulanan BPRS, diolah

Grafik 51 Penyebaran Jaringan Kantor BPRS



Sumber: OJK

6 Koordinasi Antar Lembaga terkait Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

6 Koordinasi Antar Lembaga Terkait Perbankan

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, OJK terus melakukan koordinasi dengan lembaga/otoritas terkait, baik secara bilateral maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Pada triwulan I tahun 2026 tetap dalam kondisi terjaga, di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global, seiring eskalasi konflik di Timur Tengah. Selain itu, OJK juga turut aktif dalam fora internasional, antara lain *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS).

1. Koordinasi Multi-Lembaga dalam menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Sesuai mandat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), maka Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melakukan koordinasi secara berkala dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK).

Pada Senin, 27 April 2026, Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan Ketua Dewan Komisiner LPS melaksanakan Rapat Berkala KSSK II tahun 2026. Dalam siaran Pers KSSK tersebut dapat disimpulkan bahwa, **kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan selama triwulan I tahun 2026 tetap dalam kondisi terjaga, di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global, seiring eskalasi konflik di Timur Tengah.**

Prospek perekonomian dunia makin melemah akibat konflik di Timur Tengah. Dampak konflik pada gangguan pasokan global mendorong kenaikan harga minyak dunia dan sejumlah komoditas penting lainnya, sehingga memengaruhi kelancaran rantai pasok perdagangan antarnegara. OJK bersama dengan KSSK menyepakati untuk terus mencermati dan melakukan asesmen *forward looking* atas kinerja perekonomian dan sektor keuangan terkini seiring risiko ketidakpastian ekonomi global yang meningkat, sekaligus melakukan upaya mitigasi secara terkoordinasi, baik antarlembaga anggota KSSK maupun dengan Kementerian/Lembaga lain.

Sebagai respons terhadap dinamika di tataran global, serta perekonomian dan pasar domestik, OJK mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperlukan guna menjaga SSK dan mendukung pertumbuhan ekonomi, sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka reformasi pasar modal Indonesia, OJK menetapkan 8 (delapan) rencana aksi yang berfokus pada peningkatan likuiditas, transparansi, tata kelola, dan sinergi. Saat ini, OJK bersama BEI dan KSEI telah menuntaskan seluruh agenda penguatan transparansi, yaitu meliputi: penyediaan data kepemilikan

saham di atas 1%, peningkatan batas minimum *free float* menjadi 15%, implementasi pengumuman *High Shareholding Concentration* (HSC), penguatan granularitas data kepemilikan saham, dan pelaporan informasi *Ultimate Beneficial Owner* (UBO) dengan kepemilikan $\geq 10\%$;

- 2) Untuk mendukung akselerasi program 3 juta rumah dan pembiayaan UMKM, OJK telah menetapkan sejumlah kebijakan strategis, antara lain berupa pembatasan informasi dalam laporan SLIK hanya untuk kredit atau pembiayaan dengan nominal di atas Rp1 juta, percepatan pembaruan status pelunasan kredit maksimal H+3, serta pemberian akses data SLIK kepada BP Tapera sesuai ketentuan yang berlaku;
- 3) OJK telah menetapkan kebijakan pemberian perlakuan khusus atas kredit/pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak 10 Desember 2025. Sampai dengan Maret 2026, telah diberikan restrukturisasi kredit/pembiayaan menggunakan kebijakan relaksasi OJK sebesar Rp17,4 triliun (Feb'26: Rp16,3 triliun) untuk 279,4 ribu rekening;
- 4) OJK telah menetapkan *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Kegiatan Usaha dan Ekosistem Bulion 2026–2031, sebagai langkah strategis OJK bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan kementerian/lembaga terkait, untuk memperkuat ekosistem bulion nasional serta mendukung hilirisasi sektor emas dan pendalaman pasar keuangan.

Sejalan dengan itu, OJK telah menerbitkan ketentuan tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek Dengan Aset yang Mendasari berupa Emas (POJK ETF Emas)

KSSK akan terus meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam mengantisipasi potensi risiko dari dinamika perekonomian, pasar keuangan dan geopolitik terutama rambatannya terhadap perekonomian dan sektor keuangan domestik, termasuk memperkuat *coordinated policy response* dan kewaspadaan untuk memitigasi berbagai risiko bagi perekonomian dan stabilitas sistem keuangan SSK. KSSK juga telah dan terus berkomitmen untuk mendukung sektor riil dan program Asta Cita Pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan demi mencapai kemakmuran bangsa.

KSSK akan kembali menyelenggarakan rapat berkala pada bulan Juli 2026.

2. Koordinasi Bilateral

2.1. OJK dan BI

UU OJK mengamanatkan OJK dan BI untuk berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing Lembaga. Selain itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK) mengamanatkan bahwa OJK agar berkoordinasi dengan BI dan LPS, salah satunya dalam penetapan Bank Sistemik, yang bertujuan untuk mencegah krisis sistem keuangan di bidang perbankan. Amanat UU dimaksud ditindaklanjuti dengan Nota

Kesepahaman (NK) antara Gubernur BI dan Ketua Dewan Komisiner OJK.

Pada triwulan I-2026, OJK dan BI telah melakukan beberapa koordinasi antara lain terkait:

- 1) Pembahasan Draft Penginian Petunjuk Pelaksanaan Bersama tentang *Joint Stress Test*;
- 2) Pembahasan perkembangan individu bank tertentu;
- 3) Dukungan OJK selaku anggota Satuan Kerja Nasional *Local Currency Transactions*;
- 4) Pelaksanaan *Joint Stress Test*;
- 5) Koordinasi terkait penginian daftar Bank Sistemik;
- 6) Koordinasi evaluasi pemeriksaan bank tahun 2025 dan rencana pemeriksaan bank tahun 2026;
- 7) Koordinasi terkait Perizinan dan/atau Persetujuan SJK Terintegrasi;
- 8) Koordinasi terkait Perjudian Daring maupun Penanganan *Fraud* dan insiden siber;
- 9) Koordinasi keterlibatan OJK dan BI pada sejumlah Fora Internasional;
- 10) Koordinasi dalam percepatan implementasi pengembangan atau pendalaman pasar keuangan;
- 11) Kolaborasi pelaksanaan event bersama dalam rangka penguatan ekosistem Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK)
- 12) Koordinasi pelaksanaan event bersama dalam rangka peningkatan literasi keuangan, inklusi keuangan dan perlindungan konsumen;
- 13) Pelaksanaan *benchmarking* terkait kelembagaan dan sumber daya kedua lembaga;
- 14) Koordinasi dalam pengembangan pembiayaan UMKM dan keuangan syariah, sustainable finance, serta kerja sama pengembangan ekonomi dan keuangan daerah;
- 15) Keterlibatan sebagai narasumber dan peserta pada program pembelajaran masing-masing lembaga;
- 16) Pertukaran data dan/atau informasi lembaga jasa keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas kedua lembaga; dan
- 17) Pembahasan dan penyampaian tanggapan tertulis dalam rangka penerbitan peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan oleh kedua lembaga.

2.2. OJK dan LPS

Sesuai dengan amanat UU PPKSK serta bentuk respons atas diterbitkannya UU P2SK, terdapat beberapa aspek kerjasama dan koordinasi antara OJK dan LPS yang memerlukan koordinasi yang lebih intensif sesuai dengan NK antara OJK dan LPS.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada triwulan I-2026 telah dilaksanakan beberapa koordinasi antara OJK dan LPS yaitu:

- 1) Koordinasi Pertukaran Data SAPIT OJK-LPS;
- 2) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan OJK-LPS tentang Kerja Sama Dan Koordinasi Dalam Rangka Proses Pendirian Sampai Dengan Pengakhiran Bank Perantara;
- 3) Koordinasi Persiapan Implementasi Program Penjaminan Polis termasuk Pembahasan Mekanisme Koordinasi Pertukaran Data Informasi bidang asuransi antara OJK-LPS;
- 4) Pertukaran data dan perkembangan kondisi bank umum maupun BPR/BPRS;

- 5) Koordinasi dalam rangka benchmarking maupun *knowledge sharing* antar OJK-LPS;
- 6) Koordinasi terkait pengisian daftar Bank Sistemik;
- 7) Pembahasan perkembangan individu bank tertentu;
- 8) Persiapan dan pelaksanaan resolusi BPR/BPRS; dan
- 9) Penyampaian tanggapan tertulis dalam rangka penerbitan rancangan peraturan perundang-undangan.

OJK, BI, dan LPS juga melakukan koordinasi dalam hal pemutakhiran Bank Sistemik periode April s.d. September 2026. Selain itu OJK, BI, dan LPS telah menandatangani pengisian petunjuk pelaksanaan bersama BI, OJK, dan LPS mengenai forum integrasi pelaporan.

3. Partisipasi OJK dalam Fora Internasional

3.1. Asia-Pacific High-level Meeting on Banking Supervision

OJK menghadiri pertemuan The 20th Asia-Pacific High-level Meeting on Banking Supervision yang diselenggarakan secara luring di Tianjin, Tiongkok. Pertemuan ini membahas berbagai isu strategis terkait stabilitas sistem keuangan dan tantangan pengawasan di kawasan Asia dan Pasifik, diantaranya prospek stabilitas keuangan dan risiko yang berkembang di kawasan Asia dan Pasifik, perkembangan *cryptoassets*, *stablecoins*, dan *tokenised assets* serta tantangannya bagi regulasi dan pengawasan, serta tantangan pengawasan perbankan di tengah perubahan sistem keuangan global. OJK berpartisipasi sebagai panelis dalam sesi Financial Regulation and Competitiveness Sharing. OJK menegaskan komitmen untuk

merancang kebijakan yang seimbang antara stabilitas, pertumbuhan, dan daya saing sektor keuangan. Selain itu, OJK menyampaikan *intervention points* pada isu *digital fraud*, khususnya yang terkait dengan *cryptoassets*. OJK menekankan bahwa meskipun aset kripto memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi sistem keuangan, terdapat risiko signifikan berupa penipuan dan penyalahgunaan untuk menyamarkan aliran dana ilegal. Sebagai tindak lanjut, OJK telah menyampaikan perhatian tersebut kepada sekretariat guna meningkatkan *awareness* dan mendorong potensi kolaborasi internasional ke depan.

3.2. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)

Pada triwulan I-2026, OJK turut menghadiri pertemuan Komite BCBS secara virtual. Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis terkait stabilitas sistem keuangan global, penguatan pengawasan perbankan, serta pengembangan kebijakan ke depan. Pertemuan BCBS membahas beberapa agenda utama sebagai berikut:

- 1) Komite melakukan pertukaran pandangan terkait perkembangan pasar terkini dan prospek sistem perbankan global. Dalam diskusi tersebut, Komite juga membahas kerentanan pada pasar *government bond-backed repo*, dengan mengacu pada laporan dari *Financial Stability Board*.
- 2) Komite menilai bahwa implementasi pedoman *counterparty credit risk management* yang telah difinalisasi akan membantu mengatasi sebagian kerentanan tersebut, khususnya terkait transaksi pembiayaan sekuritas dan manajemen agunan. Ke depan, Komite

akan terus memantau progres implementasi pedoman tersebut oleh otoritas dan perbankan.

- 3) Sejalan dengan perkembangan terbaru pasar *cryptoassets*, Komite mempercepat kajian terhadap beberapa aspek dalam standar prudensial terkait eksposur bank terhadap *cryptoassets*. Komite mencatat progres kajian tersebut dan akan menyampaikan pembaruan lebih lanjut pada akhir tahun.
- 4) Terkait dengan implementasi kebijakan, Komite menyetujui amandemen teknis pada *standardised approach* untuk risiko operasional, setelah melalui proses konsultasi dan respons atas *frequently asked questions* (FAQs) terkait kerangka risiko pasar.
- 5) Komite mengumumkan bahwa penyelenggaraan International Conference of Banking Supervisors (ICBS) berikutnya akan diadakan di Indonesia pada 30 September–1 Oktober 2026 dan akan diselenggarakan oleh Bank Indonesia bersama OJK.

Di samping itu, OJK juga menghadiri *ad-hoc* BCBS Committee secara virtual serta senantiasa berpartisipasi aktif dalam pertemuan BCBS di tingkat yang lebih teknis antara lain pada *Supervisory Cooperation Group* (SCG), *Risk and Vulnerabilities Group* (RVG), *Policy and Standard Group* (PSG), *Market Risk Group* (MRG), *Financial Technology Group* (FTG), *Accounting and Audit Expert Group* (AAEG), dan *Quantitative Impact Study* (QIS) group yang diikuti oleh sesi *outreach Machine Readable Pillar Outreach* secara virtual.

3.3. Working Committee – ASEAN Banking Integration Framework (WC-ABIF)

Pertemuan WC-ABIF ke-19 telah dilaksanakan di Bohol, Filipina. Dalam pertemuan dimaksud, ASEAN Member State (AMS) fokus pada laporan progres ASEAN Economic Community (AEC) 2020-2025 yang telah selesai dilaksanakan, termasuk *review* ABIF *guideline*, dan rencana kerja untuk AEC 2026-2030. Selain itu, ASEAN Secretariat (ASEC) menyampaikan skema pemantauan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan milestone dari masing-masing target capaian. Hal ini diharapkan dapat lebih menggambarkan progress yang dicapai oleh masing-masing working committee sehingga keputusan dan arahan dari *high-level committee* akan lebih akurat. Selain itu, rencana *project revive* dalam rangka ASEAN Financial Track akan mulai diuji coba pada Tahun 2027, dimana mulai semester 2 Tahun 2026, masing-masing *working committee* diharapkan dapat mulai mempersiapkan diri untuk perubahan struktur dan skema pelaporan yang baru. OJK menyampaikan dukungan atas rencana perubahan struktur dimaksud dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas prosedur pelaporan dalam struktur yang akan dibentuk nanti.

Untuk *Crisis Management, Recovery, and Resolution* (CMMR) Arrangement yang dibawa oleh Task Force For Supervisory Arrangement (TFSA), telah disampaikan *milestone review* CMRR dan ditekankan bahwa *review* CMRR ini akan mengeksplorasi potensi penyelerasan dengan perubahan

struktur *working committee* ke depan. Terkait hal ini, perwakilan OJK mengusulkan untuk mengeksplorasi parameter kerja sama antar otoritas dalam rangka integrasi CMRR di kawasan ASEAN, baik melalui Nota

Kesepahaman maupun bentuk kerja sama lainnya.

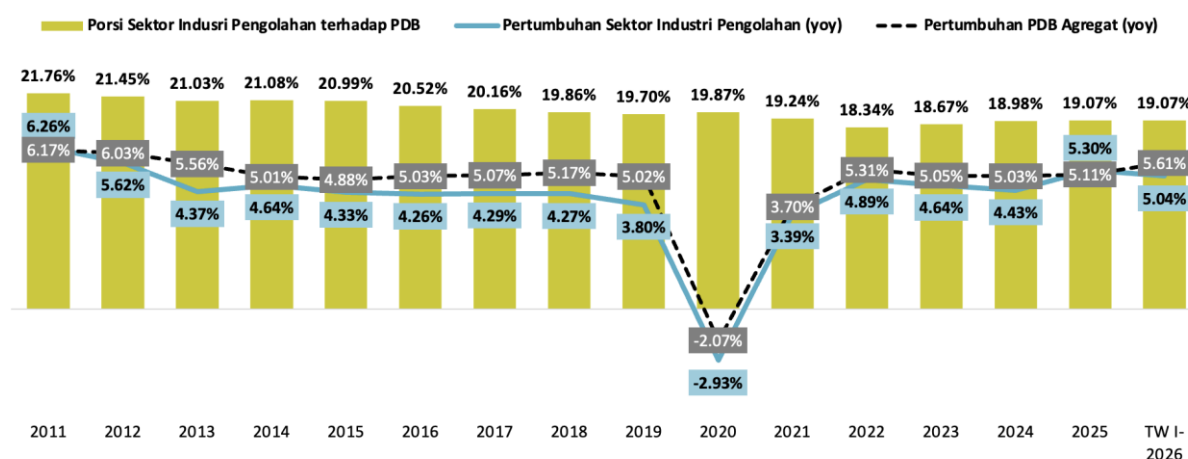
Kinerja, Tantangan, dan Peluang Daya Saing Industri Pengolahan Indonesia di Tengah Dinamika Global dan Domestik

Sektor industri pengolahan tetap menjadi kontributor terbesar terhadap perekonomian nasional meskipun pangsaanya cenderung turun dan pertumbuhannya melambat....

Sektor industri pengolahan merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan nilai tambah, menghasilkan devisa melalui ekspor, serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Keterkaitannya dengan berbagai sektor ekonomi lainnya juga membuat aktivitas manufaktur tidak berdiri sendiri, tetapi turut menggerakkan permintaan terhadap bahan baku, barang antara, transportasi, perdagangan, energi, hingga berbagai jasa pendukung. Rantai keterkaitan tersebut menciptakan *multiplier effect* (efek berganda) yang memperluas dampak aktivitas industri terhadap sektor-sektor lain, baik melalui peningkatan produksi, pendapatan, maupun kesempatan kerja. Luasnya keterkaitan tersebut menempatkan industri pengolahan pada posisi strategis dalam struktur perekonomian sekaligus memperkuat ketahanan dan daya saing perekonomian Indonesia.

Selama periode 2011 hingga Triwulan I-2026, sektor industri pengolahan secara konsisten menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) agregat dibandingkan sektor ekonomi lainnya, dengan rata-rata pangsa sebesar 19,99%. Meskipun tetap berada pada posisi teratas, pangsaanya terhadap PDB menunjukkan kecenderungan menurun dalam jangka panjang, dari 21,76% pada tahun 2011 menjadi 18,34% pada tahun 2022, sebelum kembali meningkat secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan pangsa tersebut tidak serta-merta mencerminkan pelemahan industri secara absolut, mengingat perubahan struktur PDB juga dipengaruhi oleh ekspansi sektor-sektor lain. Sejumlah sektor jasa, khususnya keuangan, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, serta perdagangan besar dan eceran, tumbuh relatif lebih cepat sehingga meningkatkan bobotnya dalam perekonomian dan secara relatif mengurangi pangsa industri pengolahan.

Grafik 1 - Porsi dan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan di Indonesia



Sumber: Data Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Dinamika tersebut berjalan berdampingan dengan perubahan kinerja industri pengolahan sepanjang periode pengamatan. Laju pertumbuhannya menurun dari 6,26% (yoy) pada 2011 hingga terkontraksi 2,93% (yoy) pada 2020 akibat pandemi Covid-19 yang mengganggu aktivitas produksi, rantai pasok global, serta menekan permintaan domestik dan eksternal. Sejalan dengan pemulihan ekonomi dan normalisasi aktivitas produksi, industri pengolahan kembali tumbuh positif dan mencapai 5,04% (yoy) pada Triwulan I-2026. Perbaikan tersebut ditopang oleh

pemulihan aktivitas produksi dan permintaan, baik domestik maupun eksternal, yang berlangsung bersamaan dengan meningkatnya konsumsi dan investasi.

Namun, pemulihan pertumbuhan belum sepenuhnya mengembalikan pangsa industri pengolahan ke level awal periode pengamatan. Perbedaan antara perkembangan laju pertumbuhan dan pangsa PDB ini memperlihatkan bahwa penguatan industri dalam jangka panjang tidak cukup bertumpu pada pemulihan siklus permintaan. Peningkatan kapasitas produksi, produktivitas, dan nilai tambah perlu mendapat perhatian lebih besar agar industri pengolahan dapat tumbuh lebih cepat dan mempertahankan perannya ketika sektor-sektor lain terus berkembang.

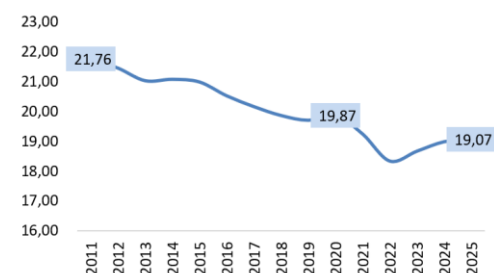
Nilai tambah manufaktur Indonesia masuk 12 besar dunia namun tren rasio nilai tambah manufaktur terhadap PDB agregat justru melambat di dalam negeri....

Di balik perubahan kontribusi industri pengolahan terhadap PDB, aspek lain yang perlu diperhatikan adalah kemampuan sektor manufaktur dalam menciptakan nilai tambah. Perspektif ini dapat dilihat melalui *Manufacturing Value Added* (MVA), yaitu nilai tambah yang dihasilkan sektor manufaktur setelah memperhitungkan penggunaan input antara. Dibandingkan dengan nilai output semata, indikator ini memberikan gambaran yang lebih dekat mengenai nilai ekonomi yang tercipta dalam proses produksi manufaktur.

Tabel 1 – Dua Puluh Negara dengan Nilai Tambah Manufaktur Terbesar di Dunia

Top 20 Countries			
Rank	Country	Manufacturing Value Added (USD Billion)	Share of World (%)
1	China	4.661	28,05%
2	United States of America	2.497	15,02%
3	Japan	867	5,22%
4	Germany	844	5,08%
5	Korea, Rep.	499	3,00%
6	India	493	2,97%
7	Mexico	368	2,21%
8	Italy	353	2,12%
9	France	302	1,82%
10	United Kingdom	294	1,77%
11	Russian Federation	288	1,73%
12	Indonesia	265	1,60%
13	Brazil	265	1,59%
14	Turkiye	229	1,38%
15	Saudi Arabia	195	1,17%
16	Canada	187	1,13%
17	Spain	187	1,13%
18	Ireland	180	1,08%
19	Switzerland	166	1,00%
20	Poland	148	0,89%

Grafik 2 – Tren Rasio MVA terhadap PDB Indonesia



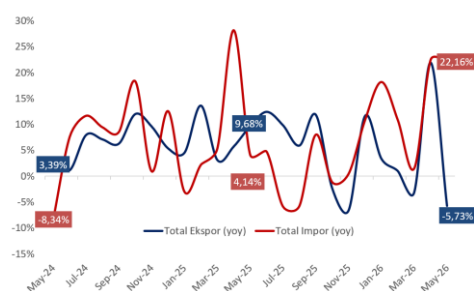
Sumber: Data World Bank dan Statranker, diolah

Dalam skala global, Indonesia masih memiliki basis manufaktur yang cukup besar. Berdasarkan data World Bank, Indonesia termasuk dalam dua puluh negara dengan nilai tambah manufaktur terbesar di dunia dan menempati peringkat ke-12 pada 2025, dengan pangsa sekitar 1,60% terhadap total MVA global. Posisi tersebut menempatkan Indonesia dalam kelompok negara dengan kapasitas manufaktur yang layak diperhitungkan. Namun, skala tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam perkembangan peran manufaktur terhadap perekonomian domestik. Rasio MVA terhadap PDB turun dari 21,76% pada 2011 menjadi 19,87% pada 2020 dan kembali menurun menjadi 19,07% pada 2025. Perbandingan kedua perspektif tersebut memberikan gambaran bahwa meskipun Indonesia memiliki skala manufaktur yang cukup besar dalam konteks global, peran relatif sektor ini terhadap perekonomian nasional justru cenderung menurun sepanjang periode pengamatan.

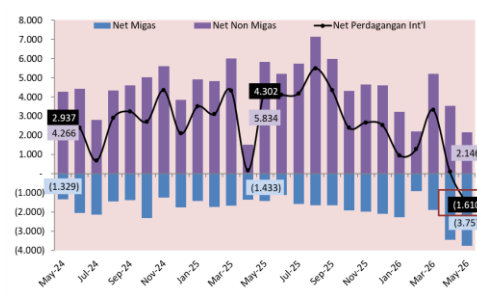
Sektor industri pengolahan menjadi penopang utama kinerja ekspor nasional dan berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja....

Selain dari kemampuan menciptakan nilai tambah, posisi industri pengolahan dalam perekonomian juga tercermin dari perannya dalam perdagangan luar negeri. Produk manufaktur merupakan komponen utama ekspor Indonesia, sehingga perubahan kinerja sektor ini memiliki keterkaitan erat dengan dinamika ekspor nasional. Pada Mei 2026, tekanan terhadap perdagangan eksternal tercermin dari berbaliknya neraca perdagangan Indonesia menjadi defisit. Indonesia mencatat defisit neraca perdagangan sebesar USD1,61 miliar, yang terdiri atas defisit migas sebesar USD3,76 miliar dan surplus nonmigas sebesar USD2,15 miliar. Capaian tersebut sekaligus mengakhiri tren surplus perdagangan yang telah berlangsung selama 72 bulan berturut-turut.

Grafik 3 – Perkembangan Aktivitas Perdagangan Indonesia di Pasar Global



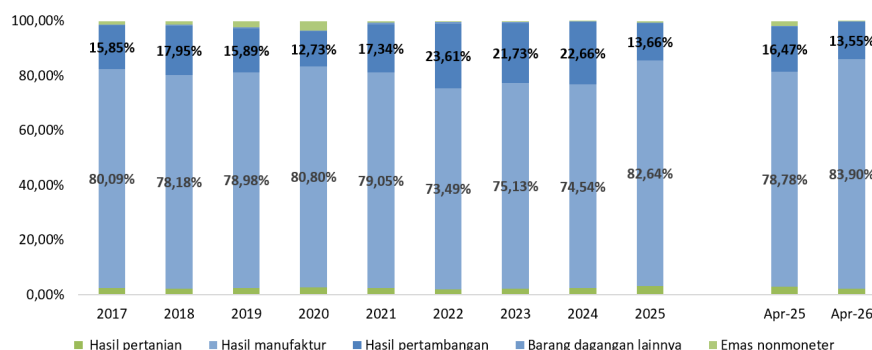
Grafik 4 – Neraca Perdagangan Indonesia



Sumber: Data BPS, diolah

Tekanan pada perdagangan luar negeri terutama berasal dari pelemahan ekspor yang berkontraksi -5,73% (yoy) pada Mei 2026, berbalik dari pertumbuhan 9,61% (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terjadi baik pada kelompok migas maupun nonmigas. Ekspor migas berkontraksi -31,76% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi -21,71% (yoy) pada Mei 2025, sementara ekspor nonmigas berbalik dari pertumbuhan 11,80% (yoy) menjadi berkontraksi -4,50% (yoy). Pada periode yang sama, impor tumbuh jauh lebih tinggi, mencapai 22,16% (yoy), dibandingkan 4,14% (yoy) pada Mei 2025, seiring peningkatan impor migas maupun nonmigas. Kombinasi pelemahan ekspor dan lonjakan impor tersebut mempersempit kinerja neraca perdagangan dan menjadi tekanan tersendiri bagi sektor eksternal.

Grafik 5 - Kontribusi Komoditas Perdagangan terhadap Nilai Ekspor Nonmigas Indonesia



Sumber: Data SEKI BI, diolah

Di tengah tekanan tersebut, produk manufaktur tetap menjadi komponen terbesar dalam struktur ekspor Indonesia, khususnya pada kelompok nonmigas. Selama delapan tahun terakhir,

komoditas hasil manufaktur secara konsisten menyumbang rata-rata 78,10% dari total nilai ekspor nonmigas nasional. Pada April 2026, pangsaanya meningkat menjadi 83,90% terhadap ekspor nonmigas atau setara dengan 80,36% terhadap total ekspor nasional, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang masing-masing tercatat sebesar 78,10% dan 76,23%.

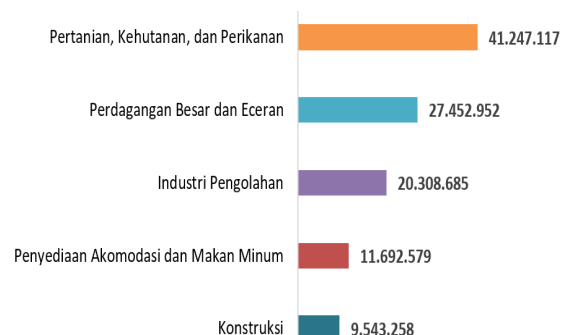
Sebagai pembanding, komoditas hasil pertambangan sebagai kontributor terbesar kedua hanya memiliki pangsa rata-rata 17,94% terhadap ekspor nonmigas selama delapan tahun terakhir. Struktur tersebut membuat dinamika ekspor produk manufaktur memiliki pengaruh yang relatif besar terhadap kinerja ekspor nasional, sekaligus menjadikan industri pengolahan sebagai salah satu sumber utama devisa dari sektor nonmigas. Maka dari itu, kemampuan produk manufaktur dalam mempertahankan kinerja ekspor akan turut menentukan keberlanjutan penerimaan devisa, terutama ketika perdagangan global menghadapi tekanan dan permintaan eksternal melemah.

Kemampuan industri pengolahan dalam menopang perekonomian tidak hanya terefleksi dari kontribusinya terhadap perdagangan luar negeri, tetapi juga dari luasnya aktivitas ekonomi yang tercipta di dalam negeri. Di samping memasok kebutuhan untuk pasar domestik dan ekspor, sektor industri pengolahan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Berdasarkan data BPS, pada Agustus 2025 industri pengolahan menyerap tenaga kerja dengan pangsa 13,86% atau sekitar 20,31 juta orang dari total penduduk yang bekerja. Luasnya cakupan subsektor manufaktur, mulai dari industri padat karya hingga padat modal, memungkinkan sektor ini menyerap tenaga kerja dengan tingkat keterampilan yang beragam.

Grafik 6 – Lima Lapangan Usaha Utama Penyerap Tenaga Kerja Terbesar per Agustus 2025



Grafik 7 – Jumlah Tenaga Kerja Terserap pada Lima Lapangan Usaha Utama per Agustus 2025 (Orang)



Sumber: Data BPS, diolah

Berdasarkan Tabel Input-Output 2020 industri pengolahan menjadi pemasok utama bahan baku sekaligus penopang rantai pasok domestik namun rentan terhadap guncangan eksternal....

Peran industri pengolahan dalam perekonomian domestik tidak berhenti pada aktivitas produksi dan penyerapan tenaga kerja, tetapi meluas melalui keterkaitannya dengan berbagai sektor dalam rantai pasok. Kegiatan manufaktur membutuhkan bahan baku, barang antara, transportasi, perdagangan, serta berbagai jasa pendukung dari sektor lain, sementara produk industri pengolahan juga digunakan sebagai input dalam proses produksi sektor lainnya. Hubungan timbal balik ini membuat perubahan aktivitas manufaktur dapat diteruskan ke berbagai bagian perekonomian melalui permintaan input maupun penyediaan barang dan jasa untuk kegiatan produksi berikutnya. Luasnya keterkaitan produksi antarsektor tersebut dapat

ditelaah melalui Tabel Input-Output (I-O) Indonesia Tahun 2020 yang diterbitkan BPS pada 27

Tabel 2 – Struktur Penawaran dan Permintaan dalam Tabel Input-Output Indonesia, 2020

No.	Produk	Penawaran/Penyediaan					Permintaan/Penggunaan			
		Output Domestik	Impor	Pajak dikurang Subsidi atas Produk	Marjin Perdagangan dan Pengangkutan	Total Penyediaan	Permintaan Antara	Permintaan Akhir Domestik	Ekspor	Total Permintaan
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.583.762	124.499	14.218	563.799	3.286.278	1.965.171	1.251.185	69.922	3.286.278
2.	Pertambangan dan Penggalian	1.540.237	87.509	4.633	98.300	1.730.679	1.246.142	47.928	436.610	1.730.679
3.	Industri Pengolahan	8.135.408	1.947.512	456.676	2.461.970	13.001.567	6.052.289	4.979.706	1.969.572	13.001.567
4.	Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air	758.373	1.832	-	43.373	761.731	571.875	144.857	-	716.731
5.	Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	70.069	212	21	-	70.302	18.709	50.870	723	70.302
6.	Konstruksi	3.442.852	5.958	87.939	-	3.536.750	260.266	3.271.183	5.301	3.536.750
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.931.502	-	4.735	2.692.450	243.786	127.354	116.432	-	243.786
8.	Transportasi dan Pergudangan	1.532.181	15.587	2.212	491.192	1.054.363	618.604	393.914	41.846	1.054.363
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.187.565	15.472	10.688	36.141	1.249.867	192.206	1.021.888	35.773	1.249.867
10.	Informasi dan Komunikasi	1.122.573	72.734	20.596	23.359	1.239.262	697.506	512.507	29.698	1.239.262
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	930.000	28.249	-	-	958.249	622.791	323.538	11.920	958.249
12.	Real Estate	964.243	11.445	8.031	-	983.719	270.756	708.263	4.700	983.719
13.	Jasa Perusahaan	829.147	104.361	4.746	-	938.254	800.666	70.544	67.044	938.254
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	754.673	959	-	-	755.632	49.089	697.501	9.043	755.632
15.	Jasa Pendidikan	763.439	1.063	-	-	764.502	43.497	720.129	877	764.502
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	685.287	1.919	-	-	687.206	30.647	654.825	1.734	687.206
17.	Jasa Lainnya	468.940	2.833	4.697	73	476.542	83.911	388.471	4.160	476.542
Total		28.700.251	2.422.144	571.295	-	31.693.690	13.651.029	15.353.739	2.688.922	31.693.690

Sumber: Data BPS, diolah

Januari 2025.

Tabel I-O memetakan arus barang dan jasa dalam perekonomian berdasarkan penggunaannya, baik sebagai input dalam proses produksi maupun untuk memenuhi permintaan akhir. Berdasarkan tabel tersebut, total permintaan dan penawaran dalam perekonomian Indonesia mencapai Rp31.694 triliun. Dari sisi permintaan, sekitar Rp13.651 triliun atau 43,07% merupakan permintaan antara yang digunakan dalam proses produksi, sedangkan Rp18.043 triliun atau 56,93% merupakan permintaan akhir domestik yang mencakup konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah maupun ekspor. Besarnya porsi permintaan antara memperlihatkan bahwa sebagian besar aktivitas produksi saling terhubung karena output dari satu sektor digunakan kembali sebagai input oleh sektor lainnya.

Dalam struktur tersebut, industri pengolahan mencatat nilai permintaan terbesar, mencapai Rp13.002 triliun. Sebesar Rp6.052 triliun atau 46,55% di antaranya merupakan permintaan antara yang digunakan sebagai input dalam proses produksi sektor lain. Sementara itu, Rp4.980 triliun atau 38,30% digunakan untuk memenuhi permintaan akhir domestik dan Rp1.970 triliun atau 15,15% ditujukan untuk ekspor. Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan produk industri pengolahan tidak hanya berasal dari konsumsi, investasi, dan pasar ekspor, tetapi juga dari kebutuhan produksi sektor-sektor lain. Posisi ini menempatkan manufaktur dalam berbagai tahapan rantai produksi, baik sebagai pemasok barang antara maupun sebagai pengguna input dari sektor lainnya.

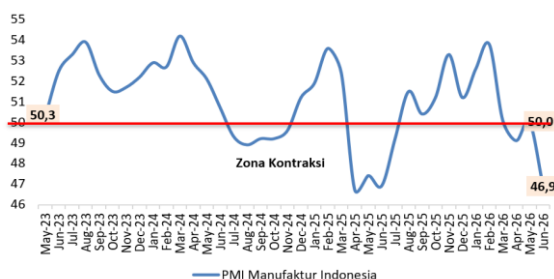
Sementara itu, dari sisi penawaran, produksi domestik merupakan sumber terbesar dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa di Indonesia, dengan nilai Rp28.700 triliun atau 90,56% dari total penawaran. Impor menyumbang Rp2.422 triliun atau 7,64%, sedangkan pajak neto atas produk sebesar Rp571 triliun atau 1,80%. Pada industri pengolahan, produksi domestik juga menjadi sumber utama pasokan. Dari total penawaran sebesar Rp13.002 triliun, produksi domestik mencapai Rp8.135 triliun atau 62,57%, sementara impor sebesar Rp1.948 triliun atau 14,98% dan pajak neto atas produk sebesar Rp457 triliun atau 3,51%. Struktur ini memperlihatkan bahwa kebutuhan terhadap produk industri pengolahan terutama dipenuhi dari produksi domestik, dengan sebagian lainnya dipenuhi melalui impor.

Fluktuasi PMI Manufaktur menunjukkan pemulihan industri yang belum solid akibat lemahnya daya beli domestik dan tekanan ekonomi global....

Gambaran mengenai luasnya peran industri pengolahan dalam perekonomian perlu dilengkapi dengan perkembangan aktivitas manufaktur dalam jangka pendek. Salah satu indikator yang dapat digunakan adalah Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia, yang menangkap perubahan kondisi operasional industri melalui perkembangan pesanan baru, produksi, ketenagakerjaan, waktu pengiriman pemasok, dan persediaan.

Selama Mei 2023 hingga Juni 2026, PMI Manufaktur Indonesia bergerak cukup fluktuatif. Indeks beberapa kali berada di bawah level 50 yang menandakan kontraksi aktivitas manufaktur, meskipun pada periode lainnya kembali memasuki zona ekspansi. Pergerakan tersebut mencerminkan perubahan kondisi produksi dan pesanan dari waktu ke waktu, sekaligus memperlihatkan bahwa pemulihan aktivitas manufaktur belum berlangsung secara konsisten. Perkembangan permintaan, kondisi usaha, dan ekspektasi pelaku industri turut memengaruhi naik turunnya aktivitas tersebut.

Grafik 8 – Perkembangan PMI Manufaktur Indonesia



Grafik 9 – Pemanfaatan Kapasitas Produksi Indonesia



Sumber: Data S&P Global Ratings, diolah

Sumber: Data Trading Economics, diolah

Dari sisi domestik, perkembangan permintaan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi aktivitas produksi manufaktur. Pelemahan daya beli masyarakat dapat menahan pesanan baru dan mendorong pelaku usaha menyesuaikan tingkat produksi serta persediaan. Ketidakpastian terhadap prospek perekonomian juga dapat membuat dunia usaha lebih selektif dalam melakukan ekspansi dan investasi. Meskipun tingkat pemanfaatan kapasitas menunjukkan perbaikan, hal tersebut dapat memengaruhi kecepatan penambahan kapasitas produksi, modernisasi mesin dan peralatan, serta adopsi teknologi.

Tabel 3 – Nilai Impor menurut Golongan Penggunaan Barang

Golongan Penggunaan Barang	Nilai CIF (USD Juta)				Perubahan (%)			Peran thd Jan- Mei 2026
	Mei 2025	Mei 2026	Jan-Mei 2025	Jan-Mei 2026	YoY	MtM	CtC	
Total Impor	20.312,3	24.813,7	96.602,2	111.328,1	22,16	- 1,59	15,24	100,00
Barang Konsumsi	1.827,0	2.433,8	8.383,1	9.812,7	21,90	- 8,42	17,05	8,81
Bahan Baku/Penolong	14.045,3	18.648,7	69.400,2	79.397,4	25,17	- 5,72	14,41	71,32
Barang Modal	4.440,0	4.131,2	18.818,9	22.118,0	12,70	21,12	17,53	19,87

Sumber: Data BPS, diolah

Dari sisi eksternal, aktivitas manufaktur turut dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dan perdagangan global. Perlambatan ekonomi dunia, ketidakpastian geopolitik, serta fragmentasi perdagangan dapat menahan permintaan dari negara mitra dan memengaruhi ekspor produk manufaktur Indonesia. Selain permintaan eksternal, kelancaran produksi juga berkaitan dengan ketersediaan dan harga berbagai input yang berasal dari impor. Perubahan nilai tukar, kenaikan harga bahan baku dan energi, maupun gangguan rantai pasok global dapat meningkatkan biaya produksi atau menghambat ketersediaan input tertentu. Dampaknya akan semakin besar

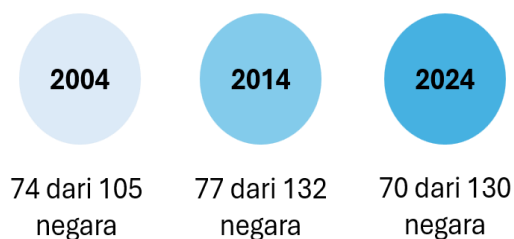
apabila input tersebut sulit digantikan oleh pasokan domestik dalam waktu singkat. Selain menjaga akses terhadap pasar ekspor, penguatan kapasitas pemasok domestik dan pengembangan industri hulu juga diperlukan untuk memperkuat rantai pasok manufaktur serta mengurangi ketergantungan pada pasokan eksternal.

Peringkat *Economic Complexity Index* (ECI) Indonesia mengalami stagnansi selama dua dekade disertai peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri yang masih lambat....

Di luar dinamika produksi dan permintaan dalam jangka pendek, perkembangan industri pengolahan juga berkaitan dengan kemampuan untuk meningkatkan kualitas dan kompleksitas produk yang dihasilkan. Pertumbuhan industri dalam jangka panjang tidak hanya ditentukan oleh peningkatan volume produksi, tetapi juga oleh kemampuan mengembangkan produk dengan nilai tambah lebih tinggi yang membutuhkan penguasaan teknologi, pengetahuan, dan kapabilitas produksi yang semakin maju. Perubahan ke arah tersebut berkaitan erat dengan kemampuan suatu negara memperluas basis produksinya dari produk yang relatif sederhana menuju produk yang lebih beragam dan kompleks.

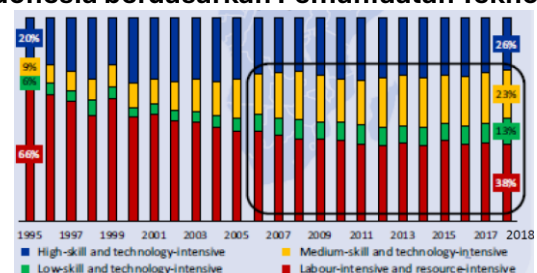
Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kompleksitas tersebut adalah *Economic Complexity Index* (ECI). Indeks ini mengukur kompleksitas suatu perekonomian berdasarkan keragaman dan tingkat kecanggihan produk yang dapat dihasilkan dan diekspor secara kompetitif. Semakin beragam produk yang mampu dihasilkan, terutama produk yang membutuhkan pengetahuan, teknologi, dan kemampuan produksi yang tidak dimiliki oleh banyak negara, semakin tinggi tingkat kompleksitas ekonomi suatu negara. ECI tidak hanya menggambarkan struktur ekspor, tetapi juga berkaitan dengan kapabilitas produktif yang mendasarinya. Penguasaan teknologi, kualitas sumber daya manusia, kemampuan inovasi, dan keragaman basis industri menjadi bagian dari kapabilitas yang memungkinkan suatu negara menghasilkan produk yang lebih kompleks. Basis kapabilitas yang lebih luas juga memberikan ruang yang lebih besar bagi industri untuk mengembangkan produk baru dan memasuki segmen dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

Grafik 10 – Peringkat Indonesia berdasarkan *Economic Complexity Index*



Sumber: Data OEC World, diolah

Grafik 11 – Struktur Ekspor Manufaktur Indonesia berdasarkan Pemanfaatan Teknologi



Sumber: Data UNCTAD dalam Dokumen INDEF

Berdasarkan data The Observatory of Economic Complexity (OEC), perkembangan ECI Indonesia selama 2004–2024 masih menunjukkan pergerakan yang relatif terbatas. Posisi Indonesia selama sekitar dua dekade tersebut cenderung berada di sekitar peringkat ke-70 dari kurang lebih 130 negara. Hal ini terjadi di tengah perkembangan struktur produksi dan perdagangan global, sehingga posisi Indonesia dalam menghasilkan dan mengekspor produk yang lebih kompleks belum mengalami pergeseran yang berarti dibandingkan negara lain. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari berbagai kapabilitas yang menopang proses produksi, mulai dari produktivitas dan penguasaan teknologi hingga kualitas sumber daya manusia dan kemampuan inovasi. Kapabilitas tersebut turut menentukan kemampuan industri untuk mengembangkan produk yang lebih kompleks dan bernilai tambah lebih tinggi.

Pergeseran ekspor ke produk bernilai tambah dan teknologi tinggi masih berjalan lambat karena industri pengolahan masih bertumpu pada produk padat karya dan berbasis sumber daya alam....

Gambaran mengenai kompleksitas tersebut dapat dilengkapi dengan melihat perubahan komposisi ekspor manufaktur berdasarkan tingkat intensitas teknologi. Berdasarkan data UN Trade and Development (UNCTAD), selama periode 1995–2018 ekspor manufaktur Indonesia masih didominasi oleh produk padat karya (*labour-intensive*) dan berbasis sumber daya alam (*resource-intensive*), meskipun pangsaanya menurun dari 66% menjadi 38%. Pada kelompok produk dengan kandungan teknologi lebih tinggi, pangsa manufaktur berteknologi menengah (*medium-skill and technology-intensive manufactures*) meningkat dari 9% menjadi 23%. Sementara itu, peningkatan pada produk berteknologi tinggi (*high-skill and technology-intensive manufactures*) relatif lebih terbatas, dari 20% menjadi 26%. Perubahan komposisi tersebut memperlihatkan adanya pergeseran struktur ekspor ke produk dengan pemanfaatan teknologi yang lebih tinggi, meskipun peningkatannya belum merata pada seluruh kelompok teknologi.

Pergeseran tersebut terutama terlihat dari meningkatnya kontribusi produk berteknologi menengah, sementara kenaikan pangsa produk berteknologi tinggi masih relatif terbatas. Pola ini memperlihatkan bahwa perubahan struktur ekspor manufaktur Indonesia ke arah produk dengan kandungan teknologi yang lebih tinggi telah berlangsung, meskipun peningkatannya belum merata pada seluruh kelompok teknologi. Perkembangan menuju produk yang semakin kompleks membutuhkan kapabilitas produksi yang lebih kuat, termasuk penguasaan teknologi, tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai, kemampuan inovasi, serta kapasitas riset dan pengembangan. Penguatan kapabilitas tersebut menjadi bagian penting dalam memperluas kemampuan industri untuk menghasilkan produk dengan tingkat kompleksitas dan nilai tambah yang lebih tinggi.

Daya saing manufaktur Indonesia masih tertinggal dari beberapa negara tetangga yang tergabung dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) karena terganjal masalah infrastruktur pendukung dan kualitas SDM....

**Tabel 4 – Peringkat Pilar berdasarkan Tingkat Kesiapan Teknologi di Negara ASEAN
Tahun 2024**

Country	Logistic Performance Index	Mobile Connectivity Index	ICT Capital Goods Imports Index	Human Capital	Digital Services Trade Restrictiveness Index	Digitally Deliverable Services Index	Government Promotion of Investments in Emerging	Global Cyber- security Index
Indonesia	44	47	26	43	7	33	18	24
Malaysia	27	40	4	8	58	28	8	7
Filipina	36	55	5	60	33	26	38	41
Singapura	1	1	1	1	20	61	2	4
Thailand	31	41	11	57	31	39	17	36
Brunei Darussalam	65	43	60	3	15	62	14	50
Vietnam	39	46	3	53	28	50	22	26
Laos	62	64	19	67	2	58	30	61
Myanmar	67	68	65	46	67	66	39	53
Kamboja	60	63	66	68	3	53	53	62

Sumber: Data World Trade Organization (WTO), diolah

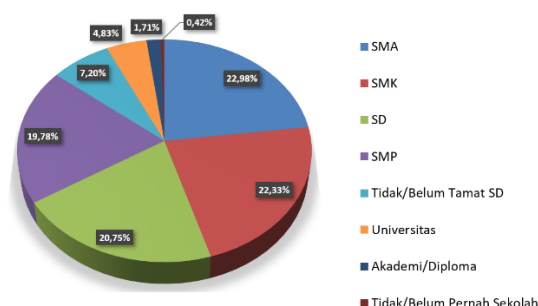
Peningkatan kompleksitas produksi tidak berlangsung hanya melalui perubahan jenis produk yang dihasilkan, tetapi juga membutuhkan kesiapan berbagai faktor yang menopang proses produksi tersebut. Dalam konteks Indonesia, kesiapan faktor-faktor tersebut masih menghadapi sejumlah kesenjangan dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN. Berdasarkan data World Trade Organization (WTO), Indonesia masih relatif tertinggal dibandingkan Singapura, Malaysia, Thailand, maupun Vietnam dalam sejumlah aspek pendukung manufaktur modern, seperti kinerja logistik, konektivitas digital, akses terhadap barang modal berbasis teknologi informasi

dan komunikasi (ICT), serta kualitas sumber daya manusia. Kesenjangan pada aspek-aspek tersebut membentuk lingkungan usaha yang berbeda antarnegara dalam mengadopsi teknologi, meningkatkan efisiensi, dan mengembangkan kapasitas produksi.

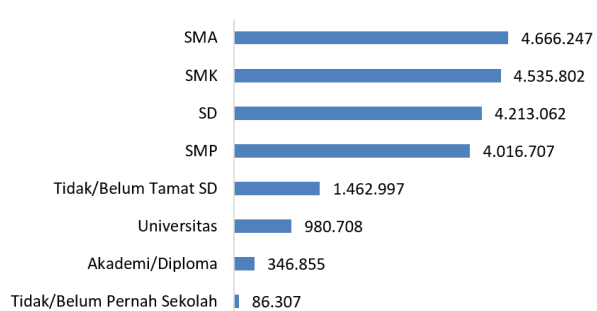
Di antara berbagai faktor pendukung tersebut, kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu aspek yang berkaitan langsung dengan kemampuan industri memanfaatkan perkembangan teknologi. Berdasarkan data BPS, struktur tenaga kerja pada sektor industri pengolahan masih didominasi oleh pekerja dengan tingkat pendidikan menengah, sementara proporsi tenaga kerja berpendidikan tinggi relatif terbatas. Hanya sekitar 6,54% tenaga kerja yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang akademi/diploma dan universitas, dengan pangsa masing-masing sebesar 1,71% dan 4,83%. Sebaliknya, tenaga kerja lulusan pendidikan menengah memiliki proporsi yang jauh lebih besar, terutama lulusan SMA sebesar 22,98% dan SMK sebesar 22,33%.

Komposisi pendidikan tenaga kerja tersebut perlu ditempatkan dalam konteks perubahan kebutuhan kompetensi di industri pengolahan. Pemanfaatan digitalisasi, otomatisasi, kecerdasan buatan, teknologi berbasis data, dan sistem produksi yang semakin terintegrasi membuat jenis keterampilan yang dibutuhkan semakin beragam. Tenaga kerja tidak hanya dituntut mampu menjalankan proses produksi, tetapi juga membutuhkan kemampuan teknis, analitis, digital, dan pemecahan masalah. Dalam konteks ini, dominasi tenaga kerja berpendidikan menengah, termasuk lulusan pendidikan kejuruan, tidak dengan sendirinya menjadi kelemahan. Kelompok tersebut dapat menjadi basis tenaga kerja manufaktur apabila kompetensinya selaras dengan kebutuhan proses produksi dan perkembangan teknologi.

Grafik 12 – Pangsa Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Berdasarkan Tingkat Pendidikan per Agustus 2025



Grafik 13 – Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Orang) per Agustus 2025



Sumber: Data BPS, diolah

Tantangan terletak pada kesesuaian antara kompetensi yang tersedia dan kebutuhan pekerjaan yang terus berubah. Perkembangan teknologi dapat menggeser jenis pekerjaan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam waktu relatif cepat, sementara penyesuaian kurikulum pendidikan dan sistem pelatihan membutuhkan waktu yang lebih panjang. Perbedaan kecepatan tersebut dapat memunculkan *skill mismatch*, baik ketika tenaga kerja belum menguasai keterampilan yang dibutuhkan industri maupun ketika kompetensi yang dimiliki tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan karakter pekerjaan yang tersedia.

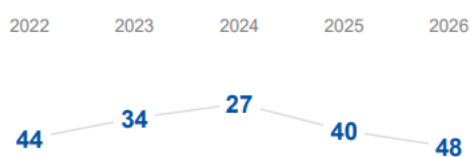
Kesenjangan tersebut menjadi semakin krusial ketika investasi teknologi dan modernisasi proses produksi berlangsung secara bersamaan. Mesin, fasilitas produksi, dan teknologi digital dapat meningkatkan kapasitas dan efisiensi, tetapi pemanfaatannya tetap membutuhkan tenaga kerja yang mampu mengoperasikan, memelihara, dan mengoptimalkan teknologi tersebut. Oleh sebab itu, pengembangan kompetensi perlu mencakup tenaga kerja yang sudah berada di industri melalui program *upskilling* dan *reskilling*, sekaligus memastikan pendidikan vokasi membekali lulusan dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha.

Upaya tersebut juga membutuhkan sinergi antara lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, dan dunia usaha, guna menyelaraskan materi pembelajaran dan pelatihan dengan kebutuhan pekerjaan sekaligus mempercepat penyesuaian kompetensi terhadap perkembangan teknologi. Di luar aspek SDM, kemampuan industri memanfaatkan teknologi juga dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur, logistik, konektivitas digital, kelembagaan, regulasi, dan kepastian kebijakan. Faktor-faktor tersebut saling melengkapi dalam membentuk lingkungan yang memungkinkan investasi teknologi tidak berhenti pada penambahan kapasitas produksi, tetapi juga mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, inovasi, dan nilai tambah.

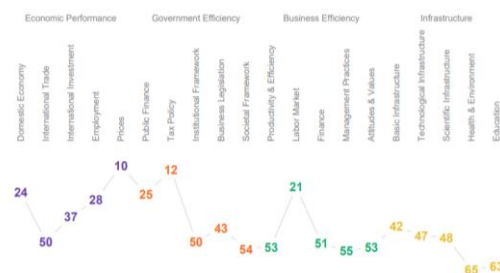
Penurunan daya saing Indonesia dalam lanskap global mengindikasikan adanya *bottleneck* permasalahan struktural dan multidimensional yang perlu segera diatasi....

Kebutuhan untuk memperkuat berbagai pondasi daya saing tersebut semakin relevan apabila dikaitkan dengan perkembangan posisi Indonesia dalam peta daya saing global. Berdasarkan IMD World Competitiveness Ranking (WCR), peringkat daya saing Indonesia turun dari posisi 27 pada 2024 menjadi 40 pada 2025, kemudian kembali turun ke posisi 48 dari 70 negara pada 2026. Perubahan posisi ini berlangsung di tengah penilaian terhadap berbagai aspek yang membentuk daya saing suatu negara, mulai dari kinerja ekonomi, efektivitas pemerintah, efisiensi dunia usaha, hingga kualitas infrastruktur. Perkembangan peringkat tersebut menjadi konteks yang lebih luas untuk melihat sejumlah kendala struktural yang masih memengaruhi produktivitas, inovasi, penguasaan teknologi, dan penciptaan nilai tambah di Indonesia.

Grafik 14 – Peringkat Daya Saing Indonesia di Tingkat Global



Grafik 15 – Peringkat Daya Saing Indonesia Berdasarkan Empat Kriteria Utama



Sumber: Data IMD, diolah

Peringkat tersebut perlu dibaca bersama komponen penyusunnya karena daya saing merupakan hasil interaksi berbagai faktor dalam perekonomian. Dalam kerangka IMD World Competitiveness Ranking, penilaian mencakup empat kriteria utama, yaitu *Economic Performance*, *Government Efficiency*, *Business Efficiency*, dan *Infrastructure*. Keempatnya menggambarkan kondisi ekonomi sekaligus lingkungan yang memengaruhi kemampuan suatu negara dalam mengelola sumber daya, meningkatkan produktivitas, menarik investasi, mengadopsi teknologi, dan mengembangkan kegiatan ekonomi bernilai tambah. Perkembangan masing-masing kriteria memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai area yang relatif kuat maupun yang masih membutuhkan penguatan, sebagai berikut:

1. *Economic Performance*

Pada aspek *Economic Performance*, Indonesia masih memiliki sejumlah modal ekonomi yang relatif kuat, tercermin dari peringkat *Prices* (10), *Domestic Economy* (24), dan *Employment* (28). Namun, kekuatan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh posisi yang kuat pada *International Trade* (50) dan *International Investment* (37). Kesenjangan ini menunjukkan bahwa besarnya basis ekonomi domestik belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi daya saing eksternal dan kemampuan menarik investasi yang dapat memperkuat kapasitas produksi, transfer teknologi, serta posisi Indonesia dalam rantai nilai global.

Dengan demikian, tantangannya tidak hanya mempertahankan momentum ekonomi domestik, tetapi juga meningkatkan kualitas pertumbuhan agar semakin terhubung dengan perdagangan, investasi, dan aktivitas produksi bernilai tambah tinggi.

2. **Government Efficiency**

Kesenjangan antara kapasitas ekonomi dan kemampuan menciptakan nilai tambah juga berkaitan dengan kualitas lingkungan kelembagaan. Meskipun *Public Finance* (12) dan *Tax Policy* (25) menunjukkan posisi yang relatif kuat, Indonesia masih menghadapi tantangan pada *Institutional Framework* (50), *Business Legislation* (43), dan *Societal Framework* (54). Hal ini menunjukkan bahwa tantangan pemerintah lebih banyak berkaitan dengan efektivitas kelembagaan, kepastian regulasi, dan kualitas lingkungan usaha yang mendukung keputusan investasi jangka panjang.

Kepastian hukum yang belum optimal dapat meningkatkan persepsi risiko (*country risk*) dan mendorong dunia usaha bersikap lebih konservatif dalam melakukan investasi. Risiko tersebut dapat semakin besar ketika proses perizinan dan birokrasi masih kompleks, regulasi mengalami perubahan relatif sering, atau terdapat perbedaan interpretasi dan implementasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Sebaliknya, regulasi yang konsisten, perlindungan kontrak yang kuat, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dapat menurunkan ketidakpastian dan menciptakan insentif yang lebih kuat bagi investasi, inovasi, dan ekspansi usaha.

3. **Business Efficiency**

Kualitas lingkungan usaha pada akhirnya perlu diikuti oleh kemampuan dunia usaha dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Pada aspek *Business Efficiency*, posisi *Labor Market* yang relatif baik (21) belum diikuti oleh *Productivity & Efficiency* (53), *Finance* (51), *Management Practices* (55), dan *Attitudes & Values* (53). Pola ini menunjukkan bahwa ketersediaan faktor produksi, khususnya tenaga kerja, belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kemampuan dunia usaha menghasilkan output secara lebih produktif dan bernilai tambah tinggi.

Temuan ini memperkuat pembahasan sebelumnya mengenai kualitas SDM bahwasanya tantangan manufaktur tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan tenaga kerja, tetapi juga dipengaruhi oleh kompetensi tenaga kerja, kemampuan mengadopsi teknologi, kualitas manajemen, dan kapasitas perusahaan dalam mengombinasikan tenaga kerja, modal, dan teknologi secara lebih efisien.

4. **Infrastructure**

Dukungan infrastruktur yang memadai menjadi salah satu pondasi utama bagi transformasi ekonomi jangka panjang. Pada aspek *Infrastructure*, Indonesia berada pada peringkat 42 untuk *Basic Infrastructure*, 47 untuk *Technological Infrastructure*, dan 48 untuk *Scientific Infrastructure*, sementara *Education* berada pada peringkat 63. Posisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan daya saing tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur fisik, tetapi juga kesiapan infrastruktur teknologi, kapasitas riset, dan kualitas pendidikan yang menopang peningkatan kapabilitas ekonomi.

Keterbatasan pada *Technological Infrastructure* dapat memperlambat digitalisasi dan adopsi teknologi, sementara lemahnya *Scientific Infrastructure* membatasi pengembangan riset dan inovasi teknologi yang lebih maju. Pada saat yang sama, rendahnya posisi *Education* berpotensi memperlebar kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kemampuan SDM dalam menyerap, mengadaptasi, dan mengembangkannya lebih lanjut.

Keterlibatan Indonesia dalam GVC masih bertumpu pada bahan baku dan barang antara serta belum sepenuhnya diikuti pendalaman struktur industri yang memberikan nilai tambah tinggi....

Keterbatasan pada berbagai pondasi daya saing tersebut pada akhirnya turut memengaruhi kemampuan industri Indonesia untuk meningkatkan posisinya dalam *Global Value Chains* (GVC).

Integrasi dalam GVC tidak hanya ditentukan oleh kapasitas produksi dan kemampuan ekspor, tetapi juga oleh kapabilitas industri dalam menguasai teknologi, memenuhi standar global, menyediakan tenaga kerja terampil, serta menghasilkan produk dan komponen dengan tingkat kompleksitas dan nilai tambah yang lebih tinggi. Semakin kuat kapabilitas tersebut, semakin besar pula peluang suatu negara untuk terlibat pada tahapan produksi yang menghasilkan nilai tambah lebih besar.

Namun demikian, posisi Indonesia dalam GVC masih menunjukkan sejumlah keterbatasan. Berdasarkan data WTO tahun 2022, tingkat partisipasi Indonesia dalam GVC masih relatif tertinggal dibandingkan sejumlah negara *peers* di Asia Tenggara maupun negara berkembang dan maju lainnya. Dari sisi strukturnya, partisipasi Indonesia juga masih lebih banyak didominasi oleh *forward participation*, sementara *backward participation* relatif rendah. Pola ini menunjukkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam rantai produksi global masih cukup banyak bertumpu pada penyediaan bahan baku dan barang antara (*intermediate goods*) yang kemudian diproses lebih lanjut di negara lain. Sebaliknya, keterlibatan pada tahapan yang lebih dekat dengan produk akhir dan memiliki kandungan nilai tambah lebih tinggi, seperti pengembangan komponen kompleks, manufaktur berbasis teknologi, desain produk, serta integrasi teknologi global cukup terbatas.

Struktur partisipasi tersebut penting diperhatikan karena posisi suatu negara dalam GVC pada akhirnya turut menentukan seberapa besar manfaat ekonomi yang dapat ditangkap dari aktivitas produksi global. Ketika keterlibatan lebih banyak terkonsentrasi pada tahapan awal rantai produksi, peluang untuk membangun penguasaan teknologi, mengembangkan pengetahuan, dan memperkuat kemampuan pemasok domestik juga menjadi lebih terbatas. Dengan demikian, peningkatan kapasitas produksi dan ekspor belum sepenuhnya berjalan seiring dengan pendalaman struktur industri. Apabila pola tersebut berlangsung dalam jangka panjang, persoalannya tidak lagi sekadar menyangkut kedalaman integrasi Indonesia dalam GVC, tetapi mulai berkaitan dengan kemampuan sektor manufaktur untuk mempertahankan perannya sebagai penggerak transformasi ekonomi.

Terdapat potensi risiko deindustrialisasi dini akibat lambatnya transformasi teknologi dan rendahnya integrasi rantai global....

Berbagai tantangan yang dihadapi industri pengolahan tersebut pada akhirnya tidak hanya berimplikasi terhadap kinerja sektor manufaktur dalam jangka pendek, tetapi juga berpotensi berkembang menjadi risiko yang lebih struktural berupa *premature deindustrialization* atau deindustrialisasi dini. Istilah ini merujuk pada kondisi ketika kontribusi manufaktur terhadap perekonomian mulai menurun sebelum suatu negara mencapai tingkat pendapatan yang relatif tinggi dan sebelum kapabilitas industrinya berkembang secara optimal. Kondisi tersebut perlu dibedakan dari deindustrialisasi yang umumnya terjadi pada negara maju, ketika peningkatan produktivitas, pendapatan, dan kompleksitas ekonomi telah memungkinkan terjadinya pergeseran aktivitas dari manufaktur menuju sektor jasa yang lebih produktif dan bernilai tambah tinggi. Dengan demikian, deindustrialisasi pada negara maju cenderung merefleksikan hasil dari proses transformasi struktural, sedangkan deindustrialisasi dini justru dapat terjadi ketika proses tersebut berlangsung sebelum pondasi industrialisasi terbentuk secara memadai.

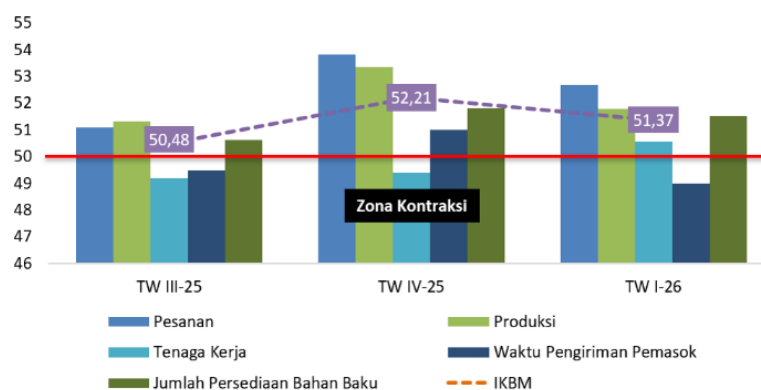
Bagi negara berkembang, deindustrialisasi yang terjadi terlalu dini menjadi persoalan yang lebih serius karena manufaktur masih berperan penting sebagai salah satu jalur utama untuk melakukan *productivity catch-up*, mendorong transfer dan pembelajaran teknologi, menciptakan lapangan kerja yang lebih produktif, serta membangun dan mengakumulasi kapabilitas industri. Ketika kontribusi manufaktur mulai menyusut sebelum kapasitas tersebut terbentuk secara memadai, kesempatan untuk melakukan transformasi struktural menuju aktivitas ekonomi yang lebih kompleks dan bernilai tambah tinggi dapat menjadi semakin terbatas. Terlebih apabila pergeseran dari manufaktur tidak diikuti oleh ekspansi sektor jasa yang memiliki produktivitas, kemampuan inovasi, dan kapasitas penciptaan nilai tambah yang setara

atau lebih tinggi. Dalam kondisi demikian, penurunan peran manufaktur tidak lagi semata-mata mencerminkan perubahan struktur ekonomi, tetapi berpotensi menciptakan *productivity gap* yang semakin sulit ditutup dan mempersempit ruang bagi negara untuk mengejar ketertinggalan produktivitas dan teknologi dari negara-negara yang lebih maju.

Meskipun mengalami moderasi, keyakinan pelaku usaha terhadap keberlanjutan produksi manufaktur tetap terjaga sehingga memberikan sinyal positif adanya ruang pertumbuhan ke depan....

Berbagai tantangan struktural yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa transformasi industri pengolahan Indonesia menuju aktivitas produksi yang lebih kompleks, produktif, dan bernilai tambah tinggi masih menghadapi sejumlah hambatan. Meski demikian, kondisi tersebut tidak serta-merta mengindikasikan terbatasnya prospek pengembangan manufaktur nasional. Peningkatan kapasitas produksi, investasi produktif, penguasaan teknologi, dan pendalaman struktur industri masih dapat menjadi ruang untuk memperkuat peran manufaktur dalam perekonomian. Optimisme terhadap peluang tersebut antara lain tercermin dari persepsi pelaku usaha mengenai kondisi bisnis yang sedang berlangsung dan prospeknya ke depan. Hal ini dapat dilihat melalui Indeks Kondisi dan Prospek Bisnis Industri Manufaktur (IKBM) yang menggambarkan penilaian dunia usaha terhadap kondisi bisnis manufaktur saat ini sekaligus ekspektasi terhadap perkembangannya pada periode mendatang. Perkembangan IKBM menunjukkan bahwa optimisme dunia usaha terhadap aktivitas manufaktur masih relatif terjaga. Selama tiga triwulan terakhir, yaitu Triwulan III-2025 hingga Triwulan I-2026, IKBM konsisten berada di atas level 50 atau berada di zona ekspansi. Indeks ini meningkat dari 50,48 pada Triwulan III-2025 menjadi 52,21 pada Triwulan IV-2025, sebelum kembali termoderasi menjadi 51,37 pada Triwulan I-2026. Penguatan pada akhir 2025 menunjukkan bahwa keyakinan pelaku usaha terhadap kondisi bisnis menguat, sedangkan penurunan pada awal 2026 mengindikasikan bahwa momentum ekspansi mulai melandai. Meski demikian, indeks yang tetap berada di atas ambang ekspansi menunjukkan bahwa perlambatan tersebut belum mengarah pada kontraksi aktivitas manufaktur.

Grafik 16 – Indeks Kondisi dan Prospek Bisnis Manufaktur Indonesia



Sumber: Data BPS, diolah

Dari sisi komponennya, ekspansi masih ditopang oleh pesanan dan aktivitas produksi yang konsisten berada di zona ekspansi. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap produk manufaktur masih cukup kuat untuk menopang keberlanjutan produksi. Dukungan juga berasal dari persediaan bahan baku yang tetap berada di atas level 50, mengindikasikan bahwa pelaku usaha masih mempertahankan ketersediaan input untuk memenuhi kebutuhan produksi. Kombinasi antara pesanan, produksi, dan kesiapan bahan baku tersebut memberikan sinyal

positif bahwa aktivitas manufaktur masih memiliki basis permintaan dan kapasitas operasional yang cukup kuat untuk melanjutkan ekspansi.

Namun demikian, penguatan tersebut belum sepenuhnya tercermin pada seluruh komponen. Indikator tenaga kerja masih berada di zona kontraksi pada Triwulan III dan IV-2025, yang mencerminkan kehati-hatian pelaku usaha dalam menambah kapasitas tenaga kerja. Perbaikannya ke zona ekspansi pada Triwulan I-2026 menjadi sinyal positif bahwa kebutuhan tenaga kerja mulai meningkat sejalan dengan aktivitas produksi. Di sisi lain, waktu pengiriman pemasok yang masih mengalami tekanan pada beberapa periode menunjukkan bahwa kelancaran rantai pasok tetap menjadi salah satu faktor yang dapat membatasi ekspansi produksi.

Secara keseluruhan, IKBM memperlihatkan bahwa manufaktur Indonesia masih memiliki ruang pertumbuhan, meskipun momentum ekspansinya belum sepenuhnya kuat dan merata. Permintaan dan produksi yang tetap ekspansif memberikan landasan bagi keberlanjutan aktivitas manufaktur, sementara perbaikan pada komponen tenaga kerja memberikan sinyal positif terhadap prospek peningkatan kapasitas produksi. Di sisi lain, moderasi indeks dan tekanan pada rantai pasok menunjukkan bahwa ekspansi tersebut masih perlu ditopang oleh kemampuan industri dalam merespons perkembangan permintaan dan menjaga kelancaran proses produksi.

Konsistensi Indeks Keyakinan Industri (IKI) yang bertahan di zona ekspansi memberikan sinyal positif, namun pelaku usaha harus cermat menjaga kapasitas produksi dan meningkatkan produktivitas untuk keberlanjutan jangka panjang....

Optimisme pelaku usaha yang tercermin dalam IKBM menunjukkan bahwa ruang ekspansi manufaktur masih terbuka. Gambaran tersebut kemudian dapat dilihat lebih lanjut melalui Indeks Keyakinan Industri (IKI) yang mencerminkan perkembangan kondisi industri, terutama dari sisi permintaan, produksi, dan persediaan. Berbeda dengan IKBM yang menangkap kondisi dan prospek bisnis dari perspektif pelaku usaha, IKI memberikan gambaran yang lebih dekat dengan aktivitas industri yang sedang berlangsung. Dengan demikian, kedua indikator tersebut dapat memberikan perspektif yang saling melengkapi mengenai keberlanjutan ekspansi manufaktur nasional.

Secara agregat, IKI konsisten berada di atas level 50 atau zona ekspansi selama periode pengamatan, dengan rentang indeks antara 51,32 hingga 54,12. Posisi tersebut mencerminkan bahwa aktivitas industri secara umum masih berada dalam fase ekspansi, meskipun kekuatannya mengalami dinamika antarperiode. Ekspansi terutama ditopang oleh pesanan baru dan produksi yang relatif terjaga. Indeks Pesanan Baru secara konsisten berada di zona ekspansi dan tidak mengalami kontraksi sepanjang periode pengamatan, bahkan mencapai level tertinggi sebesar 55,34 pada Februari 2026. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa permintaan terhadap produk industri masih menjadi salah satu penopang utama aktivitas manufaktur.

Tabel 5 – Perkembangan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Indonesia

Jenis Data	Desember-23	Desember-24	Desember-25	Januari-26	Februari-26	Maret-26	Apr-26	Mei-26	Juni-26
Indeks Kepercayaan Industri (IKI)	51,32	52,93	51,90	54,12	54,02	51,86	51,75	53,56	52,90
Komponen IKI : Indeks Pesanan Baru	53,44	50,71	52,76	55,27	55,34	52,20	51,43	53,47	53,35
Komponen IKI : Indeks Produksi	53,86	55,53	48,41	54,86	54,35	51,55	51,34	55,20	54,28
Komponen IKI : Indeks Persediaan Produk	42,21	54,58	54,99	50,14	50,25	51,47	53,13	51,33	49,72

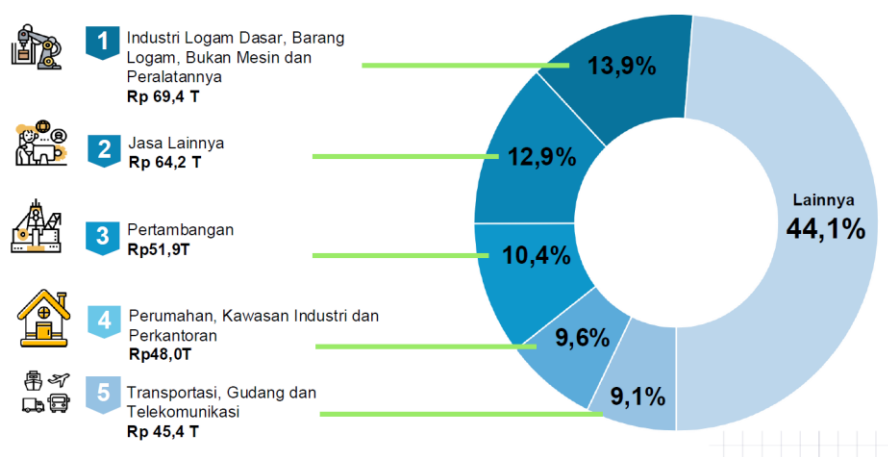
Sumber: Data BPS, diolah

Kondisi tersebut sejalan dengan perkembangan Indeks Produksi yang secara umum juga berada dalam zona ekspansi. Kontraksi hanya terjadi sementara pada Desember 2025 sebesar 48,41, sebelum kembali meningkat pada awal 2026. Pergerakan ini menunjukkan bahwa kapasitas produksi masih dapat menyesuaikan dengan perkembangan permintaan, sehingga penguatan pesanan baru relatif mampu diterjemahkan ke dalam aktivitas produksi. Sementara itu, Indeks Persediaan Produk bergerak lebih beragam dibandingkan pesanan baru dan produksi. Setelah mengalami kontraksi cukup dalam pada Desember 2023 sebesar 42,21, indeks berangsur membaik sepanjang 2024 hingga awal 2026. Pada Juni 2026, indeks kembali berada sedikit di bawah zona ekspansi pada level 49,72, sementara Indeks Pesanan Baru masih berada pada level 53,35 dan Indeks Produksi mencapai 54,28. Perbedaan arah tersebut menunjukkan bahwa perkembangan persediaan tidak selalu bergerak sejalan dengan pesanan dan produksi. Pada periode ketika pesanan dan produksi tetap ekspansif, perubahan persediaan dapat mencerminkan penyesuaian stok terhadap kebutuhan produksi maupun penyerapan pasar.

Realisasi investasi logam dasar memperkuat sektor hulu manufaktur, namun kesiapan ekosistem untuk mendukung hilirisasi ke produk bernilai tambah tinggi tetap perlu dioptimalkan....

Penguatan aktivitas manufaktur yang tercermin dari perkembangan IKBM dan IKI pada akhirnya perlu diikuti dengan pembentukan kapasitas produksi baru agar momentum tersebut dapat dipertahankan dalam jangka lebih panjang. Dalam hal ini, investasi menjadi salah satu faktor penting karena tidak hanya berperan dalam menambah kapasitas produksi, tetapi juga dapat memperkuat basis industri dan memperdalam keterkaitan antarsektor. Perkembangan realisasi investasi dengan demikian dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana momentum positif manufaktur mulai diterjemahkan ke dalam penguatan kapasitas industri. Perkembangan tersebut terlihat dari realisasi investasi Triwulan I-2026, ketika sektor industri pengolahan masih menjadi salah satu sektor utama yang menarik investasi. Kontribusi terbesar berasal dari subsektor Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya, yang memiliki posisi strategis dalam rantai produksi karena menyediakan bahan baku dan barang antara bagi berbagai industri hilir, seperti otomotif, elektronik, mesin dan peralatan, konstruksi, serta subsektor manufaktur lainnya.

Grafik 17 – Lima Subsektor dengan Realisasi PMA dan PMDN Terbesar pada Triwulan I - 2026



Sumber: Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

Tingginya realisasi investasi pada subsektor tersebut menunjukkan adanya penguatan aktivitas pada industri yang memiliki posisi strategis dalam struktur manufaktur nasional, mengingat subsektor ini berperan sebagai penyedia bahan baku dan barang antara yang menopang berbagai

aktivitas industri hilir, seperti otomotif, elektronik, mesin dan peralatan, konstruksi, serta sektor manufaktur lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peluang untuk memperkuat proses hilirisasi dan pendalaman struktur industri nasional melalui peningkatan kapasitas produksi domestik serta penguatan keterkaitan antarsektor.

Keterkaitan yang luas dengan berbagai subsektor manufaktur juga membuat peningkatan investasi pada industri logam dasar berpotensi menghasilkan *multiplier effect*, baik melalui peningkatan permintaan terhadap industri pendukung maupun penguatan rantai pasok domestik. Namun, besarnya investasi pada industri hulu belum dengan sendirinya mencerminkan keberhasilan pendalaman industri. Manfaat tersebut akan lebih besar apabila peningkatan kapasitas di industri dasar diikuti oleh perkembangan industri antara dan hilir dengan tingkat kompleksitas, pemanfaatan teknologi, dan nilai tambah yang lebih tinggi. Tanpa keterhubungan tersebut, ekspansi industri dasar berisiko lebih banyak memperkuat peran Indonesia sebagai pemasok bahan baku dan barang antara dalam rantai nilai global, sementara kemampuan untuk menangkap nilai tambah pada tahapan produksi yang lebih maju masih terbatas.

Dengan demikian, perkembangan investasi pada industri logam dasar perlu dilihat tidak hanya dari besarnya kapasitas yang berhasil dibangun, tetapi juga dari sejauh mana investasi tersebut mendorong terbentuknya rantai produksi yang lebih terintegrasi di dalam negeri. Semakin kuat keterhubungan antara industri hulu, antara, dan hilir, semakin besar peluang investasi tersebut untuk menghasilkan efek pengganda, mendorong transfer teknologi, memperkuat pemasok domestik, dan meningkatkan kandungan nilai tambah dalam negeri. Hal ini menjadi penting agar ekspansi investasi tidak berhenti pada peningkatan kapasitas produksi dasar, tetapi turut mendorong transformasi manufaktur menuju aktivitas produksi yang lebih kompleks dan bernilai tambah tinggi.

Pemerintah terus mendorong transformasi struktural industri pengolahan nasional melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, keberhasilan upaya tersebut memerlukan dukungan ekosistem industri yang kuat dan terintegrasi....

Dalam rangka memperkuat daya saing dan meningkatkan nilai tambah sektor manufaktur, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah kebijakan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan *output* produksi, tetapi juga diarahkan untuk melakukan transformasi struktural menuju industri dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Adapun berbagai kebijakan strategis yang telah disiapkan oleh Pemerintah, antara lain:

1. Percepatan hilirisasi industri nasional

Kebijakan hilirisasi telah ditempatkan sebagai salah satu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta diperkuat melalui penetapannya sebagai Proyek Strategis Nasional. Arah kebijakan tersebut mendorong pengembangan kegiatan industri yang menghasilkan nilai tambah lebih tinggi dari pengolahan sumber daya domestik, sekaligus menjadi bagian dari agenda transformasi ekonomi menuju pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Adapun lima kelompok industri prioritas, antara lain:

- a. Industri berbasis sumber daya alam, meliputi industri berbasis agro (pertanian, perkebunan, kehutanan), industri berbasis hilirisasi tambang, serta industri berbasis sumber daya laut.
- b. Industri dasar, mencakup industri kimia dasar dan industri logam.
- c. Industri berteknologi menengah-tinggi, termasuk industri perkapalan, industri kedirgantaraan, industri otomotif dan alat angkut, industri pertahanan, industri alat kesehatan, industri produk kimia dan farmasi, industri mesin dan perlengkapan, dan industri elektronik.

- d. Industri barang konsumsi berkelanjutan, yakni industri makanan dan minuman, industri tekstil dan produk tekstil, serta industri alat kaki.
 - e. Industri berbasis inovasi dan riset, yaitu industri berbasis bio dan bioteknologi.
2. Pengimplementasian Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) DKI Jakarta 2026–2046

RPIP DKI Jakarta 2026-2046 mengacu pada RPJPN, RPJMN, dan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2025-2045. Arah tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, provinsi ini secara resmi ditetapkan sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara.

Melalui RPIP DKI Jakarta 2026-2046, pembangunan industri diarahkan untuk memperkuat industri pengolahan bernilai tambah tinggi, meningkatkan penguasaan teknologi, dan kapasitas inovasi, mengurangi ketergantungan terhadap produk impor sekaligus mendorong ekspor, mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja unggul, serta membangun ekosistem industri halal.

3. Penguatan ekosistem industri melalui peningkatan investasi berkualitas

Investasi diarahkan untuk membangun pusat-pusat industri terpadu, memperkuat keterhubungan antara industri besar dengan industri pendukung, meningkatkan transfer teknologi, serta mengembangkan pemasok lokal (*local supplier development*).

Strategi ini menjadi penting mengingat struktur industri pengolahan Indonesia masih memiliki ketergantungan relatif tinggi terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal. Dengan memperkuat kapasitas industri domestik dan memperluas basis pemasok lokal, pemerintah berupaya meningkatkan ketahanan rantai pasok nasional sekaligus mengurangi kerentanan industri terhadap gangguan eksternal.

4. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui penguatan kebijakan P3DN dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan penggunaan produk nasional, memperluas pasar bagi industri domestik, serta mendorong terbentuknya basis pemasok dalam negeri yang lebih kuat. Peningkatan kandungan lokal dalam produk industri diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap produk impor sekaligus meningkatkan keterlibatan industri nasional dalam rantai pasok domestik maupun global.

Selain itu, kebijakan substitusi impor menjadi salah satu instrumen penting untuk memperdalam struktur industri, khususnya pada sektor-sektor yang masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap input produksi dari luar negeri..

5. Transformasi digital dan adopsi teknologi industri melalui agenda Making Indonesia 4.0.

Program ini bertujuan merevitalisasi sektor manufaktur melalui peningkatan produktivitas, efisiensi proses produksi, serta penguatan kemampuan inovasi industri. Implementasi program dilakukan melalui pemanfaatan teknologi digital, otomatisasi, integrasi data, serta pengembangan kemampuan industri dalam mengadopsi teknologi baru.

Transformasi menjadi semakin penting karena daya saing manufaktur global saat ini tidak lagi hanya ditentukan oleh kemampuan produksi dalam skala besar, tetapi juga oleh kemampuan menghasilkan produk yang kompleks, inovatif, dan berbasis teknologi.

Meskipun berbagai kebijakan tersebut telah diarahkan untuk memperkuat fondasi industrialisasi nasional, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam memastikan terjadinya peningkatan kapasitas teknologi domestik, penguatan industri pendukung, serta penciptaan keterkaitan yang lebih dalam dalam rantai nilai global. Tanpa penguatan aspek tersebut, hilirisasi dan peningkatan investasi berisiko hanya meningkatkan kapasitas produksi tanpa secara signifikan mendorong peningkatan kompleksitas dan nilai tambah industri pengolahan nasional.

Sinergi antara kebijakan industrialisasi pemerintah dan kebijakan di sektor keuangan diharapkan dapat memperkuat transformasi struktural industri pengolahan nasional menuju fondasi industrialisasi yang lebih mandiri, adaptif, dan berkelanjutan....

Dalam mendukung agenda transformasi struktural industri pengolahan nasional, OJK memiliki peran strategis melalui penguatan fungsi intermediasi sektor jasa keuangan agar mampu menyediakan sumber pembiayaan yang memadai bagi sektor-sektor produktif, termasuk industri pengolahan. Peran tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong hilirisasi, peningkatan nilai tambah, serta penguatan daya saing industri nasional. Melalui kebijakan pengembangan dan pengawasan sektor jasa keuangan, OJK mendorong terciptanya ekosistem pembiayaan yang mampu mengarahkan sumber daya ke sektor-sektor produktif dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan keberlanjutan. Beberapa upaya yang dilakukan OJK, antara lain:

1. Memperkuat peran industri perbankan dalam mendukung pembiayaan sektor produktif melalui peningkatan kualitas intermediasi keuangan.

OJK secara berkelanjutan melakukan pemantauan terhadap perkembangan penyaluran kredit, termasuk kepada sektor manufaktur, serta mendorong lembaga jasa keuangan untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan kepada sektor-sektor yang memiliki prospek pertumbuhan dan nilai tambah tinggi.

Dukungan pembiayaan tersebut menjadi semakin penting mengingat pengembangan industri pengolahan, khususnya dalam mendukung agenda hilirisasi, membutuhkan kebutuhan investasi yang besar dan berjangka panjang, baik untuk pembangunan fasilitas produksi, modernisasi teknologi, maupun peningkatan kapasitas industri.

2. Memperluas sumber pendanaan dunia usaha melalui penguatan dan pendalaman pasar modal.

Pengembangan instrumen pendanaan jangka panjang, seperti penerbitan obligasi korporasi maupun instrumen pembiayaan berkelanjutan, menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan investasi industri yang memiliki skala besar dan periode pengembalian modal yang panjang.

Hal ini cukup relevan bagi pengembangan industri pengolahan bernilai tambah tinggi, seperti industri pengolahan mineral, ekosistem kendaraan listrik, serta industri berbasis teknologi, yang membutuhkan dukungan pembiayaan untuk memperkuat kapasitas produksi dan meningkatkan daya saing.

3. Mendukung transformasi industri menuju ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) dan pembiayaan hijau (*green financing*).

Melalui kebijakan keuangan berkelanjutan, OJK mendorong lembaga jasa keuangan untuk mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (*Environmental, Social, and Governance/ESG*) dalam proses penyaluran pembiayaan.

Kebijakan tersebut menjadi semakin penting seiring meningkatnya tuntutan global terhadap praktik industri yang lebih rendah karbon dan berkelanjutan, sehingga dapat mendukung peningkatan daya saing industri nasional dalam menghadapi perubahan standar perdagangan internasional.

4. Selain mendukung industri berskala besar, OJK juga berperan dalam memperkuat ekosistem pembiayaan bagi industri kecil dan menengah yang memiliki posisi penting dalam membangun rantai pasok manufaktur domestik.

Penguatan akses pembiayaan bagi UMKM dan industri kecil dilakukan melalui peningkatan inklusi keuangan, penguatan kapasitas usaha, serta pengembangan skema pembiayaan yang lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pelaku usaha.

Upaya tersebut menjadi penting mengingat pendalaman struktur industri nasional tidak hanya bergantung pada keberadaan industri besar, tetapi juga pada kemampuan membangun keterkaitan yang kuat antara industri besar dengan industri pendukung di dalam negeri.

Lampiran

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN I**Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko**

No.	Nama	Rumus
Indikator Kinerja Perbankan		
1.	<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	$\frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}}$
2.	<i>Return on Asset (ROA)</i>	$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata – rata Total Aset}}$
3.	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	$\frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}}$
4.	<i>Net Interest Margin (NIM)</i>	$\frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata – rata Aktiva Produktif}}$
5.	<i>Net Operation Margin (NOM)</i>	$\frac{\text{Pendapatan Operasional Bersih}}{\text{Rata – rata Aktiva Produktif}}$
6.	<i>Cash Ratio (CR)</i>	$\frac{\text{Total Alat Likuid}}{\text{Total Hutang Lancar}}$
Risiko Kredit		
7.	<i>Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Finance (NPF) Gross</i>	$\frac{\text{Kredit/Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$
8.	<i>Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Finance (NPF) Net</i>	$\frac{\text{Kredit/Pembiayaan Bermasalah} - \text{CKPN atas Kredit/Pby Bermasalah}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$
9.	Rasio <i>Loan at Risk (LaR)</i>	$\frac{\text{Restru Kredit kol. 1} + \text{Kredit kol. 2} + \text{Kredit NPL}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$
Risiko Pasar		
10.	Rasio PDN	$\frac{\text{Posisi Devisa Netto}}{\text{Total Modal}}$
11.	Rasio <i>Interest Risk Rate in the Banking Book (IRRBB)</i>	$\frac{\text{Kewajiban Suku Bunga Tetap Jangka Waktu} > 1 \text{ tahun}}{\text{Aset Suku Bunga Tetap Jangka Waktu} > 1 \text{ tahun}}$
Risiko Likuiditas		
12.	<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	$\frac{\text{Total Kredit kepada Pihak Ketiga Bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
13.	<i>Finance to Deposit Ratio (FDR)</i>	$\frac{\text{Total Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
14.	AL/DPK	$\frac{\text{Alat Likuid}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
15.	AL/NCD	$\frac{\text{Alat Likuid}}{30\% \text{ Tabungan} + 30\% \text{ Giro} + 10\% \text{ Deposito}}$
16.	<i>Liquidity Coverage Ratio (LCR)</i>	$\frac{\text{High Quality Liquid Assets (HQLA)}}{\text{Net Cash Outflow (NCO)}}$
17.	<i>Net Stable Funding Ratio (NSFR)</i>	$\frac{\text{Available Stable Funding (ASF)}}{\text{Required Stable Funding (RSF)}}$

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN II

GLOSSARY

Istilah	Keterangan
A	
Aktivitas Bank	Jasa yang disediakan oleh Bank kepada nasabah (SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti).
AL/DPK	Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid ($AL = \text{Final Excess Reserve} + \text{Kas} + \text{Penempatan pada BI lainnya} + \text{Reserve Repo}$) terhadap Dana Pihak Ketiga ($DPK = \text{Tabungan} + \text{Giro} + \text{Deposito}$). Likuiditas yang baik jika berada diatas <i>threshold</i> $AL/DPK > 10\%$.
AL/NCD	Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid terhadap <i>Non Core Deposit</i> ($NCD = 30\% \text{ Tabungan} + 30\% \text{ Giro} + 10\% \text{ Deposito}$). Likuiditas yang baik jika berada diatas <i>threshold</i> $AL/NCD > 50\%$.
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	Jumlah aset dalam neraca yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aset sesuai ketentuan yang berlaku. Komponen ATMR dibagi menjadi tiga, yaitu: ATMR Kredit, ATMR Operasional, dan ATMR Pasar.
B	
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	Pengukuran efisiensi yang diukur dari rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional.
C	
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	Penyisihan yang dibentuk atas penurunan nilai instrumen keuangan sesuai standar akuntansi keuangan.
<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	Rasio kecukupan modal yang diperoleh dari perhitungan $(\text{modal}/\text{ATMR}) \times 100\%$, dengan <i>threshold</i> yang ditetapkan oleh BIS (<i>Bank for International Settlements</i>) sebesar minimal 8%.
<i>Cash Ratio</i> (CR)	Perbandingan antara alat likuid terhadap utang lancar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR dan sistem penilaian tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah. (POJK No.19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS).
<i>Concentration Ratio</i> (CR)	<i>Concentration Risk</i> digunakan untuk mengukur tingkat konsentrasi pada sejumlah entitas. Dalam hal ini, pengukuran pada perbankan diukur melalui total aset.

Istilah	Keterangan
D	
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing.
Deposito	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
F	
<i>Fair Value Through Other Comprehensive Income</i> (FVTOCI)	Keuntungan atau kerugian atas aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai "tersedia untuk dijual" diakui dalam pendapatan komprehensif lain.
<i>Fair Value Through Profit or Loss</i> (FVTPL)	Keuntungan dan kerugian atas aset keuangan atau liabilitas keuangan, yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
G	
Giro	Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
Giro Wajib Minimum (GWM)	Jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK. (PBI No.19/6/PBI/2017)
I	
<i>Interest Rate Risk in Banking Book</i> (IRRBB)	Risiko suku bunga pada aset di <i>banking book</i> , atau risiko yang ada saat ini atau yang akan datang terhadap permodalan dan penghasilan bank yang timbul dari pergerakan suku bunga yang memengaruhi posisi <i>banking book</i> pada bank.
K	
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMU)	Kewajiban bank umum untuk menyediakan modal minimum sebesar persentase tertentu dari aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana ditetapkan oleh OJK (POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum)
KUR (Kredit Usaha Rakyat)	Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup (Permenko No.11 Tahun 2017).

Istilah	Keterangan
L	
Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)	Kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi (POJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif).
Lembaga Jasa Keuangan (LJK)	Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT)	Merupakan unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Kaitannya dengan pemerintah, LNPRT merupakan mitra dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti penegakan hukum, perlindungan konsumen, pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan hidup. Contoh: Ormas, LSM, Lembaga Keagamaan. Sumber: BPS
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.
<i>Liquidity Coverage Ratio (LCR)</i>	Merupakan salah satu standar perhitungan risiko likuiditas bank. LCR merupakan perbandingan antara <i>High Quality Liquid Asset</i> (HQLA) dengan total arus keluar bersih (<i>Net Cash Outflow/NCO</i>) selama 30 hari kedepan dalam scenario stress. Kelompok Bank yang wajib menerapkan LCR adalah BUKU 3, BUKU 4, dan Bank yang dimiliki Asing baik KCBA maupun <i>Local entity</i> (Non KCBA). LCR ditetapkan paling rendah sebesar 100%. (POJK Nomor 42/POJK.03/2015)
<i>Loan at Risk (LaR)</i>	<i>Loan at Risk (LaR)</i> merupakan indikator risiko atas kredit yang disalurkan yang terdiri atas kredit kolektibilitas 1 (kualitas Lancar) yang telah direstrukturisasi, kolektibilitas 2 (kualitas Dalam Perhatian Khusus), serta kredit bermasalah atau <i>Non Performing Loan (NPL)</i> .
<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	Rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank (PBI No.15/15/PBI/2013).
M	
Modal Inti	Komponen permodalan yang terdiri dari modal inti utama (<i>Common Equity Tier 1</i>) dan modal inti tambahan (<i>Additional Tier 1</i>). Modal inti utama termasuk didalamnya modal disetor, cadangan tambahan modal, <i>minority interest</i> hasil konsolidasi, faktor pengurang CET 1, kekurangan modal, serta eksposur sekuritisasi. Sementara

Istilah	Keterangan
	modal inti tambahan diantaranya saham preferen, surat berharga dan pinjaman subordinasi, dan komponen lainnya (sesuai ketentuan BASEL III) (POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).
<i>Mudharabah</i>	Perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (PBI No. 5/9/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah).
N	
<i>Net Interest Margin</i> (NIM)	Merupakan indikator rentabilitas bank yang didapat dari rasio Pendapatan Bunga Bersih terhadap rata-rata Total Aset Produktif (SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011).
<i>Net Stable Funding Ratio</i> (NSFR)	Rasio Pendanaan Stabil Bersih atau NSFR adalah perbandingan antara Pendanaan Stabil yang Tersedia (ASF) dengan Pendanaan Stabil yang Diperlukan (RSF). NSFR ditujukan untuk mengurangi risiko likuiditas terkait sumber pendanaan untuk jangka waktu yang lebih panjang. NSFR ditetapkan paling rendah 100%. (POJK No. 50/POJK.03/2017)
<i>Non Performing Loan/Finance</i> (NPL) atau (NPF), Kredit/Pembiayaan Bermasalah	Kredit/pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan ketentuan OJK mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.
P	
<i>Pembiayaan Istishna'</i>	Pembiayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
<i>Pembiayaan Mudharabah</i>	Pembiayaan dalam bentuk kerja sama suatu usaha antara Bank yang menyediakan seluruh modal dengan nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
<i>Pembiayaan Murabahah</i>	Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)

Istilah	Keterangan
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara Bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan <i>Qardh</i>	Pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pendanaan Non Inti	Pendanaan yang menurut Bank relatif tidak stabil atau cenderung tidak mengendap di Bank baik dalam situasi normal maupun krisis, meliputi: (1) dana pihak ketiga yang jumlahnya di atas Rp2 miliar; (2) seluruh transaksi antar Bank; dan (3) seluruh pinjaman (<i>borrowing</i>) tetapi tidak termasuk pinjaman subordinasi yang termasuk komponen modal. (SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum)
Posisi Devisa Neto (PDN)	Selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam rupiah. (PBI No.6/20/PBI/2004 Perubahan Atas PBI Nomor 5/13/PBI/2003 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum)
Produk Bank	Instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank. Produk dimaksud adalah produk yang diciptakan, diterbitkan, dan/atau dikembangkan oleh Bank yang terkait dengan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. (SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti).
R	
Rencana Bisnis Bank (RBB)	Dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha bank jangka pendek dan jangka menengah, termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
<i>Return on Asset</i> (ROA)	Salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan mendanai aktiva) dikeluarkan dari analisis.
Risiko Nilai Tukar	Risiko nilai tukar terkait dengan potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat perubahan nilai tukar terhadap posisi portofolio bank. Risiko nilai tukar berasal dari dampak pergerakan nilai tukar terhadap portofolio valas bank baik di sisi aset maupun kewajiban.

Istilah	Keterangan
Risiko Operasional	Penilaian risiko operasional bank mencakup penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko operasional. Hasil penilaian risiko operasional digunakan antara lain sebagai dasar untuk menetapkan strategi dan tindakan pengawasan terhadap risiko operasional bank. Risiko inheren operasional pada perbankan dievaluasi atas dasar karakteristik dan kompleksitas bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi dan infrastruktur pendukung, <i>fraud</i> , serta kejadian eksternal.
Risiko Pasar	Potensi kerugian yang dihadapi sebagai akibat pergerakan dalam harga pasar baik berupa nilai tukar maupun suku bunga.
Risiko Suku Bunga	Risiko kerugian pada posisi keuangan (neraca dan rekening administratif) akibat dari perubahan suku bunga yang dapat terekspose pada instrumen keuangan yang dikategorikan sebagai <i>trading book</i> maupun <i>banking book</i> .
T	
Tabungan	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)

Halaman ini sengaja dikosongkan



Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan
Menara Radius Prawiro, Gedung A, Lantai 10
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta Pusat
Telp: 021-29600000
e-mail: dsapi@ojk.go.id

